



PERATURAN EITI, EDISI 2011

termasuk Panduan Validasi

Publikasi ini merupakan kumpulan persyaratan untuk penerapan standar EITI. Kumpulan persyaratan tersebut mencakup Prinsip EITI, Persyaratan, Panduan Validasi, dan Nota Kebijakan yang diterbitkan oleh Sekretariat Internasional EITI, dalam rangka meneruskan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan EITI

Sekretariat Internasional EITI Oslo
VERSI: 1 November 2011

Peraturan EITI

Termasuk Panduan Validasi

© EITI 2011

Diedit oleh Sam Bartlett dan

Kjerstin Andreassen

Desain oleh Alison Beanland

(Panduan Validasi - Diterbitkan oleh the Department for International Development
© Crown hak cipta 2006)

Publikasi ini (tidak termasuk logo) dapat direproduksi secara gratis dalam berbagai format atau media jika direproduksi secara akurat dan tidak digunakan dalam konteks yang menyesatkan. Materi publikasi ini harus diakui sebagai hak cipta Crown dengan judul dan sumber publikasi yang ditentukan.

Hak cipta dalam pengaturan tipografi dan desain merupakan milik EITI.
Dicetak di Norwegia, 2011

Sekretariat Internasional EITI

Ruseløkkveien 26

0251 Oslo

Norwegia

Telp: +47 22242105

Situs web: www.eiti.org

E-mail: secretariat@eiti.org

PERATURAN EITI, EDISI 2011

termasuk Panduan Validasi

Publikasi ini merupakan kumpulan persyaratan untuk penerapan standar EITI. Kumpulan persyaratan tersebut mencakup Prinsip EITI, Persyaratan, Panduan Validasi, dan Nota Kebijakan yang diterbitkan oleh Sekretariat Internasional EITI, dalam rangka meneruskan keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan EITI.

Versi ini, tertanggal 1 November 2011, tidak mengalami perubahan signifikan dari Versi 2011 sebelumnya.

Daftar Isi

Prakata	4
Pengantar	6
1 Prinsip EITI	7
2 Kriteria EITI	8
3 Persyaratan bagi Negara-negara yang Menerapkan EITI	10
3.1 Persyaratan pendaftaran	12
3.2 Persiapan persyaratan	17
3.3 Persyaratan keterbukaan	25
3.4 Persyaratan diseminasi	26
3.5 Persyaratan Kajian dan Validasi	28
3.6 Persyaratan untuk mempertahankan status patuh	30
3.7 Prosedur transisi untuk Peraturan EITI edisi 2011	31
4 Panduan Validasi	35
4.1 Tujuan Validasi	35
4.2 Gambaran Umum Validasi	36
4.3 Langkah-langkah proses Validasi	37
4.4 Metodologi Validasi	38
4.5 Petisi dan Penyelesaian Sengketa	40
4.6 Standar Kerangka Acuan untuk Validasi	41
Formulir penilaian mandiri untuk perusahaan – tingkat negara	55
5 Catatan Kebijakan EITI	56
6 Tata kelola, manajemen dan Administrasi EITI	74
6.1 Anggaran Dasar	75

PRAKATA

EITI telah menempuh perjalanan panjang sejak Peraturan EITI pertama kali diterbitkan tahun 2009. Jumlah negara yang menerapkan EITI telah tumbuh dengan pesat dan EITI juga diterapkan dengan cara-cara baru dan inovatif. Sekitar 100 laporan EITI telah diterbitkan dan banyak negara telah menyelesaikan validasi EITI untuk menilai sejauh mana kepatuhan mereka terhadap standar EITI. Melalui validasi tersebut, beberapa negara dinyatakan telah memenuhi persyaratan standar EITI, sementara sisanya telah mengidentifikasi langkah yang dibutuhkan untuk menuju kesana.

Pada Peraturan EITI edisi ini diperkenalkan bab baru dalam Persyaratan EITI. Bab ini – yang tertera setelah bab Prinsip-Prinsip EITI dan sebelum bab Panduan Validasi – memperjelas persyaratan yang harus dipenuhi negara yang menerapkan EITI dan para pemangku kepentingan agar memenuhi standar EITI. Yang sebelumnya tercakup dalam Panduan Validasi, kini Persyaratan EITI dikemukakan secara lebih jelas dan mencakup sejumlah persyaratan baru untuk memastikan kualitas dan konsistensi proses EITI. Panduan Validasi juga telah ditinjau ulang dan diperjelas, dan juga menyediakan instruksi bagi validator dalam memvalidasi Persyaratan EITI yang telah dipenuhi.

Sejak Panduan Validasi disetujui tahun 2006, Dewan EITI telah menyetujui beberapa aturan penjelasan, yang dikomunikasikan dalam Catatan Kebijakan EITI. Beberapa penjelasan kunci, yang asalnya dikembangkan dalam Catatan Kebijakan, sekarang bisa ditemukan di bab mengenai Persyaratan EITI atau dalam Panduan Validasi. Misalnya, Dewan EITI menyetujui tenggat waktu Validasi di bulan Mei 2008 dan ini dikomunikasikan dalam Catatan Kebijakan EITI 3. Informasi terkait tenggat waktu tersebut kini menjadi bagian dalam bab baru tentang Persyaratan dan juga dalam Panduan Validasi.

Pada Konferensi Global EITI di Doha tahun 2009, diadopsilah struktur tata kelola bagi EITI. Asosiasi Anggota EITI dibentuk melalui penerapan atas Anggaran Dasar EITI. Pengalaman awal menkonfirmasi bahwa Anggaran Dasar tersebut berfungsi baik. Setelah pengkajian atas tata kelola yang dilakukan di akhir tahun 2010, beberapa perubahan kecil diajukan oleh Dewan dan disahkan pada Konferensi EITI di Paris. Dilakukan juga pembaruan pedoman konstituensi.

Seiring meningkatnya jumlah negara yang menerapkan EITI, meningkat pula jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dengan EITI. Bahkan jika perubahan atas Peraturan EITI ini lebih bersifat mengklarifikasi, hal ini merupakan hasil dari konsultasi yang luas dan pembahasan oleh Dewan EITI dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk semua orang yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas nama semua orang yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi EITI.

Peraturan ini bukanlah edisi terakhir dari Peraturan EITI. Seperti halnya lembaga pemerintahan, Peraturan EITI telah berkembang dari waktu ke waktu dan akan tunduk pada interpretasi yang berkelanjutan dan penyempurnaan di masa depan.

Sebagai Ketua Dewan EITI, merupakan suatu kehormatan untuk memimpin pekerjaan yang terkadang kompleks ini yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Saya harus menjelaskan bahwa aturan baru ini disusun sebelum saya menjabat posisi Ketua Dewan di bulan Maret 2011 dan saya berterima kasih saya kepada semua orang yang berkontribusi atas Peraturan ini, termasuk kepada Ketua Dewan EITI sebelumnya, Peter Eigen. Semua pemangku kepentingan telah bekerja keras untuk mencapai kompromi yang mendukung pelaksanaan yang efektif dan memberikan dampak berarti pada tingkat negara. Dalam beberapa tahun terakhir kami telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mengentaskan korupsi dan menuntut transparansi dari semua pihak, namun perjalanan yang harus ditempuh masih panjang. Kita belum mencapai keberhasilan sampai warga di negara yang kaya sumber daya benar-benar melihat manfaat dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan perbaikan nyata dalam kehidupan mereka.

London, 1 November 2011
Clare Short
Ketua Dewan EITI

PENGANTAR

EITI dimulai sebagai kampanye organisasi masyarakat sipil agar perusahaan ekstraktif mempublikasikan pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah tuan rumah, diambil dari pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, pada tahun 2002. Selanjutnya, Pemerintah Inggris mengadakan pertemuan dengan kelompok negara-negara kaya sumber daya, perusahaan ekstraktif, dan organisasi masyarakat sipil dan mulai mengembangkan metodologi EITI. Pada konferensi di London tahun 2003, satu set prinsip-prinsip tersebut (Prinsip EITI) disepakati dan diluncurkanlah tahapan uji coba. Berdasarkan pada beberapa pengalaman yang diperoleh selama tahap uji coba, seperangkat kriteria (Kriteria EITI) disepakati pada tahun 2005 di sebuah pertemuan di Lancaster House. Ini adalah pertemuan perdana dari Kelompok Penasehat Internasional EITI, dipimpin oleh Peter Eigen dan para perwakilan pemangku kepentingan EITI, mereka melakukan lima kali pertemuan selama tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2005, Buku Sumber EITI diterbitkan, yang merupakan panduan ilustrasi untuk membantu negara-negara yang menerapkan EITI. Mengambil contoh pada pengalaman awal penerapan EITI, disepakati bahwa negara-negara yang menerapkan EITI harus divalidasi. Kelompok Penasehat Internasional mengawasi pengembangan dari Panduan Validasi, yang diluncurkan tahun 2006.

Kelompok Penasehat Internasional merilis laporan akhir (Laporan IAG) bersamaan dengan pelaksanaan konferensi Global EITI ketiga di Oslo pada bulan Oktober 2006. Dalam mengadopsi laporan ini, semua pemangku kepentingan EITI yang menghadiri konferensi menegaskan kembali dukungan mereka terhadap Prinsip EITI, Kriteria EITI dan panduan Validasi. Sejumlah rekomendasi juga dibuat, termasuk bahwa "... EITI harus membentuk Dewan *multi-stakeholder*, didukung oleh Sekretariat, untuk mengelola EITI di tingkat internasional."

Dewan Internasional EITI, yang dibentuk sesuai dengan rekomendasi yang dibuat ketika itu, telah mengambil sejumlah keputusan yang berkaitan dengan penerapan EITI dan tata kelola EITI sendiri. Keputusan yang diambil oleh Dewan yang relevan untuk penerapan EITI disampaikan kepada para pemangku kepentingan EITI melalui Catatan Kebijakan EITI. Sekretariat EITI telah menerbitkan dan membuat catatan tersebut tersedia dalam publikasi ini.

Edisi 2011 dari Peraturan EITI ini, termasuk panduan Validasi, menyatukan dokumen kebijakan yang secara bersama-sama membentuk Peraturan EITI. Buku aturan ini menetapkan persyaratan yang dibentuk oleh Dewan EITI bagi negara-negara yang menerapkan EITI dan perusahaan. Buku Aturan ini adalah panduan definitif atas persyaratan bagi negara-negara yang menerapkan EITI, dari 'pendaftaran' sebagai negara Kandidat sampai Validasi untuk mendapatkan status Patuh EITI.

Perbaikan kebijakan dan interpretasi lebih lanjut kemungkinan terjadi dan akan dikomunikasikan melalui Catatan Kebijakan EITI.

1. PRINSIP EITI

Sekelompok negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil yang beragam hadir di Lancaster House Conference di London (2003) yang diselenggarakan oleh Pemerintah UK. Mereka menyepakati Pernyataan Prinsip untuk meningkatkan transparansi atas pembayaran dan pendapatan di sektor ekstraktif. Prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai Prinsip EITI dan landasan bagi standar EITI.

PRINSIP EITI

1. Kami memiliki keyakinan yang sama bahwa penggunaan yang bijak atas kekayaan sumber daya alam harus menjadi mesin penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan warga suatu negara berada dalam ranah pemerintah berdaulat yang dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan nasional mereka.
3. Kami menyadari bahwa manfaat dari ekstraksi sumber daya merupakan arus pendapatan selama bertahun-tahun dan dapat sangat tergantung pada harga.
4. Kami menyadari bahwa pemahaman publik atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu dapat membangun debat publik dan memberi informasi atas opsi yang sesuai dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan.
5. Kami menggarisbawahi pentingnya transparansi pemerintah dan perusahaan dalam industri ekstraktif dan perlunya meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas.
6. Kami menyadari bahwa pencapaian transparansi yang lebih besar harus diletakkan dalam konteks yang menghormati kontrak dan hukum.
7. Kami menyadari bahwa transparansi keuangan dapat meningkatkan iklim investasi domestik maupun asing.
8. Kami percaya pada prinsip dan praktek akuntabilitas oleh pemerintah kepada semua warga negara untuk mengelola aliran pendapatan dan belanja publik.
9. Kami berkomitmen untuk mendorong penerapan standar yang tinggi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik, aktivitas pemerintah, dan dalam bisnis.
10. Kami percaya bahwa dibutuhkan pendekatan yang konsisten dan bisa diterapkan, yang secara sederhana dapat dilakukan dan digunakan, untuk keterbukaan pembayaran dan pendapatan di industri ekstraktif.
11. Kami percaya bahwa keterbukaan atas pembayaran di suatu negara harus melibatkan semua perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di negara tersebut.
12. Dalam mencari solusi, kami percaya bahwa semua pemangku kepentingan – termasuk pemerintah dan institusinya, perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi keuangan, investor, dan organisasi non-pemerintah – memiliki kontribusi penting dan relevan.

Formatted: Indonesian

2. KRITERIA EITI

Setelah Konferensi EITI di Lancaster House, EITI terus menggalang dukungan di tingkat internasional dari pemerintah, perusahaan multinasional besar, investor institusional, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Sejumlah negara mulai menafsirkan dan menerapkan Prinsip EITI dan dengan demikian memainkan peran penting dalam pembentukan EITI. Ini adalah fase uji coba penting bagi EITI. Menggunakan Prinsip EITI, negara-negara tersebut menerapkan EITI dalam konteks inisiatif domestik lainnya, membentuk rencana kerja dan memasukkan prosedur yang sesuai dengan negara tersebut.

Selama fase ini, keragaman pengalaman dalam penerapan EITI telah menambah kekayaan Standar EITI. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap perdebatan lebih luas mengenai perlunya pedoman implementasi yang jelas yang mana masih menghormati sifat sukarela atas penerapan Standar EITI dan penerapan spesifik yang dilakukan negara tertentu. Melewati fase uji coba dan memperluas EITI untuk menarik negara-negara kaya sumber daya lainnya, muncul kebutuhan atas serangkaian Kriteria EITI yang disepakati bersama untuk semua negara yang ingin menerapkan EITI.

Pada Konferensi EITI di London (2005) para peserta EITI mendukung kriteria EITI tetapi juga mendorong negara-negara untuk melampaui persyaratan minimal jika memungkinkan. Mereka menyadari nilai yang didapat saat memperoleh hasil dari pembelajaran selama tahap uji coba untuk membantu negara yang menerapkan EITI dan perusahaan pendukung. Mereka menyambut adanya panduan atas praktek terbaik yang diatur oleh IMF dalam Transparansi Fiskal yang Baik (Code of Good Practices on Fiscal Transparency) dan Manual Transparansi Fiskal (Manual on Fiscal Transparency). Peserta juga menyambut Buku Sumber EITI sebagai panduan dan tambahan ilustrasi untuk implementasi EITI.

KRITERIA EITI

1. Publikasi teratur tentang semua pembayaran minyak, gas dan pertambangan oleh perusahaan kepada pemerintah ("pembayaran") dan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan ("pendapatan") kepada khalayak luas melalui cara-cara yang dapat diakses publik, lengkap dan mudah dipahami.
2. Jika audit tersebut belum ada, pembayaran dan pendapatan adalah subjek audit yang kredibel, independen, dan sesuai dengan standar audit internasional.
3. Pembayaran dan penerimaan direkonsiliasikan oleh administrator yang kredibel dan independen, yang menerapkan standar audit internasional dan dengan publikasi dari opini administrator terkait rekonsiliasi tersebut termasuk perbedaan yang muncul, jika ada.
4. Pendekatan ini mencakup ke semua perusahaan termasuk perusahaan milik negara.

5. Masyarakat sipil secara aktif terlibat sebagai peserta dalam desain, pemantauan, dan evaluasi dari proses ini dan berkontribusi terhadap debat publik.
6. Rencana kerja yang berkelanjutan secara finansial dan bersifat publik dari semua hal diatas dikembangkan oleh pemerintah negara tuan rumah dengan bantuan dari institusi keuangan internasional, jika dibutuhkan, termasuk target yang terukur, jadwal pelaksanaan, dan kajian atas potensi kendala kapasitas.

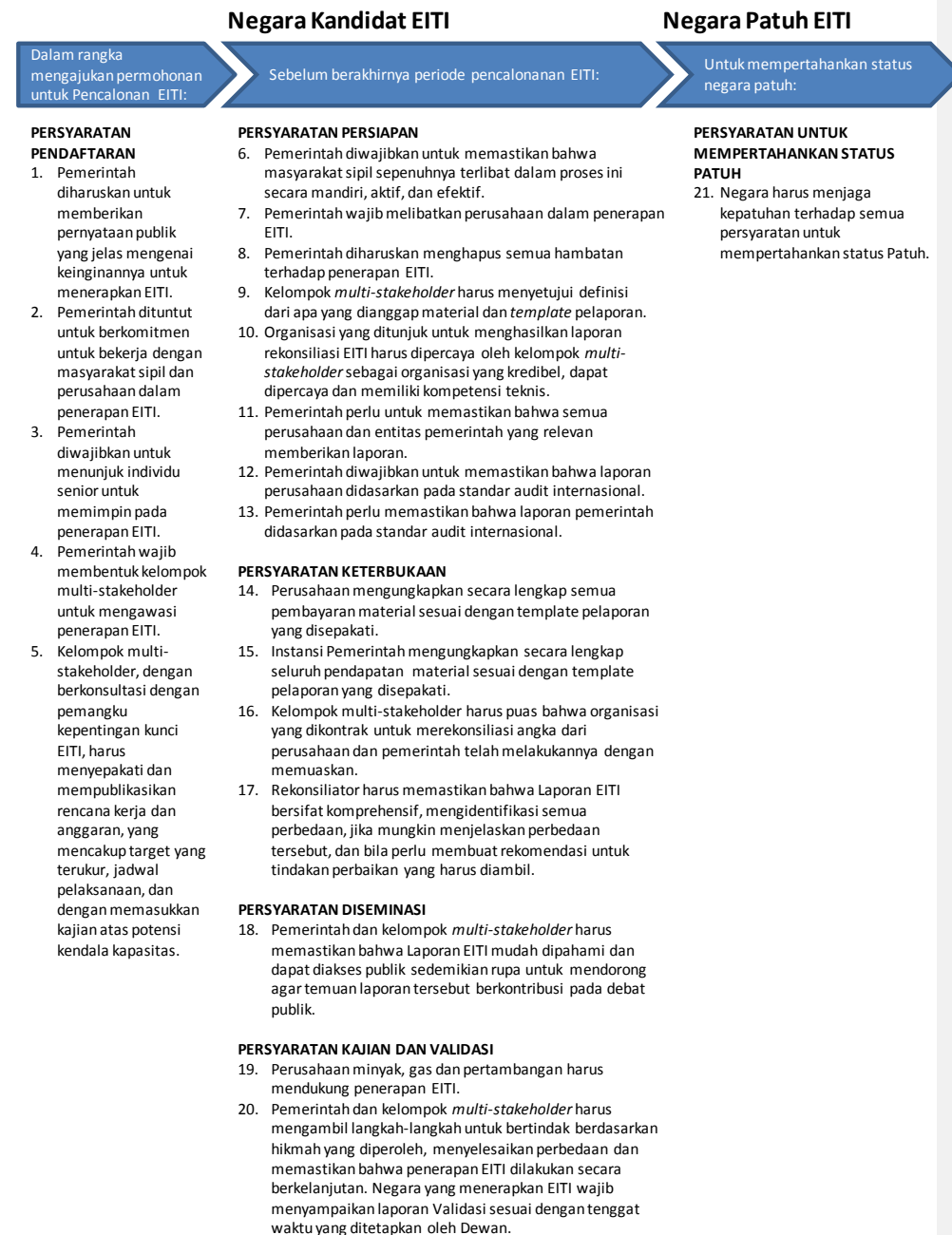
3. PERSYARATAN BAGI NEGARA YANG MENERAPKAN EITI

Tujuan penerapan EITI adalah agar negara-negara menjadi patuh EITI. Bab baru ini menunjukkan persyaratan bagi suatu negara untuk menerapkan EITI agar bisa mencapai status patuh EITI. Bab ini juga berisi panduan tentang cara terbaik untuk memastikan bahwa persyaratan ini dapat terpenuhi.¹ Panduan ini bersifat terbatas mengingat bahwa EITI adalah standar yang kuat, namun fleksibel, dan pemangku kepentingan suatu negara harus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks lokal. Persyaratan yang ditetapkan di sini adalah persyaratan minimum dan negara-negara didorong untuk melampaui persyaratan minimum ini sepanjang hal tersebut disetujui oleh para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan didorong untuk saling berkonsultasi mengenai bahan bimbingan tambahan seperti Pelaksanaan EITI (Implementing the EITI) dan Catatan Praktek EITI yang Baik (EITI Good Practice Notes).

Persyaratan bagi negara yang menerapkan EITI terangkum dalam Tabel 1. Negara yang memenuhi lima persyaratan pendaftaran diakui sebagai negara kandidat EITI. Negara kandidat EITI adalah kondisi sementara yang diharapkan dapat menuju ke status negara patuh, dalam waktu tertentu. Untuk mencapai level patuh, negara yang menerapkan EITI harus menyelesaikan proses validasi, evaluasi yang secara independen memverifikasi bahwa semua persyaratan telah terpenuhi (lihat bab 4).

Negara patuh harus menjaga kepatuhan terhadap semua persyaratan untuk mempertahankan statusnya. Jika terbukti secara valid bahwa penerapan EITI oleh negara patuh telah menurun dibawah standar kepatuhan, Dewan memiliki hak untuk meminta negara tersebut melalui proses validasi ulang atau dihapuskan dari EITI (lihat Persyaratan 21 dan Catatan Kebijakan # 3).

¹ Bab ini mengacu pada panduan yang diberikan dalam Buku Sumber EITI, diterbitkan pada tahun 2005.



3.1 PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pemerintah yang berniat untuk menerapkan EITI perlu melakukan sejumlah langkah sebelum mendaftar untuk menjadi negara Kandidat EITI (lihat Persyaratan 1-5, di bawah). Ketika negara telah menyelesaikan langkah “pendaftaran” dan berharap untuk diakui sebagai negara Kandidat EITI, individu senior yang ditunjuk untuk memimpin implementasi EITI secara resmi harus mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Ketua Dewan EITI (lihat Boks 1).

BOKS 1 – MENDAFTAR MENJADI KANDIDAT EITI

Ketika negara telah menyelesaikan langkah-langkah “pendaftaran” dan ingin diakui sebagai negara Kandidat EITI, pemerintah, dengan dukungan dari kelompok *multi-stakeholder* (MSG), secara resmi harus mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis kepada Ketua Dewan EITI. Aplikasi ini harus menjabarkan kegiatan yang dilakukan saat ini dan memberikan bukti yang menunjukkan bahwa kelima persyaratan pendaftaran telah dipenuhi. Aplikasi ini harus mencakup rincian kontak pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan sektor swasta yang terlibat dalam proses pendaftaran.

Komite Pengjangkauan dan Pencalonan Dewan EITI akan bekerja sama dengan Sekretariat Internasional EITI untuk meninjau aplikasi dan menilai apakah persyaratan pendaftaran telah dipenuhi. Sekretariat akan menghubungi para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk memastikan pandangan mereka tentang proses pendaftaran dan mencari komentar dari pemerintah pendukung, kelompok-kelompok masyarakat sipil internasional, perusahaan pendukung, dan organisasi pendukung dan investor. Sekretariat Internasional akan bekerja sama dengan individu senior yang ditunjuk untuk memimpin penerapan EITI untuk mengklarifikasi adanya isu luar biasa yang beredar. Komite Pengjangkauan dan Pencalonan akan membuat rekomendasi kepada Dewan terkait apakah aplikasi suatu negara dapat diterima. Dewan EITI akan mengambil keputusan akhir.

Dewan telah menyatakan bahwa mereka memilih untuk mengambil keputusan terkait pengakuan atas suatu negara Kandidat pada pertemuan reguler Dewan EITI. Jika waktu antara pertemuan terlalu lama, Dewan akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan melalui Surat Edaran Dewan.

Pada saat Dewan mengakui suatu Kandidat, Dewan menetapkan tenggat waktu untuk penerbitan Laporan EITI pertama dan pengiriman Laporan Validasi akhir, yang didukung oleh MSG, kepada Dewan EITI. Laporan EITI pertama suatu negara harus diterbitkan dalam waktu 18 bulan sejak tanggal dimana negara itu diakui sebagai Kandidat. Laporan Validasi akhir harus diserahkan dalam waktu dua setengah tahun sejak tanggal dimana negara itu diakui sebagai Kandidat.

PERSYARATAN EITI 1

Pemerintah diharuskan untuk memberikan pernyataan publik yang jelas mengenai keinginannya untuk menerapkan EITI.

- a. Pernyataan tersebut harus dibuat oleh kepala negara atau pemerintah atau wakil pemerintah yang didelegasikan.
- b. Pernyataan publik dapat dinyatakan pada acara peluncuran resmi, dipublikasikan melalui media nasional, ditempatkan pada sebuah situs internet khusus EITI.
- c. Selain dukungan dari EITI, pernyataan tersebut juga harus menunjukkan langkah-langkah dan tindakan yang akan diambil pemerintah untuk memenuhi Kriteria EITI, termasuk memastikan dukungan politik berkelanjutan tingkat tinggi.
- d. Salinan pernyataan harus dikirim ke Sekretariat EITI Internasional

PERSYARATAN EITI 2

Pemerintah dituntut untuk berkomitmen untuk bekerja dengan masyarakat sipil dan perusahaan dalam penerapan EITI.

- a. Penerapan EITI memerlukan komitmen berkelanjutan bagi dialog dan kolaborasi *multi-stakeholder*. Perusahaan dan organisasi masyarakat sipil harus secara substansial terlibat dalam desain, penerapan, pemantauan, dan evaluasi dari proses EITI, dan berkontribusi terhadap perdebatan publik.
- b. Pemerintah harus memastikan tidak ada hambatan bagi partisipasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam proses EITI.
- c. Pemerintah harus memastikan bahwa ada kerangka kerja yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan perusahaan, terkait dengan hukum, peraturan, dan aturan administrasi serta praktek nyata dalam penerapan EITI.
- d. Pemerintah harus menahan diri dari tindakan yang mengakibatkan pengurangan atau pembatasan debat publik terkait dengan penerapan EITI.
- e. Perwakilan masyarakat sipil dan perusahaan dapat bebas berbicara terkait isu-isu transparansi dan tata kelola sumber daya alam.
- f. Perwakilan masyarakat sipil dan perusahaan yang secara substantif terlibat dalam proses EITI, termasuk tetapi tidak terbatas pada anggota kelompok *multi-stakeholder*, memiliki hak untuk berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain.

PERSYARATAN EITI 3

Pemerintah diwajibkan untuk menunjuk individu senior untuk memimpin pada penerapan EITI.

- a. Disarankan bahwa penunjukan ini diumumkan ke publik.
- b. Individu yang memimpin penerapan EITI harus memiliki kepercayaan dari semua pihak dan akan ditempatkan di kementerian atau lembaga yang relevan.
- c. Individu yang dipilih harus memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengkoordinasikan tindakan terkait EITI di seluruh kementerian dan lembaga terkait dan dapat memobilisasi sumber daya untuk pengimplementasian dalam suatu negara.

PERSYARATAN EITI 4

Pemerintah wajib membentuk kelompok *multi-stakeholder* untuk mengawasi penerapan EITI.

- a. Merupakan suatu persyaratan bahwa pelaksanaan EITI diawasi oleh kelompok *multi-stakeholder* yang terdiri dari para pemangku kepentingan yang tepat, termasuk - tetapi tidak terbatas pada - sektor swasta, masyarakat sipil (termasuk kelompok masyarakat sipil independen dan masyarakat sipil lainnya, seperti media dan anggota parlemen) dan departemen pemerintah terkait (termasuk pimpinan-pimpinan pemerintahan).
- b. Penerapan EITI memerlukan proses pengambilan keputusan yang inklusif dalam seluruh proses implementasi, dengan setiap konstituen diperlakukan sebagai mitra.
- c. Setiap kelompok pemangku kepentingan harus memiliki hak untuk menunjuk wakil-wakil mereka sendiri, mengingat keinginan representasi yang pluralistik dan beragam.
- d. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI sebagai anggota kelompok *multi-stakeholder* harus secara operasional, dan, dalam aturan kebijakan, dan bersifat independen dari pemerintah dan / atau perusahaan.
- e. Anggota kelompok *multi-stakeholder* harus mampu beroperasi secara bebas tanpa kendali atau paksaan, termasuk dalam hubungan dengan kelompok konstituen mereka.
- f. Anggota kelompok *multi-stakeholder* harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- g. Kelompok *multi-stakeholder* disyaratkan untuk menyetujui kerangka acuan (TOR) publik yang jelas dan menyimpan catatan tertulis atas diskusi dan keputusan. TOR tersebut, minimal, harus mencakup ketentuan tentang pengesahan Rencana Kerja Negara dan revisi Rencana Kerja Negara atas masukan dari MSG, serta prosedur untuk memilih organisasi yang akan melakukan rekonsiliasi. Setelah kelompok terbentuk, para anggota harus menyetujui tata aturan dan prosedur internal. Yang mungkin mencakup prosedur voting.

- h. Dalam pembentukan kelompok multi-stakeholder pemerintah harus:
 - i. memastikan para pejabat senior pemerintah terwakili dalam kelompok *multi-stakeholder*;
 - ii. memastikan undangan untuk berpartisipasi dalam kelompok tersebut bersifat terbuka dan transparan;
 - iii. memastikan para pemangku kepentingan terwakili secara memadai (tidak berarti bahwa mereka harus terwakili secara berimbang), dan
 - iv. memastikan adanya proses untuk penggantian anggota kelompok tanpa adanya paksaan atau upaya untuk menyertakan anggota yang tidak akan menentang status quo.

Pemerintah juga mungkin ingin:

- v. melakukan penilaian atas pemangku kepentingan, dan
- vi. menetapkan dasar hukum untuk kelompok tersebut.

PERSYARATAN EITI 5

Kelompok *multi-stakeholder*, dengan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan kunci EITI, harus menyepakati dan mempublikasikan rencana kerja dan anggaran, yang mencakup target yang terukur, jadwal pelaksanaan, dan dengan memasukkan kajian atas potensi kendala kapasitas.

- a. Rencana kerja adalah dasar bagi penerapan EITI. Kriteria EITI keenam mensyaratkan bahwa rencana kerja yang dihasilkan disepakati oleh para pemangku kepentingan utama EITI, termasuk pemerintah, perusahaan ekstraktif dan masyarakat sipil. MSG harus menyetujui rencana kerja tersebut.
- b. Rencana kerja harus:
 - i. Dibuat tersedia secara luas, misalnya, diterbitkan di situs EITI nasional dan / atau situs departemen dan lembaga terkait lainnya, di media cetak atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat;
 - ii. Mencakup target yang dapat terukur serta terikat tenggat dan tujuan, dan menetapkan tindakan-tindakan tertentu yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut;
 - iii. Mencakup kajian atas potensi kendala kapasitas di instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil yang mungkin menjadi hambatan dalam penerapan EITI yang efektif dan menetapkan bagaimana potensi kendala tersebut bisa diselesaikan (misalnya melalui pelatihan), dan
 - iv. Menetapkan ruang lingkup pelaporan EITI dan mencakup daftar perusahaan minyak, gas dan pertambangan yang beroperasi. Kelompok *multi-stakeholder* mungkin ingin memperpanjang pelaporan EITI ke sektor lain.
- c. Selama fase ini, yang harus dipertimbangkan adalah identifikasi sumber-sumber pendanaan dalam negeri agar rencana kerja yang disepakati dapat diterapkan secara tepat waktu. Dana yang cukup juga harus dianggarkan untuk Validasi. Pemerintah juga harus merumuskan strategi untuk mengakses bantuan teknis dan keuangan dari donor dan mitra internasional. MSG

didorong untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin dan untuk membantu dalam persyaratan administrasi serta memimpin dalam mobilisasi dana dari sumber eksternal.

- d. Selain lima persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi, pemerintah juga harus meninjau kerangka hukum untuk mengidentifikasi setiap potensi rintangan terhadap penerapan EITI. EITI harus sesuai dengan kerangka hukum dan mekanisme kontrol fiskal. EITI umumnya tidak menciptakan tuntutan yang luar biasa pada pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus mungkin perlu untuk memasukkan persyaratan EITI dalam undang-undang atau peraturan nasional.
- e. Negara-negara yang menerapkan EITI diharuskan untuk menerbitkan Laporan EITI pertama dalam waktu 18 bulan. Setelah itu, negara-negara yang menerapkan EITI harus menerbitkan Laporan EITI tahunan. Laporan EITI harus mencakup data yang tidak melebihi dua periode akuntansi terakhir (misalnya, sebuah Laporan EITI diterbitkan dalam kalender / tahun buku 2010 paling lambat harus didasarkan pada data kalender / tahun keuangan 2008). Jika MSG melakukan hal yang berbeda dari norma ini, hal ini harus jelas ditunjukkan dalam rencana kerja EITI beserta alasannya yang dikomunikasikan kepada Dewan EITI. Negara-negara yang belum menerbitkan laporan selama lebih dari dua tahun dapat dikenakan mekanisme penghentian sementara yang ditetapkan dalam Catatan Kebijakan # 5. Dalam hal pelaporan EITI terlambat secara signifikan, kelompok multi-stakeholder harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Laporan EITI diterbitkan untuk periode-periode pelaporan tersebut sehingga setiap tahun dalam rangkaian tersebut harus dilaporkan.
- f. MSG didorong untuk memperbarui rencana kerja secara tahunan. Negara-negara yang menerapkan EITI harus memberi tahu Dewan apabila terdapat perubahan material apapun dalam lingkup penerapan EITI. Jika secara jelas bahwa Prinsip dan Kriteria EITI tidak ditaati dan dihormati oleh negara yang menerapkan EITI, Dewan EITI dapat menangguhkan sementara atau menghapus negara itu dari EITI.

3.2 PERSYARATAN PERSIAPAN

Begitu sebuah negara telah dinyatakan negara Kandidat EITI, negara tersebut memiliki waktu 18 bulan untuk menerbitkan Laporan EITI dan dua setengah tahun untuk menyampaikan Laporan Validasi akhir yang disahkan oleh MSG kepada Dewan EITI. Mendapatkan persetujuan MSG atas *template* pelaporan dapat memakan waktu dan persiapan harus dimulai lebih awal.

PERSYARATAN EITI 6

Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa masyarakat sipil sepenuhnya terlibat dalam proses ini secara mandiri, aktif, dan efektif.

- a. Kriteria EITI mensyaratkan bahwa masyarakat sipil secara aktif terlibat sebagai peserta dalam desain, pemantauan, dan evaluasi proses serta memberikan kontribusi untuk perdebatan publik. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan EITI perlu melibatkan masyarakat sipil secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui kelompok *multi-stakeholder*, atau kelompok tambahan selain kelompok *multi-stakeholder*.
- b. Kelompok *multi-stakeholder* harus melakukan kegiatan penjangkauan yang efektif, termasuk melalui komunikasi dengan warga, kelompok masyarakat sipil dan / atau koalisi (melalui media, website, surat, dll), menginformasikan kepada mereka tentang komitmen pemerintah untuk menerapkan EITI dan peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil, serta menyebarkan informasi publik yang merupakan hasil dari proses EITI (misalnya, Laporan EITI nasional).
- c. Pemerintah harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu yang mencukupi sebelum rapat, memastikan sirkulasi dokumen dilakukan secara tepat waktu sebelum debat dan pengadopsian aturan yang diusulkan, atau mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat sipil dan perwakilan perusahaan dapat mempersiapkan partisipasi penuh dan aktif dalam diskusi dan keputusan dengan rentang waktu yang singkat.
- d. Perhatian yang memadai harus diberikan untuk mengatasi kendala potensi keterbatasan kapasitas yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan EITI, apakah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil atau perusahaan, termasuk melalui akses ke pembangunan kapasitas atau sumber daya.
- e. Pemerintah harus mengambil tindakan efektif untuk menghilangkan hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sipil.
- f. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI sebagai anggota kelompok *multi-stakeholder* harus secara operasional, dan, dalam aturan kebijakan, bersifat independen dari pemerintah dan / atau perusahaan.
- g. Kelompok masyarakat sipil, perusahaan dan perwakilan mereka harus bebas untuk mengekspresikan pendapat tentang EITI tanpa ada yang menahan, memaksa atau mengancam.
- h. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI harus bebas untuk terlibat dalam debat publik yang lebih luas terkait EITI dan dapat menangkap

kontribusi serta masukan dari elemen-elemen masyarakat sipil yang bukan merupakan bagian dari kelompok *multi-stakeholder*.

- i. Hak dasar dari masyarakat sipil dan perwakilan perusahaan yang terlibat secara substansial dalam EITI - termasuk, namun tidak terbatas pada, anggota kelompok *multi-stakeholder* – harus dihormati.

PERSYARATAN EITI 7

Pemerintah wajib melibatkan perusahaan dalam penerapan EITI

- a. Persyaratan ini memperkuat Persyaratan 5. EITI mensyaratkan perusahaan (minyak, gas dan pertambangan) untuk secara aktif terlibat dalam penerapan EITI dan memberikan laporan sesuai ketentuan EITI. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu terlibat secara luas dengan perusahaan minyak, gas dan pertambangan. Hal ini dapat dilakukan melalui kelompok *multi-stakeholder* atau kelompok selain kelompok *multi-stakeholder*.
- b. Adalah suatu persyaratan bahwa pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* EITI diharuskan untuk berusaha melibatkan perusahaan (minyak, gas dan pertambangan) dalam penerapan EITI. Hal ini mencakup:
 - Penjangkauan oleh kelompok *multi-stakeholder* kepada perusahaan minyak, gas dan pertambangan, termasuk berkomunikasi (melalui media, website, surat-surat) untuk menginformasikan kepada mereka tentang komitmen pemerintah untuk menerapkan EITI, dan peran sentral dari perusahaan.
 - Tindakan untuk mengatasi kendala keterbatasan kapasitas yang mempengaruhi perusahaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sipil atau perusahaan.

PERSYARATAN EITI 8

Pemerintah diharuskan menghapus semua hambatan terhadap penerapan EITI.

- a. Jika terdapat hambatan dari sisi hukum, peraturan atau hal lainnya terhadap penerapan EITI, pemerintah perlu menghapuskan hambatan tersebut. Kendala umum yang ada meliputi klausul kerahasiaan dalam kontrak antara pemerintah dan perusahaan dan peraturan yang bertentangan antar departemen pemerintah.
- b. Tidak ada satu cara untuk menangani permasalahan ini – negara-negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dan berbagai perjanjian lainnya yang dapat mempengaruhi penerapan EITI, sehingga harus direspon dengan cara yang berbeda-beda. Dalam rangka untuk menghapus hambatan tersebut pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* dapat:
 - melakukan penelaahan terhadap kerangka hukum;
 - melakukan penelaahan terhadap kerangka peraturan
 - melakukan kajian terhadap hambatan dalam kerangka hukum dan peraturan yang dapat mempengaruhi penerapan EITI;
 - mengusulkan atau menetapkan perubahan hukum atau peraturan yang dirancang untuk memungkinkan transparansi;

- menetapkan untuk mengabaikan klausul kerahasiaan dalam kontrak antara pemerintah dan perusahaan sehingga memungkinkan untuk mengungkap pendapatan;
- berkomunikasi langsung dengan perusahaan dan instansi pemerintah terkait agar bersedia mempublikasi data;
- mencapai kesepakatan mengenai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) untuk menetapkan standar transparansi dan ekspektasi antara pemerintah dan perusahaan.

PERSYARATAN EITI 9

Kelompok *multi-stakeholder* harus menyetujui definisi dari apa yang dianggap material dan *template* pelaporan.

- Template* Pelaporan merupakan hal yang penting dalam proses keterbukaan informasi dan rekonsiliasi, dan dalam penyusunan Laporan EITI akhir.
***Template* mendefinisikan aliran pendapatan mana yang perlu diungkap oleh perusahaan dan pemerintah.** Adalah penting bahwa kelompok *multi-stakeholder* memiliki kapasitas untuk terlibat dalam diskusi mengenai aliran manfaat yang akan dimasukkan ke dalam *template*. **Adalah suatu persyaratan bahwa *template* final disahkan oleh kelompok *multi-stakeholder*.** Konstituen yang lebih luas juga harus memiliki kesempatan untuk memberikan komentar.
- Kriteria EITI mensyaratkan bahwa "semua pembayaran yang material dari minyak, gas dan pertambangan kepada pemerintah" dan "pendapatan material yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan" yang diterbitkan. Oleh karena itu *template* EITI perlu mendefinisikan, melalui kesepakatan kelompok *multi-stakeholder*, apa yang mencakup pembayaran dan pendapatan material dan apa yang menjadi standar ambang batas materialitas wajar. Jika MSG telah menentukan ambang batas pada tingkat tertentu atas materialitas, MSG harus mendokumentasikan pilihan yang telah dipertimbangkan dan alasan penentuan ambang batas pada tingkat tertentu. Kelompok *multi-stakeholder* juga perlu menentukan jangka waktu yang dicakup dalam laporan. Suatu aliran pendapatan dianggap material jika kelalaian atau kesalahan dalam penyajiannya dapat mempengaruhi Laporan akhir EITI secara material.
- Untuk memenuhi persyaratan ini, kelompok *multi-stakeholder* harus menyetujui:
 - Arus pendapatan yang harus diungkap perusahaan dan pemerintah;
 - Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pelaporan;
 - Entitas pemerintah yang akan melakukan pelaporan;
 - Periode waktu yang dicakup oleh laporan, dan
 - Tingkat agregasi atau disagregasi data dalam Laporan EITI.
- Secara umum aliran pendapatan berikut ini harus disertakan:
 - hak produksi pemerintah tuan rumah, misalnya, bagi hasil keuntungan minyak;
 - hak produksi perusahaan milik negara;
 - keuntungan pajak;

- iv. royalti;
- v. dividen;
- vi. bonus (seperti bonus penandatanganan, penemuan, produksi); dan
- vii. biaya lisensi, biaya sewa, biaya masuk dan biaya lain terkait lisensi dan/atau konsesi, dan manfaat penting lainnya yang diterima pemerintah sebagaimana disepakati oleh kelompok *multi-stakeholder*.

Arus pendapatan i-vii di atas hanya dapat dikecualikan jika tidak memiliki relevansi atau jika MSG menyetujui bahwa penghapusan tersebut tidak akan berdampak secara material terhadap Laporan akhir EITI. Dalam mengeksplorasi materialitas aliran pendapatan, MSG didorong untuk mempertimbangkan signifikansi terhadap pendapatan total yang dikumpulkan di sektor ini. MSG mungkin ingin memeriksa besaran aliran pendapatan terhadap total pendapatan seperti yang ditunjukkan dalam tabel aliran dana pemerintah (*the government flow of funds table*/TOFE). MSG juga sebaiknya mempertimbangkan bagian pendapatan atas lembaga atau wilayah yang menerima pendapatan tersebut. Apa yang dianggap sebagai arus pendapatan yang relatif kecil dalam konteks nasional mungkin memiliki tingkat materialitas tinggi pada level ini, dan karena itu menjadi relevan bagi tujuan transparansi.

- e. Dalam menyetujui definisi "pembayaran dan pendapatan yang material", kelompok *multi-stakeholder* disyaratkan untuk menetapkan apakah pembayaran kepada entitas pemerintah daerah dan lokal merupakan hal yang material. Jika dianggap material, kelompok *multi-stakeholder* harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa rekonsiliasi atas pembayaran perusahaan kepada lembaga pemerintah sub-nasional dan bukti penerimaan pembayaran ini dimasukkan ke dalam proses pelaporan EITI. Kelompok *multi-stakeholder* sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas ruang lingkup pelaporan EITI dan proses rekonsiliasi yang mencakup transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, terutama jika transfer tersebut diamanatkan oleh konstitusi nasional atau undang-undang.
- f. Jika perjanjian berdasarkan pembayaran natura (in-kind), penyediaan infrastruktur atau jenis barter lainnya memainkan peran penting dalam sektor minyak, gas dan pertambangan, kelompok *multi-stakeholder* perlu menyetujui mekanisme untuk menggabungkan aliran pendapatan berdasarkan perjanjian tersebut ke proses pelaporan EITI. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kelompok *multi-stakeholder* perlu mendapatkan pemahaman penuh dari syarat-syarat kontrak, pihak yang terlibat, sumber daya yang telah dijanjikan oleh negara, nilai dari perimbangan aliran pendapatan (misalnya pekerjaan infrastruktur), dan materialitas dari perjanjian tersebut terhadap kontrak konvensional. Jika kelompok *multi-stakeholder* menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut adalah material, kelompok *multi-stakeholder* perlu untuk mengembangkan proses pelaporan untuk mencapai tingkat transparansi yang sepadan dengan pembayaran dan aliran pendapatan lain. Jika rekonsiliasi dari transaksi utama tidak memungkinkan, kelompok *multi-stakeholder* harus menyetujui suatu

- pendekatan sehingga keterbukaan perusahaan dan / atau pemerintah yang bersifat sepihak (unilateral) dapat dilampirkan dalam Laporan EITI.
- g. Kelompok *multi-stakeholder* didorong untuk menerapkan standar transparansi yang tinggi terhadap pembayaran dan transfer sosial, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang jenis pembayaran dan transfer, pihak yang terlibat dalam transaksi, dan materialitas dari pembayaran dan transfer terhadap arus pendapatan lainnya. Jika kelompok *multi-stakeholder* menyepakati bahwa pembayaran dan transfer sosial adalah material, kelompok *multi-stakeholder* didorong untuk mengembangkan atau memodifikasi *template* pelaporan untuk mencapai transparansi yang sepadan dengan pembayaran dan pendapatan lain. Jika rekonsiliasi transaksi utama tidak memungkinkan (misalnya, di mana pembayaran perusahaan adalah "dalam bentuk lain" atau kepada pihak ketiga), kelompok *multi-stakeholder* sebaiknya mempertimbangkan keterbukaan sepihak dari perusahaan dan / atau pemerintah untuk dilampirkan dalam Laporan EITI .
 - h. Kelompok *multi-stakeholder* didorong untuk mengeksplorasi peluang untuk memasukkan informasi tambahan ke dalam Laporan EITI yang akan meningkatkan kelengkapan pelaporan EITI dan pemahaman publik atas pendapatan dan mendorong standar tinggi atas transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan publik, aktivitas pemerintah dan dalam bisnis.

PERSYARATAN EITI 10

Organisasi yang ditunjuk untuk menghasilkan laporan rekonsiliasi EITI harus dipercaya sebagai organisasi yang kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis oleh kelompok *multi-stakeholder*.

- a. Rekonsiliator harus ditunjuk untuk dapat menerima data yang dikeluarkan oleh perusahaan dan pemerintah, untuk merekonsiliasi angka-angka tersebut, dan membuat laporan akhir EITI. Penting bahwa hal tersebut dilakukan oleh rekonsiliator yang dianggap kredibel, imparial, terpercaya, dan memiliki kemampuan secara teknis oleh para stakeholder. Dipersyaratkan agar kelompok *multi-stakeholder* menyetujui organisasi yang ditunjuk untuk merekonsiliasi. Disarankan agar Kerangka Acuan untuk rekonsiliator disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder*, dan kelompok tersebut bisa meninjau proses seleksi untuk rekonsiliator.

PERSYARATAN EITI 11

Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa semua perusahaan dan entitas pemerintah yang relevan memberikan laporan.

- a. Kriteria EITI mengharuskan semua perusahaan – baik publik (BUMN) dan swasta – melaporkan pembayaran kepada pemerintah, berdasarkan *template* yang sudah disetujui, kepada organisasi yang ditunjuk untuk merekonsiliasi angka-angka yang telah diungkapkan.
- b. Pelaporan EITI harus diterapkan kepada semua perusahaan industri ekstraktif (termasuk perusahaan internasional, nasional, dan BUMN) yang beroperasi di negara tersebut. Sebuah entitas harus dikecualikan dari keharusan melapor

jika bisa menunjukkan dengan sangat jelas bahwa jumlah yang dilaporkan adalah tidak material. Jika sejumlah operator melakukan pembayaran secara individual yang tidak material, namun menjadi material ketika digabungkan, MSG bisa meminta pemerintah untuk mengeluarkan data arus keuntungan gabungan dari beberapa operator kecil. Jika pendapatan dari beberapa operator kecil menyumbang kontribusi signifikan dari keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemerintah atau lembaga pemerintah individual lainnya, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan ambang materialitas telah diatur pada tingkat yang pantas.

- c. Pemerintah diharuskan untuk melakukan hal-hal berikut:
 - i. memperkenalkan/mengubah undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan sesuai kriteria EITI dan *template* laporan yang sudah disetujui.
 - ii. memperkenalkan/mengubah **peraturan** yang relevan yang mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan sesuai kriteria EITI dan *template* laporan yang sudah disetujui.
 - iii. menegosiasikan kesepakatan (seperti Nota Kesepahaman dan pengabaian klausul kerahasiaan dalam perjanjian bagi hasil) dengan semua perusahaan-perusahaan untuk memastikan pelaporan sesuai kriteria EITI dan *template* laporan yang sudah disetujui; dan
 - iv. jika perusahaan-perusahaan tidak berpartisipasi dalam pelaporan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diketahui (oleh pemangku kepentingan lainnya) untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini melapor pada batas tenggat waktu (yang disetujui pemangku kepentingan)
- d. Dipersyaratkan agar pemerintah memastikan semua lembaga Pemerintah yang menerima pembayaran yang material untuk berpartisipasi dalam proses pelaporan. Suatu entitas dapat dikecualikan dari pelaporan jika bisa menunjukkan dengan tingkat kepastian yang tinggi bahwa jumlah yang dilaporkan bersifat tidak material. Jika hal tersebut merupakan bagian signifikan dari pendapatan yang diterima, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan bahwa ambang materialitas telah diatur di tingkat yang pantas.
- e. MSG dianjurkan, jika memungkinkan secara legal dan teknis, untuk mempertimbangkan laporan online otomatis secara berkelanjutan untuk pendapatan dan pembayaran dari industri ekstraktif oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan (sebagai contoh, dalam kasus dimana data pendapatan ekstraktif sudah dipublikasikan secara reguler oleh pemerintah atau dimana sistem perpajakan nasional cenderung menuju pembayaran and pemeriksaan online). Pelaporan berkelanjutan oleh pemerintah seperti itu dapat dilihat sebagai laporan interim, dan sebagai bagian integral dari proses EITI nasional yang direkam dalam Laporan EITI rekonsiliasi yang diterbitkan setiap tahun.

Comment [p1]: regulations

PERSYARATAN EITI 12

Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa laporan perusahaan didasarkan pada standar audit internasional.

- a. Pemerintah diharuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan data yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan diaudit dengan standar internasional. Hal ini bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - i. pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan data-data untuk diaudit dengan standar internasional;
 - ii. pemerintah mengubah standar audit yang sudah ada untuk memastikan agar sesuai standar internasional, dan mengharuskan perusahaan untuk melakukan hal yang sama;
 - iii. pemerintah menyetujui sebuah MoU dengan semua perusahaan-perusahaan dimana perusahaan-perusahaan tersebut memastikan bahwa data yang dikirimkan diaudit dengan standar internasional.
 - iv. perusahaan dengan sukarela berkomitmen untuk memberikan data yang diaudit dengan standar internasional.
 - v. jika data yang dikumpulkan untuk rekonsiliasi tidak berdasarkan audit berstandar internasional, pemerintah bersama perusahaan (termasuk BUMN) sepakat untuk mencapai standar internasional di dalam jangka waktu yang ditetapkan.
 - vi. jika data yang dikumpulkan untuk rekonsiliasi tidak diaudit berdasarkan standar, kelompok *multi-stakeholder* harus menyepakati cara untuk menyelesaikan hal tersebut, sebagai contoh, dengan membuat rencana aksi yang terikat waktu untuk memastikan bahwa laporan perusahaan berdasarkan standar internasional.
- b. Dianjurkan agar proses pelaporan sebanyak mungkin didasarkan kepada prosedur dan institusi yang sudah ada, dan dengan standar internasional. Proses tersebut dapat mencakup perusahaan meminta pendapat dari auditor eksternal mereka bahwa informasi yang hendak dilaporkan untuk EITI sudah konsisten dengan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit. Hal ini dapat menjadi permintaan “prosedur khusus” yang melekat pada Kerangka Acuan dari audit eksternal. Para auditor ini akan menghubungkan laporan perusahaan berbasis kas yang dikirimkan dengan laporan keuangan mereka yang berbasis akrual. Proses ini dilakukan sesuai dengan standar audit internasional.

PERSYARATAN EITI 13

Pemerintah perlu memastikan bahwa laporan pemerintah didasarkan pada standar audit internasional.

- a. Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa data yang disampaikan diaudit dengan standar internasional. Hal ini meliputi:
 - i. pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan data keuangan diaudit dengan standar internasional;
 - ii. pemerintah mengubah standar audit yang sudah ada untuk disesuaikan dengan standar internasional, dan memastikan kepatuhan atas standar tersebut;
 - iii. Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan, dan menegaskan di tingkat senior dengan mengirimkan surat konfirmasi yang berisi semua pernyataan yang diperlukan, bahwa laporan pemerintah memberikan representasi yang jujur atas pendapatan industri ekstraktif yang diterima, dan
 - iv. jika data yang diberikan untuk direkonsiliasi tidak diaudit dengan standar internasional, kelompok *multi-stakeholder* wajib menyetujui cara untuk mengatasi hal tersebut, contohnya, dengan membangun rencana aksi yang terikat jangka waktu untuk memastikan laporan pemerintah berdasarkan standar audit internasional.
- b. Dianjurkan agar proses pelaporan sebanyak mungkin didasarkan kepada prosedur dan institusi yang sudah ada, dan dengan standar internasional. Sebuah proses praktis yang memungkinkan termasuk meminta auditor pemerintah memberikan pendapat atas akurasi dari laporan tersebut.

3.3 PERSYARATAN KETERBUKAAN

PERSYARATAN EITI 14

Perusahaan mengungkapkan secara lengkap semua pembayaran yang material sesuai dengan *template* pelaporan yang disepakati.

Merupakan persyaratan bahwa:

- a. Perusahaan membuat pernyataan yang lengkap atas pembayaran yang dilakukan sesuai *template* pelaporan yang disepakati.

PERSYARATAN EITI 15

Instansi Pemerintah mengungkapkan secara lengkap seluruh pendapatan yang material sesuai dengan *template* pelaporan yang disepakati.

Merupakan persyaratan bahwa :

Lembaga pemerintah terkait membuat pernyataan yang lengkap atas pendapatan yang diterima berdasarkan *template* pelaporan yang sudah disepakati.

PERSYARATAN EITI 16

Kelompok *multi-stakeholder* harus merasa puas terhadap organisasi yang dikontrak untuk merekonsiliasi angka dari perusahaan dan pemerintah telah melakukan perannya dengan memuaskan.

Kelompok *multi-stakeholder* harus merasa puas terhadap organisasi yang terpilih dan telah bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan.

PERSYARATAN EITI 17

Rekonsiliator harus memastikan bahwa Laporan EITI bersifat komprehensif, mengidentifikasi semua perbedaan, jika mungkin menjelaskan perbedaan tersebut, dan bila perlu membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang harus diambil.

3.4 PERSYARATAN DISEMINASI

PERSYARATAN EITI 18

Pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* harus memastikan bahwa Laporan EITI mudah dipahami dan dapat diakses publik sedemikian rupa untuk mendorong agar temuan laporan tersebut berkontribusi pada debat publik.

- a. EITI telah sepenuhnya dilaksanakan dengan semua persyaratannya ketika Laporan EITI dipublikasikan, dan disebarkan secara luas dan secara terbuka dibahas oleh berbagai macam stakeholder. Kriteria EITI mengharuskan laporan tersebut tersedia secara publik dalam suatu cara dimana bisa diakses secara publik, lengkap, dan mudah dipahami.
- b. Merupakan persyaratan bahwa laporan EITI:
 - i. secara jelas mengatur definisi yang disetujui untuk kelompok *multi-stakeholder* tentang "pembayaran dan pendapatan yang material", dan merinci dan menjelaskan arus pendapatan dan manfaat yang tertera dalam laporan tersebut;
 - ii. merinci semua perusahaan tercatat atau terlisensi yang terlibat dalam eksplorasi dan produksi sektor ekstraktif, dan membedakan perusahaan mana yang berpartisipasi di dalam proses pelaporan EITI dan yang tidak (dengan sebuah indikasi ukuran relatif apakah berdasarkan produksi atau pendapatan/pembayaran dan alasan untuk tidak berpartisipasi dalam EITI);
 - iii. dengan jelas menyebutkan jika ada perusahaan atau entitas pemerintah yang gagal untuk berpartisipasi di dalam proses pembuatan laporan, dan menilai apakah hal tersebut mempunyai dampak yang material;
 - iv. menjabarkan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* untuk memastikan bahwa keterbukaan perusahaan dan pemerintah kepada rekonsiliator telah diaudit dengan standar internasional;
 - v. menjabarkan metodologi yang digunakan oleh rekonsiliator untuk menemukan perbedaan, dan langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh rekonsiliator, kelompok *multi-stakeholder* atau pemerintah untuk menjelaskan dan jika diperlukan mengatasi segala perbedaan yang ditemukan.
- c. Negara pelaksana didorong untuk:
 - i. Menyimpulkan dan membandingkan pembagian dari tiap aliran pendapatan atas keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari tiap tingkatan pemerintah;
 - ii. Memasukkan daftar dari semua perusahaan-perusahaan yang aktif di tiap sektor ekstraktif sebagai lampiran dalam Laporan EITI (termasuk sumber dari daftar tersebut) dan menyediakan detail tambahan mengenai aktifitas mereka ketika dalam periode pembuatan laporan (contohnya eksplorasi, kajian, pengembangan, konstruksi, produksi, dekomisioning, dan lain-lain).
- d. Untuk mencapai status Patuh EITI, pemerintah dan MSG diharuskan untuk memastikan bahwa Laporan EITI dibuat tersedia secara publik dalam suatu cara yang konsisten dengan Kriteria EITI, termasuk dengan:

- i. membuat salinan fisik dari Laporan tersebut, yang didistribusikan kepada berbagai macam *stakeholder* utama termasuk kelompok sipil, perusahaan, media dan lain-lain;
 - ii. membuat laporan tersebut tersedia secara online, dan mempublikasikan lokasi situs tersebut kepada pemangku kepentingan utama.
 - iii. memastikan bahwa Laporan tersebut komprehensif dan termasuk semua informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses validasi dan semua rekomendasi untuk kemajuan;
 - iv. memastikan bahwa Laporan tersebut mudah dipahami, termasuk dengan memastikan bahwa laporan tersebut ditulis dengan jelas, mudah diakses dan dengan bahasa yang sepiantasnya; dan
 - v. memastikan bahwa langkah penjangkauan – baik yang diorganisir oleh pemerintah, komunitas sipil atau perusahaan – digunakan untuk menyebarkan kesadaran atas keberadaan Laporan EITI.
- e. Untuk mencapai status patuh EITI, pemerintah dan MSG diharuskan untuk memastikan bahwa Laporan EITI dan temuannya berkontribusi terhadap debat publik.

3.5 PERSYARATAN KAJIAN DAN VALIDASI

PERSYARATAN EITI 19

Perusahaan minyak, gas dan pertambangan harus mendukung penerapan EITI.

- a. Semua perusahaan yang beroperasi di sektor yang relevan harus:
 - i. menunjukkan dukungan publik untuk standar EITI melalui sebuah pernyataan publik oleh seorang pejabat perusahaan atau perwakilan perusahaan yang tepat;
 - ii. ambil bagian dalam, atau mendukung, proses *multi-stakeholder*;
 - iii. membuka data yang sudah disetujui, yang diaudit dengan standar internasional; dan
 - iv. bekerja sama dengan validator yang akan mengkaji formulir-formulir perusahaan.
- b. Ketika validasi dimulai, validator akan menghubungi semua perusahaan untuk menyelesaikan dan menyerahkan formulir perusahaan. Sebagai tambahan, validator akan meminta komentar perusahaan atas pelajaran yang sudah dipetik dan praktek terbaik. Perusahaan-perusahaan bisa melakukan ini dengan mengisi kolom yang diberikan di formulir penilaian mandiri atau menyediakan bukti verbal kepada validator jika isu yang terkait merupakan hal yang sensitif.

PERSYARATAN EITI 20

Pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder* harus mengambil langkah-langkah untuk bertindak berdasarkan pelajaran yang dipetik, menyelesaikan perbedaan dan memastikan bahwa penerapan EITI dilakukan secara berkelanjutan. Negara yang menerapkan EITI wajib menyampaikan laporan Validasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Dewan.

- a. Pembuatan dan penyebaran sebuah Laporan EITI bukanlah akhir dari pelaksanaan EITI. Nilai yang diperoleh berasal dari proses yang dilalui dan produk yang dihasilkan. Laporan EITI mengarahkan kepada tercapainya Prinsip-prinsip EITI dengan berkontribusi kepada debat publik yang lebih luas. Merupakan hal yang penting bahwa pelajaran yang diterima selama implementasi kemudian diterapkan, jika ada ketidakcocokan yang ditemukan di dalam Laporan EITI harus dijelaskan dan, jika perlu ditangani, dan bahwa penerapan EITI harus diatas fondasi yang stabil dan berkelanjutan.
- b. Semua pemangku kepentingan harus dapat untuk berpartisipasi dalam mengulas proses EITI. Kelompok masyarakat sipil dan industri yang terlibat dalam EITI, secara khusus, bukan hanya mereka yang terlibat dalam kelompok *multi-stakeholder*, harus bisa memberikan tanggapan dalam proses EITI dan memastikan pandangan mereka tercermin dalam pembahasan tersebut.
- c. Negara yang menerapkan EITI diharuskan untuk memberikan Laporan Validasi berdasarkan pada tenggat waktu yang diberikan oleh Dewan. Bab 4 dan Catatan Kebijakan EITI #1 dan #3 memberikan masukan mendetil yang lebih lengkap kepada negara yang menerapkan EITI dalam proses Validasi dan hasilnya, termasuk langkah-langkah utama didalam proses, peran dan

tanggung jawab dari negara yang menerapkan EITI, validator, Dewan EITI dan Sekretariat Internasional EITI.

3.6 PERSYARATAN UNTUK MEMPERTAHANKAN STATUS PATUH

PERSYARATAN EITI 21

Negara harus menjaga kepatuhan terhadap semua persyaratan untuk mempertahankan status Patuh.

- a. Negara dengan status patuh harus menjaga kepatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan Persyaratan EITI nomor 1-20 untuk dapat mempertahankan status Patuh EITI, termasuk menjaga pelaporan agar reguler dan tepat waktu (Persyaratan 5 (e)).
- b. Untuk mempertahankan status Patuh, suatu negara membutuhkan validasi ulang dalam waktu lima tahun. Jika terbukti secara valid bahwa penerapan EITI negara patuh mengalami penurunan secara substansial dibawah standard kepatuhan, Dewan EITI memiliki hak untuk meminta negara tersebut untuk menjalani Validasi ulang atau dihapuskan dari EITI. Pemangku kepentingan bisa meminta Validasi ulang sebelum tenggat waktu lima tahun jika mereka berpandangan prosesnya membutuhkan peninjauan ulang. Permintaan ini bisa dimediasi (jika perlu) melalui seorang perwakilan konstituen di dalam Dewan. Dewan akan meninjau situasi dan menggunakan kewenangannya apakah mengharuskan negara Patuh EITI untuk menjalani validasi baru, menempatkan prioritas yang diperlukan untuk mempertahankan integritas nama EITI.
- c. Negara patuh disyaratkan untuk menerbitkan laporan publik setiap tahun yang berisi aktivitas tahun sebelumnya, perkembangan secara rinci atas penerapan EITI dan segala rekomendasi yang diberikan Validator. Laporan tersebut harus didukung oleh kelompok *multi-stakeholder*, dan harus menjelaskan usaha-usaha untuk memperkuat penerapan EITI, termasuk segala tindakan untuk memperluas detail dan lingkup dari pelaporan EITI atau menambah keterlibatan para pemangku kepentingan. Jika sebuah negara patuh gagal mematuhi persyaratan ini, Dewan dapat meminta Validasi baru.
- d. Kelompok *multi-stakeholder* di negara patuh didorong untuk mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam mengembangkan penerapan EITI untuk menambah kelengkapan pelaporan EITI dan pengertian publik terhadap pendapatan dan mendorong standar yang tinggi untuk transparansi dan akuntabilitas di kehidupan publik, aktivitas pemerintah, dan dalam bisnis

3.7 PROSEDUR TRANSISI UNTUK PERATURAN EITI EDISI 2011

Pembukaan

Pada 16 Januari 2011, Dewan EITI menyetujui sebuah edisi baru dari Peraturan EITI² (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan EITI edisi 2011"). Peraturan tersebut menggantikan versi sebelumnya yang berjudul Peraturan EITI termasuk Panduan Validasi yang diterbitkan pada 24 Januari 2010, (selanjutnya disebut "Peraturan EITI edisi sebelumnya"). Pada 9 Juni 2011 Dewan EITI setuju untuk menyetujui prosedur-prosedur berikut ini terkait bagaimana Peraturan-peraturan EITI edisi tahun 2011 akan mulai berlaku.

Pengaturan Transisi

Semua negara yang diakui sebagai Negara Kandidat sejak 1 Juli 2011 dan seterusnya akan menjadi subjek Peraturan EITI edisi 2011.

Dewan menyetujui bahwa 35 negara yang saat ini menerapkan EITI dikelompokkan berdasarkan pada perkembangan mereka dalam pelaporan EITI dan Validasi, dengan pengaturan transisi sesuai dengan tiap kelompok dibawah ini:

Kelompok 1: Negara Patuh (Azerbaijan, Liberia, Timor Leste, Ghana, Mongolia, Kyrgyzstan, Niger, Nigeria, Republik Afrika Tengah, Norwegia, Yaman)

- Tidak ada perubahan dalam tenggat waktu Validasi.
- Negara patuh didorong untuk membuat transisi ke Peraturan EITI edisi 2011 secepat mungkin. Negara patuh harus menyelesaikan Laporan EITI dibawah Peraturan EITI edisi sebelumnya. Laporan berikutnya harus dilakukan berdasarkan Peraturan EITI edisi 2011.
- Dalam hal Dewan meminta sebuah Validasi baru (lebih awal), Dewan akan menimbang status Pelaporan EITI dari negara terkait dan menentukan tenggat waktu yang pantas untuk menyelesaikan sebuah Validasi yang akan dilakukan berdasarkan dengan Peraturan EITI edisi 2011.
- Ketentuan dari Persyaratan 5(e) mengenai pelaporan reguler dan tepat waktu akan menjadi wajib setelah 31 Desember 2012 (contohnya Negara Patuh harus mempublikasikan Laporan EITI yang memenuhi persyaratan pelaporan reguler dan tepat waktu sebelum 31 Desember 2012)
- Setiap Negara Patuh diharuskan untuk mempublikasikan laporan tahunan sesuai Persyaratan 21(c) secepat mungkin dan tidak melewati 1 Juli 2012. Laporan tersebut harus mencakup pemutakhiran atas usaha-usaha yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan dengan Peraturan EITI edisi 2011.

² Peraturan EITI Edisi 2011 dan edisi sebelumnya yang tersedia secara online:

<http://eiti.org/document/rules>.

Ringkasan dari perubahan besar antara kedua peraturan tersebut juga tersedia di:

<http://eiti.org/news-events/2011-edition-eiti-rules>

Kelompok 2: Negara Kandidat, yang hampir mencapai status negara Patuh: (Kamerun, Gabon, DR Kongo, Kazakhstan, Mali, Mauritania, Peru)

- Tidak ada perubahan dalam tenggat waktu untuk permohonan Tinjauan Sekretariat.
- Tinjauan Sekretariat akan dilakukan berdasarkan Peraturan EITI edisi sebelumnya. Setelah dilakukan tinjauan:
 - Negara dideklarasikan sebagai negara patuh dikelompokkan dalam kelompok 1.
 - Setiap Negara yang tidak meminta Tinjauan Sekretariat, atau tidak mencapai kepatuhan setelah Tinjauan Sekretariat, pencalonannya akan diperbaharui dalam 18 bulan, yang pada akhir periode tersebut mereka harus menyelesaikan sebuah Validasi yang mendemonstrasikan kepatuhannya atas Peraturan EITI edisi 2011. Jika negara tidak mencapai Status Patuh pada akhir periode 18 bulan, maka negara itu akan dihapuskan dari daftar.
- Yang dibutuhkan untuk memenuhi Persyaratan 5(e) dari Peraturan EITI edisi 2011 dalam pelaporan reguler dan tepat waktu sebelum 31 Desember 2012 atau pada akhir periode maksimum pengkandidatan, yang mana yang lebih lama. Dalam periode interim (sebelum 31 Desember 2012), Dewan dapat menetapkan prinsip yang sudah ada sebelumnya dimana negara-negara dengan pelaporan EITI yang tidak reguler dan /atau data yang dipublikasikan secara substansial sudah tidak mutakhir akan dianggap tidak memenuhi syarat kepatuhan.

Kelompok 3: Negara Kandidat (dengan progres yang berarti setelah Validasi); (Kongo, Sierra Leone)

Catatan: di Brussels Dewan menyetujui bahwa negara-negara ini akan mendapatkan kembali status mereka sebagai negara Kandidat, bergantung kepada rencana kerja yang sudah secara jelas dijabarkan dan disetujui untuk mencapai Status patuh, termasuk jadwal untuk Validasi EITI selanjutnya.

- Jika rencana kerja yang diberikan memuaskan, pencalonan negara-negara ini akan diperbarui dalam 18 bulan sejak tanggal keputusan dari Dewan. Pada akhir periode ini, negara tersebut harus menyelesaikan Validasi yang menunjukkan kepatuhan atas Peraturan EITI edisi 2011. Semua negara yang tidak mencapai status patuh setelah tenggat waktu akan dihapus dari daftar.
- Yang dibutuhkan untuk memenuhi Persyaratan 5(e) dari Peraturan baru tentang pelaporan reguler dan tepat waktu sebelum 31 Desember 2012. Dalam periode interim (sebelum 31 Desember 2012), Dewan mungkin menerapkan prinsip sebelumnya dimana negara yang melakukan pelaporan EITI secara tidak reguler dan atau data yang dipublikasikan secara substansial sudah tidak mutakhir, dianggap tidak memenuhi syarat kepatuhan.

Kelompok 4: Negara Kandidat (dengan tenggat waktu Validasi di 2011):
(Madagaskar, Tanzania, Albania, Burkina Faso, Mozambik, Zambia)

- Berdasarkan pertimbangan yang mendasari keputusan Dewan di Paris untuk memberikan Tanzania perpanjangan waktu,³ tenggat waktu Validasi untuk Albania, Burkina Faso, Mozambik, dan Zambia di tambahkan sampai 6 bulan sampai 14 November 2011. Jika Laporan akhir diberikan sebelum 1 September 2011, Dewan berkomitmen untuk mempertimbangkan laporan itu dalam rapat Dewan yang di jadwalkan pada 25 dan 26 Oktober 2011.
- Validasi dilakukan berdasarkan peraturan EITI edisi sebelumnya.
- Setelah Validasi selesai dilakukan;
 - Negara yang dideklarasikan sebagai negara patuh dikelompokkan dalam kelompok 1.
 - Sebuah negara yang telah mencapai perkembangan berarti, tapi tidak mencapai status patuh, pencalonannya akan diperbaharui dalam 18 bulan, yang pada akhir periode tersebut mereka harus menyelesaikan sebuah Validasi yang mendemonstrasikan kepatuhannya atas Peraturan EITI edisi 2011. Jika negara tidak mencapai Status Patuh pada akhir periode 18 bulan, maka negara itu akan dihapuskan dari daftar.
 - MSG dapat meminta pengabaian dari persyaratan untuk melakukan Validasi kedua dengan dasar bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai status patuh tidaklah rumit dan bisa dilakukan dengan cepat. Adalah kebijakan Dewan untuk menentukan apakah akan mengabulkan permintaan tersebut atau tidak. Jika permohonan pengabaian diajukan pada tahun 2011 dan setelah itu dikabulkan, Tinjauan Sekretariat akan dilakukan berdasarkan Peraturan EITI edisi sebelumnya terlepas dari tanggal keputusan Dewan.
- Harus memenuhi Persyaratan 5(e) dari Peraturan EITI edisi 2011 tentang pelaporan reguler dan tepat waktu sebelum 31 Desember 2012 atau akhir periode maksimum pencalonan, mana yang lebih lama. Dalam periode interim (sebelum 31 Des 2012), Dewan dapat menerapkan prinsip yang sudah ada sebelumnya dimana negara dengan pelaporan EITI yang tidak reguler dan/atau data yang dipublikasikan sudah tidak mutakhir dianggap tidak memenuhi syarat kepatuhan.

Kelompok 5: Negara Kandidat (dengan tenggat waktu validasi di tahun 2012 atau 2013): (Afghanistan, Irak, Chad, Indonesia, Togo, Guatemala, Trinidad dan Tobago, Guinea)

³ Dewan mencatat bahwa pada Peraturan EITI edisi tahun 2011 memberikan 2.5 tahun bagi negara-negara tersebut untuk menyelesaikan ³ Dewan mencatat bahwa pada Peraturan EITI edisi tahun 2011 memberikan 2.5 tahun bagi negara-negara tersebut untuk menyelesaikan Validasi (penambahan 6 bulan dibandingkan Peraturan EITI edisi sebelumnya). Dewan setuju bahwa demi kepentingan keadilan, keempat negara ini akan diberi tambahan enam bulan untuk menyelesaikan Validasi. Ini adalah keputusan yang hanya dibuat satu kali, untuk merefleksikan transisi dari Peraturan saat ini ke Peraturan yang baru, dan tidak akan membuat preseden untuk interpretasi akan Peraturan baru ketika mereka disahkan. Penjelasan lebih rinci tentang keputusan Tanzania, bisa dilihat disini: http://eiti.org/files/FINAL_Minutes_of_the_15th_Board_Meeting_Paris_1_March.pdf

- Tenggat waktu Validasi tiap negara akan ditambah 6 bulan agar negara-negara tersebut dapat memberikan pelaporan EITI mereka sesuai dengan Peraturan EITI edisi 2011.
- Validasi akan dilakukan sesuai Peraturan EITI edisi 2011.
- Negara yang telah mencapai kemajuan berarti, tapi belum mencapai persyaratan kepatuhan, pencalonannya akan diperbaharui dalam 18 bulan, yang pada akhir periode tersebut mereka harus menyelesaikan Validasi yang mendemonstrasikan kepatuhannya atas Peraturan EITI edisi 2011. Jika negara tidak mencapai Status Patuh pada akhir periode 18 bulan, maka negara itu akan dihapuskan dari daftar.
- Harus memenuhi Persyaratan 5(e) dari Peraturan baru tentang pelaporan reguler dan tepat waktu sebelum 31 Desember 2012 atau akhir dari periode maksimum pencalonan, mana yang lebih lama. Dalam periode interim (sebelum 31 Des 2012), Dewan dapat menerapkan prinsip yang sudah ada sebelumnya dimana negara dengan pelaporan EITI yang tidak reguler dan/atau data yang dipublikasikan sudah tidak mutakhir dianggap tidak memenuhi syarat kepatuhan.

Kelompok 6: Lain-lain (Pantai Gading)

- Pantai Gading - tergantung kepada pertimbangan Dewan dalam laporan Validasi akhir dari Pantai Gading.

4. PANDUAN VALIDASI

Panduan Validasi telah direvisi untuk mencerminkan pendekatan baru dalam mendefinisikan Persyaratan EITI, dan untuk memasukkan pelajaran yang didapat dari tahap pertama Validasi. Bagian pengantar ini telah ditulis ulang untuk memberikan gambaran atas tahap-tahap penting dalam proses Validasi, dengan mengacu pada persyaratan-persyaratan yang lebih rinci di bab 3 dan prosedur-prosedur yang tertuang dalam Catatan Kebijakan EITI. Sebelumnya, Validator menilai pemenuhan syarat kepatuhan sebuah negara dengan indikator Validasi dan alat indikator penilaian terkait. Dalam edisi Peraturan EITI yang direvisi ini, bab-bab selanjutnya berisi pernyataan yang jelas akan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai status patuh. Tugas dari validator untuk mengkaji apakah persyaratan-persyaratan tersebut sudah tercapai, dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Kini Panduan Validasi juga mencakup istilah-istilah standar sebagai referensi untuk Validator.

4.1 TUJUAN VALIDASI

Validasi adalah bagian penting dari proses EITI. Ia memiliki dua fungsi penting. Pertama, mempromosikan dialog dan pembelajaran di tingkat negara tersebut. Kedua, menjaga nama EITI dengan menerapkan standar global yang sama kepada semua negara yang menerapkan EITI. Seperti yang diulas dalam bab 3, ada dua kelompok negara-negara yang menerapkan EITI: Negara **Kandidat** dan **Patuh**.

- Negara yang memenuhi lima persyaratan pendaftaran bisa mendaftar kepada Dewan EITI untuk diakui sebagai negara kandidat. Status Kandidat berlaku dalam periode terbatas yang berujung pada status Patuh, dalam jangka waktu tertentu,. Negara Kandidat mempunyai waktu 18 bulan untuk menerbitkan Laporan EITI dan dua setengah tahun untuk menyampaikan Laporan Validasi akhir yang disetujui oleh MSG kepada Dewan EITI. Dalam situasi tertentu, status Kandidat bisa diperpanjang sampai 12 bulan (lihat Catatan Kebijakan #3). Jika status patuh tidak tercapai pada akhir periode ini, negara tersebut akan dihapus dari daftar.
- Jika Validasi dapat membuktikan bahwa suatu negara telah menerapkan EITI secara penuh (contohnya sudah memenuhi semua Persyaratan EITI), Dewan akan menetapkan negara tersebut sebagai negara Patuh EITI. Negara Patuh EITI diharuskan untuk menjalani Validasi baru dalam lima tahun.

Negara yang tidak menyelesaikan Validasi pada tenggat waktu yang disepakati mungkin akan dihapus dari daftar EITI. Peraturan-peraturan untuk menilai status EITI suatu negara pada tenggat waktu ini tertuang dalam Catatan Kebijakan EITI #3.

4.2 GAMBARAN UMUM VALIDASI

Validasi pada dasarnya adalah mekanisme evaluasi eksternal dan independen. Ditujukan untuk memberikan penilaian utuh kepada semua pemangku kepentingan apakah penerapan EITI di sebuah negara konsisten dengan Prinsip dan Kriteria EITI. Laporan Validasi harus juga mencatat pelajaran yang dipetik, juga dengan segala perhatian yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan, dan rekomendasi untuk penerapan EITI di masa depan.

Validasi dilakukan oleh Validator yang ditunjuk oleh kelompok *multi-stakeholder* di negara yang sedang divalidasi, dari daftar organisasi-organisasi atau individual yang telah disetujui oleh Dewan EITI. Negara pelaksana mengkontrak validator, melalui proses penawaran dengan panduan dari sekretariat Internasional EITI. Prosedur ini dibuat untuk memperkuat peran negara dalam proses Validasi, sambil memastikan bahwa Dewan EITI, dengan dukungan dari Sekretariat Internasional EITI, menjalankan mandatnya sebagai penjaga dari Prinsip, Kriteria, dan metodologi Validasi EITI. **Catatan Kebijakan EITI #2** memberikan panduan kepada negara yang menerapkan EITI dalam menyeleksi validator. **Daftar terbaru perusahaan validator yang terakreditasi** bisa didapatkan dari sekretariat Internasional EITI. Biaya Validasi akan dibayar oleh negara yang divalidasi. **Catatan Kebijakan #4** memberikan panduan yang lebih lanjut perihal keragaman.

Dengan sifat dasar kelompok *multi-stakeholder* EITI dan pentingnya dialog, Validasi pada dasarnya adalah sebuah proses konsultasi. Para pemangku kepentingan EITI mempunyai kesempatan sepanjang proses validasi untuk memberikan komentar terkait efektifitas penerapan EITI, untuk menyampaikan opini mereka dalam pemenuhan persyaratan EITI, dan untuk memberikan saran-saran untuk memperkuat proses tersebut. Selain berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, validator harus dengan hati-hati menganalisa Laporan EITI dan bertemu dengan rekonsiliator untuk mendiskusikan kekuatan dan kelemahan dari proses tersebut.

Kelompok *multi-stakeholder* dalam negara yang menerapkan EITI memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses Validasi dilakukan secara lengkap dan menyeluruh. MSG harus secara formal menyetujui keputusan untuk memulai proses Validasi dan harus mengawasi proses tersebut. Validasi tidak dianggap selesai sampai laporan final disetujui oleh MSG.

Dewan EITI juga memainkan peranan penting. Dalam semua keputusan Validasi, Dewan menempatkan prioritas terhadap kebutuhan akan perlakuan yang setara antar negara dan kebutuhan untuk melindungi integritas nama EITI. Dipersyaratkan bahwa Komite Validasi dari Dewan EITI mengulas dan memberikan masukan secara menyeluruh terhadap semua draft Laporan Validasi. Validator harus dapat menangani masukan tersebut dalam laporan akhir. Proses ini memastikan bahwa Dewan EITI mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan status negara tersebut setelah dilakukan Validasi (lihat **Catatan Kebijakan EITI#3**).

4.3 LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES VALIDASI

Formatted: Indonesian

EITI adalah standar yang ketat, tapi juga fleksibel, yang menyesuaikan dengan kondisi setiap negara dan memungkinkan penerapan EITI dengan mengadaptasi kebutuhan dan kondisi domestik. Meskipun demikian, kualitas dari penerapan EITI hanya bisa dipastikan dengan satu metodologi Validasi yang bisa diterapkan ke semua negara Kandidat. Dewan EITI mengawasi Validasi untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan dari proses tersebut. Langkah-langkah utama dari Validasi EITI adalah sebagai berikut:

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

1. **Perjanjian kelompok *Multi-stakeholder* untuk memulai proses Validasi.** MSG harus menyetujui penjadwalan Validasi, bagaimana proses tersebut akan dilakukan, dan harus mengawasi proses tersebut secara menyeluruh.
2. **Pengadaan Validator.** Catatan kebijakan #2 mengatur langkah-langkah dan ragam pengadaan. Negara yang menerapkan EITI membiayai proses Validasi (lihat Catatan Kebijakan #4)
3. **Validasi.** Validator menilai kepatuhan kepada Prinsip dan Kriteria EITI dengan menilai kepatuhan atas 20 Persyaratan EITI (lihat bagian 4.4, dibawah ini). Validasi adalah sebuah proses konsultatif. Validator harus bertemu dengan kelompok multi-stakeholder, organisasi yang dikontrak untuk melakukan rekonsiliasi angka-angka yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah dan para pemangku kepentingan utama lainnya (termasuk perusahaan dan masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok multi-stakeholder). Validator harus juga mengkonsultasikan dokumentasi yang tersedia, termasuk:
 - Rencana Kerja EITI, dan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti anggaran dan rencana komunikasi;
 - Kerangka acuan MSG; dan notulensi dari rapat-rapat MSG;
 - Laporan EITI, dan informasi tambahan seperti ringkasan laporan dan materi komunikasi terkait; dan
 - Formulir-formulir perusahaan (lihat lampiran 4).
4. **Draft Laporan.** Validator harus membuat sebuah draft Laporan Validasi untuk diberikan masukan oleh MSG dan Dewan EITI. Dewan EITI – melalui Komite Validasi – akan mengkaji draft Laporan Validasi untuk memastikan laporan tersebut komprehensif dan memiliki dasar yang memadai untuk menetapkan suatu kepatuhan suatu negara atas Persyaratan EITI. Masukan Komite Validasi dalam draft Laporan Validasi harus dimasukkan kedalam versi akhir dari laporan tersebut.
5. **Validator membuat Laporan Validasi akhir.** Versi akhir dari laporan tersebut harus secara formal disetujui oleh kelompok multi-stakeholder dan pemerintah. Negara menyelesaikan pembayaran validator dan mempublikasikan Laporan Validasi akhir.
6. **Dewan EITI menganalisa laporan dan memutuskan status dari negara tersebut.** Dewan EITI akan meninjau laporan akhir dan memutuskan status negara tersebut sesuai dengan Catatan Kebijakan EITI #3.

4.4 METODOLOGI VALIDASI

Kerangka Acuan standar untuk validator disajikan di bagian 4.4.

Berdasarkan analisa dari dokumen-dokumen ini dan dari masukan pemangku kepentingan, validator harus mengkaji kepatuhan negara terhadap 20 Persyaratan EITI. **Setiap persyaratan (kecuali persyaratan 19 dan persyaratan 20) harus dinilai sebagai "tercapai" atau "belum tercapai"**. Beberapa persyaratan-persyaratan dapat dinilai dengan objektif, yang lain lebih rumit, saling berhubungan dan mungkin memerlukan penilaian subjektif oleh validatornya. Panduan tambahan diberikan untuk beberapa persyaratan (lihat bagian 5 di dalam Kerangka Acuan standar). **Untuk setiap persyaratan, rasionalitas yang mendasari penilaian validator harus dinyatakan dengan jelas, dan validator harus mengutip bukti penting dan pandangan para pemangku kepentingan**. Jika negara telah mencapai kemajuan, tapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan-persyaratan, validator diharapkan mencatat perkembangan tersebut dan membuat rekomendasi untuk mencapai status kepatuhan.

Laporan Validasi harus mengandung:

- Pengantar yang mencakup:
 - fitur-fitur penting dari industri ekstraktif di negara tersebut;
 - keseluruhan perkembangan dalam pelaksanaan rencana kerja EITI.
 - ringkasan dari keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat; dan
 - ringkasan keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan.
 - Penilaian yang komprehensif dan detil dari validator tentang negara tersebut.
- Kajian yang lengkap dan rinci oleh validator atas kepatuhan negara terhadap setiap persyaratan, dengan mempertimbangkan pandangan pemangku kepentingan. Laporan validasi termasuk tabel ringkasan temuan para validator.
- Penilaian keseluruhan atas penerapan EITI dan penilaian validator terkait apakah negara tersebut sudah memenuhi semua Persyaratan EITI.
- Laporan naratif yang membahas:
 - Dampak dari EITI terhadap negara tersebut;
 - Keberlanjutan dari proses EITI;
 - Segala inovasi dan langkah yang diambil oleh MSG yang melampaui persyaratan EITI, contohnya usaha-usaha untuk memperdalam dan memperluas lingkup dari pelaporan EITI ke hulu atau hilir, atau untuk sektor lain.
- Kesimpulan, pelajaran yang dipetik dan rekomendasi untuk memperkuat proses EITI.
- Formulir-formulir Perusahaan yang dikumpulkan.

Para validator dapat memberikan masukan untuk mengklarifikasi dan memperkuat Peraturan EITI dan prosedur Validasi.

Dewan EITI memainkan peranan penting dalam finalisasi dari Laporan Validasi. Dewan EITI – melalui Komite Validasi – akan mengkaji draft Laporan Validasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut komprehensif dan memiliki dasar yang memadai untuk menetapkan suatu kepatuhan suatu negara atas Persyaratan EITI. **Masukan Komite Validasi terhadap Laporan Validasi harus dimasukkan ke dalam versi akhir dari laporan.** Versi akhir dari laporan tersebut harus secara formal disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder* dan pemerintah. Jika terdapat perselisihan mengenai Validasi, ini bisa diselesaikan dengan segera secara lokal oleh validator, dengan Dewan EITI hanya terlibat dalam kasus perselisihan yang serius (lihat bagian 4.5).

Sebuah Laporan Validasi akhir harus diberikan kepada Dewan pada tenggat waktu Validasi. Berdasarkan dengan Catatan Kebijakan #3, Validasi dianggap selesai jika:

- Laporan Validasi disetujui dan disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder*, pemerintah dan Dewan EITI;
- Laporan tersebut sudah dipublikasikan dan tersedia untuk publik; dan
- pembayaran validator sudah diselesaikan.

Dewan EITI menganalisa laporan akhir dan memutuskan status dari negara tersebut. Skenario berbeda atas keputusan Dewan diatur dalam Catatan Kebijakan EITI #3. Dalam hal Laporan Validasi akhir tidak menjabarkan informasi yang rinci mengenai pemenuhan akan Persyaratan EITI, Dewan mungkin akan menugaskan Sekretariat Internasional untuk memberi informasi tambahan. Dalam semua keputusan terhadap Validasi, Dewan menempatkan prioritas terhadap kebutuhan akan perlakuan yang setara antar negara dan kebutuhan untuk melindungi integritas nama EITI.

4.5 PETISI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Negara yang menerapkan EITI - melalui kelompok *multi-stakeholdernya* - mungkin akan mengirimkan petisi untuk Dewan EITI untuk meninjau ulang keputusannya mengenai penunjukkan negara tersebut sebagai negara kandidat atau negara patuh. Dewan akan menimbang petisi-petisi seperti itu dengan pertimbangan terhadap fakta dalam kasus tersebut, perlunya untuk menjaga integritas dari nama EITI dan prinsip perlakuan yang sama antar negara. Keputusan Dewan adalah final (lihat Catatan Kebijakan #3).

Segala ketidaksepakatan dari pemerintah, kelompok *multi-stakeholder* atau Dewan EITI atas Laporan Validasi harus terlebih dahulu diselesaikan dengan validator yang bekerja dengan kelompok-kelompok ini. Jika perselisihan bisa diselesaikan, validator harus membuat perubahan yang memadai dalam Laporan Validasi. Jika ketidaksepakatan tidak bisa diselesaikan, maka harus dicatat dalam Laporan tersebut.

Ketidaksepakatan yang serius menyangkut proses Validasi harus ditangani oleh Dewan dan Ketua EITI, yang akan berusaha untuk menyelesaikannya. Dewan dan Ketua memiliki otoritas untuk menolak keluhan yang mereka anggap tidak penting, menjengkelkan, atau tidak berdasar.

4.6 KERANGKA ACUAN STANDAR UNTUK VALIDATOR

Validasi atas Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif [Negara yang Menerapkan EITI]

Kerangka Acuan untuk Validator

Disetujui oleh [Kelompok *multi-stakeholder*] pada [Tanggal]

Teks ini [dalam kurung] memberikan panduan untuk melengkapi Kerangka Acuan. Teks ini tidak boleh muncul di draft akhir.

1. Latar Belakang

[Bagian ini dikerjakan oleh negara yang menerapkan EITI- bagian ini harus menyediakan informasi latar belakang secara umum dan ringkasan dari pelaksanaan EITI. Juga termasuk detail-detail dalam pencapaian penting dalam proses EITI, termasuk: a) pendirian kelompok multi-stakeholder; b) pengembangan template pelaporan; c) penunjukkan adminisitrator EITI, rekonsiliator atau auditor; d) informasi partisipasi perusahaan-perusahaan; and e) status pelaporan EITI.]

Latar belakang harus juga mencakup sebuah ringkasan kejadian-kejadian dan perkembangan terkini yang relevan terhadap proses Validasi. Anggota saat ini dan mantan anggota kelompok multi-stakeholder harus dicantumkan di lampiran 1. Perusahaan yang beroperasi di negara tersebut harus dicantumkan di Lampiran 2. Versi paling mutakhir dari rencana kerja EITI harus dimasukkan ke Lampiran 3.]

2. Proses pengadaan Validator

[Bagian ini dikerjakan oleh negara yang menerapkan EITI - bagian ini harus memberikan pandangan atas prosedur pengadaan dan kontrak validator termasuk: a) informasi mengenai otoritas yang akan terikat dengan kontrak; b) peran dari kelompok multi-stakeholder dalam proses pengadaan; c) kriteria seleksi dan pembagian proporsi dalam penilaian proposal; d) tenggat waktu pengajuan proposal; dan e) kontak orang yang dapat dihubungi untuk pertanyaan terkait kerangka acuan].

3. Tujuan Validasi

Validasi adalah fitur penting dari proses EITI. Validasi memiliki dua fungsi penting. Pertama, mempromosikan dialog dan pembelajaran di tingkat negara. Validasi dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang berimbang terkait apakah penerapan EITI di suatu negara sudah konsisten dengan Prinsip-prinsip dan Kriteria EITI kepada pemangku kepentingan. Laporan validasi harus juga mencakup pelajaran yang dipetik, perhatian dari stakeholder dan rekomendasi bagi penerapan EITI di masa depan. Kedua, Validasi menjaga nama EITI dengan menerapkan standar global yang sama kepada semua negara yang menerapkan EITI. Ada dua kelompok negara yang menerapkan EITI: Negara Kandidat dan Negara Patuh.

- Negara yang memenuhi lima persyaratan pendaftaran bisa mendaftar kepada Dewan EITI untuk diakui sebagai negara kandidat. Status Kandidat berlaku dalam periode terbatas yang berujung pada status Patuh, dalam jangka waktu tertentu. Negara Kandidat mempunyai waktu 18 bulan untuk menerbitkan Laporan EITI dan dua setengah tahun untuk menyampaikan Laporan Validasi akhir yang disetujui oleh MSG kepada Dewan EITI. Dalam situasi tertentu, status Kandidat bisa diperpanjang sampai 12 bulan (lihat Catatan Kebijakan #3). Jika status patuh tidak tercapai pada akhir periode ini, negara tersebut akan dihapus dari daftar.
- Jika Validasi dapat membuktikan bahwa suatu negara telah menerapkan EITI secara penuh (contohnya sudah memenuhi semua Persyaratan EITI), Dewan akan menetapkan negara tersebut sebagai negara Patuh EITI. Negara Patuh EITI diharuskan untuk menjalani Validasi baru dalam lima tahun.

Negara yang tidak menyelesaikan Validasi pada tenggat waktu yang disepakati mungkin akan dihapus dari daftar EITI. Peraturan-peraturan untuk menilai status EITI suatu negara pada tenggat waktu ini tertuang dalam Catatan Kebijakan EITI #3.

4. Lingkup layanan dan metodologi Validasi

Tugas dari para validator adalah untuk menyelesaikan Laporan Validasi berdasarkan dengan persyaratan-persyaratan dan metodologi yang diatur dalam Peraturan EITI,⁴ bagian 4.3. Langkah-langkah utama dalam proses validasi dijabarkan di Boks 1.

⁴ Tersedia online di: <http://www.eiti.org/document/validationguide>

BOKS 1 – LANGKAH-LANGKAH UTAMA DALAM PROSES VALIDASI EITI

1. **Kesepakatan kelompok *Multi-stakeholder* untuk memulai proses Validasi.** MSG harus menyetujui penjadwalan Validasi, bagaimana proses tersebut akan dilakukan, dan harus mengawasi proses tersebut secara menyeluruh.
2. **Pengadaan Validator.** Catatan kebijakan #2 mengatur langkah-langkah dan ragam pengadaan. Negara yang menerapkan EITI membiayai proses Validasi (lihat Catatan Kebijakan #4)
3. **Validasi.** Validator menilai kepatuhan kepada Prinsip dan Kriteria EITI dengan menilai kepatuhan atas 20 Persyaratan EITI (lihat bagian 4.4, dibawah ini). Validasi adalah sebuah proses konsultatif. Validator harus bertemu dengan kelompok *multi-stakeholder*, organisasi yang dikontrak untuk melakukan rekonsiliasi angka-angka yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah dan para pemangku kepentingan utama lainnya (termasuk perusahaan dan masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok *multi-stakeholder*).
Validator harus juga mengkonsultasikan dokumentasi yang tersedia, termasuk:
 - Rencana Kerja EITI, dan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti anggaran dan rencana komunikasi;
 - Kerangka acuan MSG; dan notulensi dari rapat-rapat MSG;
 - Laporan EITI, dan informasi tambahan seperti ringkasan laporan dan materi komunikasi terkait; dan
 - Formulir-formulir perusahaan (lihat lampiran 4).
4. **Draft Laporan.** Validator harus membuat sebuah draft Laporan Validasi yang terdiri atas:
 - Pengantar yang mencakup:
 - fitur-fitur penting dari industri ekstraktif di negara tersebut;
 - keseluruhan perkembangan dalam pelaksanaan rencana kerja EITI.
 - ringkasan dari keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat; dan
 - ringkasan keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan.
 - Penilaian yang komprehensif dan detil dari validator tentang negara tersebut.
 - Kajian yang lengkap dan rinci oleh validator atas kepatuhan negara terhadap setiap persyaratan, dengan mempertimbangkan pandangan pemangku kepentingan. Laporan validasi termasuk tabel ringkasan temuan para validator.
 - Penilaian keseluruhan atas penerapan EITI dan penilaian validator terkait apakah negara tersebut sudah memenuhi semua Persyaratan EITI.
 - Laporan naratif yang membahas:
 - dampak dari EITI terhadap negara tersebut;
 - keberlanjutan dari proses EITI;
 - segala inovasi dan langkah yang diambil oleh MSG yang melampaui persyaratan EITI, contohnya usaha-usaha untuk memperdalam dan memperluas lingkup dari pelaporan EITI ke hulu atau hilir, atau untuk sektor lain.
 - Kesimpulan, pelajaran yang dipetik dan rekomendasi untuk memperkuat proses EITI.
 - Formulir-formulir Perusahaan yang dikumpulkan.
5. **Komite Validasi Dewan EITI mengkaji draft Laporan Validasi** dan memberikan masukan.
6. **Validator membuat Laporan Validasi akhir.** Versi akhir dari laporan tersebut harus secara formal disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder* dan pemerintah.
7. **Dewan EITI menganalisa laporan dan memutuskan status dari negara tersebut** sesuai dengan Catatan Kebijakan EITI #3.

Berdasarkan analisa dari dokumen-dokumen ini dan dari masukan pemangku kepentingan, validator harus mengkaji kepatuhan negara terhadap 20 Persyaratan EITI. **Setiap persyaratan (kecuali persyaratan 19 dan persyaratan 20) harus dinilai sebagai "tercapai" atau "belum tercapai".** Jika negara telah mencapai kemajuan, tapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan-persyaratan, validator diharapkan mencatat perkembangan tersebut dan membuat rekomendasi untuk mencapai status kepatuhan.

Beberapa persyaratan-persyaratan dapat dinilai dengan objektif, yang lain lebih rumit, saling berhubungan dan mungkin memerlukan penilaian subjektif oleh validatornya. Panduan tambahan diberikan untuk beberapa persyaratan (lihat bagian 5 di dalam Kerangka Acuan standar). **Untuk setiap persyaratan, rasionalitas yang mendasari penilaian validator harus dinyatakan dengan jelas, dan validator harus mengutip bukti-bukti dokumentasi kunci dan pandangan para pemangku kepentingan.**

5. Panduan rinci untuk validator dalam menilai kepatuhan atas Persyaratan EITI

Bagian ini akan memberikan panduan bagi validator dalam menilai kepatuhan yang memiliki persyaratan dengan banyak aspek dan/atau melibatkan penilaian subjektif. Dalam beberapa kasus, validator harus memastikan bahwa persyaratan pembuktian khusus sudah dipenuhi. Dalam kasus lain, ada pendekatan berbeda yang diambil sebuah negara untuk mencapai kepatuhan, sehingga persyaratan pembuktiannya bersifat ilustratif, dan tidak diperlukan untuk melihat tiap pecahan bukti untuk menilai persyaratan telah tercapai.

Persyaratan 2

Untuk menilai persyaratan tersebut sudah terpenuhi, validator harus mengutip bukti dari komitmen yang nyata dan berkelanjutan dari pemerintah untuk bekerja dengan organisasi masyarakat sipil dan perusahaan dalam isu-isu EITI. Ini termasuk bukti-bukti berikut:

- Perusahaan-perusahaan dan organisasi masyarakat sipil terlibat secara substantif dalam mendesain, memonitor, dan mengevaluasi proses EITI, dan berkontribusi terhadap debat publik.
- Hambatan-hambatan atas partisipasi masyarakat dan perusahaan dalam proses EITI dihilangkan.
- Kerangka kerja yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil dan perusahaan dengan mengacu pada hukum, peraturan, dan peraturan administratif yang terkait sebagai mana juga praktek aktual di dalam pelaksanaan EITI.
- Perwakilan masyarakat dan perusahaan bisa berbicara secara bebas terkait isu transparansi dan pengelolaan sumber daya alam.
- Perwakilan masyarakat dan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada anggota MSG, yang secara substantif terlibat dalam proses EITI, bisa berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain dan dengan pihak yang terkait.

Persyaratan 4

Formatted: Indonesian

Untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi, validator diharapkan untuk mencantumkan bukti bahwa kelompok *multi-stakeholder* telah terbentuk dan kelompok ini terdiri dari pemangku kepentingan yang tepat dan bahwa Kerangka Acuan (TOR) sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bukti yang disertakan antara lain:

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

- Penilaian pemangku kepentingan bahwa hal tersebut telah dilakukan.
- Informasi mengenai anggota kelompok *multi-stakeholder*, antara lain:
 - Apakah undangan untuk berpartisipasi dalam kelompok *multi-stakeholder* bersifat terbuka dan transparan?
 - Apakah setiap pemangku kepentingan terwakili dalam kelompok ini? (Catatan: Tidak ada persyaratan bahwa pemangku kepentingan harus terwakili secara setara)
 - Apakah pemangku kepentingan merasa sudah cukup terwakilkan dalam kelompok ini?
 - Apakah pemangku kepentingan merasa bahwa mereka bisa bekerja sebagai bagian dari kelompok *multi-stakeholder* – termasuk berhubungan dengan kelompok konstituen mereka sendiri serta dengan pemangku kepentingan lain – tanpa pengaruh atau paksaan?
 - Apakah anggota masyarakat sipil berpartisipasi dalam kelompok *multi-stakeholder* dan bebas dari kepentingan pemerintah dan/atau swasta dalam mengambil kebijakan?
 - Ketika terjadi perubahan anggota kelompok, apakah pernah terjadi paksaan atau upaya untuk memasukkan anggota baru yang tidak akan menentang *status quo*?
 - Apakah semua anggota kelompok *multi-stakeholder* mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjalankan tugas?
- Penilaian apakah TOR memberikan otoritas kepada kelompok *multi-stakeholder* atas penerapan EITI? TOR tersebut minimal harus memuat:
 - Persetujuan atas rencana kerja EITI – melakukan revisi apabila diperlukan;
 - Memilih auditor untuk melakukan audit ketika data yang diajukan untuk rekonsiliasi oleh perusahaan atau pemerintah belum diaudit dengan menggunakan standar internasional;
 - Memilih lembaga yang akan melakukan rekonsiliasi; dan
 - Mengawasi kegiatan lain yang diperlukan untuk mencapai kepatuhan.
- Penilaian apakah pejabat senior cukup terwakili dan berpartisipasi dalam kerja kelompok *multi-stakeholder*.

Persyaratan 5

Bukti: Untuk menilai bahwa persyaratan telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa rencana kerja EITI telah disetujui oleh pemangku kepentingan dan berisi tentang:

- Target yang terukur.
- Jadwal pelaksanaan
- Kajian atas potensi kendala kapasitas

- Tindakan untuk memastikan kelompok *multi-stakeholder* memahami EITI, terutama dalam keterlibatan dengan masyarakat sipil.
- Jadwal Validasi, termasuk paparan bagaimana pemerintah akan membiayai Validasi.

Validator juga harus menilai kemajuan dalam penerapan rencana kerja, berdasarkan pada tindakan dan jadwal yang telah disepakati, termasuk apakah negara telah mengambil tindakan atas kendala kapasitas yang teridentifikasi. Jika jadwal tidak dapat terpenuhi, validator – berdasarkan bukti dari pemangku kepentingan dan kelompok lain – harus memberikan pendapat apakah keterlambatan dalam memenuhi jadwal masuk akal atau tidak.

Persyaratan 6

Untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus melihat bukti bahwa pemerintah (dan kelompok *multi-stakeholder* EITI, jika memungkinkan) telah melibatkan masyarakat sipil dalam penerapan EITI. Hal ini harus mencakup bukti sebagai berikut:

- Sosialisasi yang efektif oleh kelompok *multi-stakeholder* kepada kelompok masyarakat sipil yang lebih luas, termasuk komunikasi (melalui media, situs, surat) dengan kelompok masyarakat sipil dan/atau koalisi dengan memberikan informasi mengenai komitmen pemerintah dalam menerapkan EITI, peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil, serta menyebarluaskan informasi publik (misalnya, Laporan EITI Nasional).
- Perwakilan masyarakat sipil dalam kelompok *multi-stakeholder* merasa telah diberikan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai jadwal rapat dan akses terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum mereka mengajukan adopsi dan debat serta berpartisipasi penuh dan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang bersifat sensitif (misalnya, kapan undangan untuk pertemuan diedarkan, apakah masyarakat sipil cukup terwakili dalam pertemuan, apakah pandangan mereka tersampaikan pada saat pertemuan berlangsung?, dll).
- Tindakan untuk mengatasi terjadinya potensi kendala kapasitas yang akan mempengaruhi partisipasi masyarakat sipil dalam EITI, baik tindakan yang diambil oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun perusahaan, termasuk akses untuk peningkatan kapasitas atau sumber daya.
- Pemerintah telah mengambil tindakan efektif untuk menyelesaikan hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sipil.
- Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam EITI sebagai anggota dari kelompok *multi-stakeholder* harus independen secara operasional, dan dalam kebijakan, dari pemerintah dan/atau perusahaan.
- Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam EITI bebas untuk mengemukakan pendapat mengenai EITI tanpa pembatasan dan paksaan.
- Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam EITI bebas untuk terlibat dalam debat publik mengenai EITI serta menerima kontribusi dan saran dari elemen masyarakat sipil yang tidak menjadi bagian dari kelompok *multi-stakeholder*.

- Kebijakan, praktek dan tindakan yang melanggar hak-hak dasar perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam EITI, termasuk tapi tidak terbatas kepada anggota MSG, dan secara substansial terlibat dalam proses EITI, harus dihormati.

Validator harus mendokumentasikan setiap hal dimana partisipasi bebas, penuh, aktif, independen dan aktif dari masyarakat sipil, lembaga sipil maupun perusahaan telah dibatasi, mendokumentasikan persoalan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah.

Persyaratan 7

Untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa pemerintah dan kelompok *multi-stakeholder*, disaat yang tepat, telah berupaya untuk melibatkan perusahaan (minyak, gas dan tambang) dalam menerapkan EITI. Validator harus memperlihatkan bukti sebagai berikut:

- Jangkauan komunikasi (melalui media, situs, surat) yang dilakukan oleh kelompok *multi-stakeholder* kepada perusahaan minyak, gas dan tambang, yang memberikan informasi mengenai komitmen pemerintah untuk melaksanakan EITI serta peran sentral perusahaan.
- Tindakan untuk mengatasi potensi kendala kapasitas yang akan mempengaruhi perusahaan, baik yang diambil oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun perusahaan.

Persyaratan 8

Untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa pemerintah telah mengatasi semua hambatan. Hal ini meliputi penilaian proaktif mengenai hambatan atau melalui tindakan reaktif yang diambil untuk mengatasi hambatan yang muncul. Masalah ini tidak bisa diatasi dengan satu cara saja – negara biasanya memiliki kerangka hukum serta perjanjian lainnya yang berbeda yang dapat mempengaruhi penerapan EITI dan harus direspon dengan cara yang berbeda. Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- Kajian mengenai kerangka hukum.
- Kajian mengenai kerangka regulasi.
- Penilaian mengenai hambatan dalam kerangka hukum dan regulasi yang bisa mempengaruhi penerapan EITI.
- Perubahan hukum dan regulasi yang diusulkan atau yang berlaku harus mendukung transparansi.
- Pengabaian atas klausul kerahasiaan dalam kontrak antara pemerintah dan perusahaan untuk memungkinkan pengungkapan pendapatan.
- Komunikasi langsung dengan misalnya, perusahaan, untuk memungkinkan transparansi yang lebih besar.
- Nota Kesepahaman (MoU) yang menetapkan standar transparansi yang telah disetujui serta ekspektasi antara pemerintah dan perusahaan.

Persyaratan 9

Validator harus memberikan penilaian rinci terhadap persyaratan ini, menindaklanjuti setiap ketentuan yang ditetapkan dalam Persyaratan 9 (a) sampai (h). Validator harus mencatat posisi MSG atas suatu hal atau pandangan dari pemangku kepentingan yang telah disepakati. Untuk menilai persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa kelompok *multi-stakeholder* telah diajak berkonsultasi dalam pengembangan *template*, bahwa konstituen yang lebih luas memiliki kesempatan untuk memberikan komentar dan kelompok *multi-stakeholder* menyetujui *template* akhir. Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- Draft *template* diberikan kepada kelompok *multi-stakeholder*.
- Diskusi kelompok *multi-stakeholder* mengenai *template* tersebut.
- Komunikasi dengan pemangku kepentingan lain (misalnya perusahaan) mengenai *template* tersebut.
- Pengaturan yang memungkinkan pemangku kepentingan memahami isu-isu yang terkait.
- Pernyataan dari kelompok *multi-stakeholder* bahwa mereka menyetujui *template* tersebut, termasuk aliran pendapatan perusahaan.

Persyaratan 10

Untuk menilai persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa kelompok *multi-stakeholder* menyetujui organisasi yang ditunjuk untuk rekonsiliasi. Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- TOR yang disepakati oleh kelompok *multi-stakeholder*.
- Hubungan yang transparan dengan Sekretariat Internasional dan Dewan EITI untuk mengidentifikasi rekonsiliator yang potensial.
- Persetujuan oleh kelompok *multi-stakeholder* atas organisasi yang dipilih.

Persyaratan 11

Untuk menilai persyaratan ini telah dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti yang menunjukkan bahwa: (1) semua perusahaan yang memberikan pembayaran yang material kepada pemerintah berpartisipasi dalam proses pelaporan, dan (2) semua entitas pemerintah yang menerima pembayaran yang material berpartisipasi dalam proses pelaporan. Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- Undang-undang yang diperkenalkan/diubah yang mengharuskan perusahaan dan entitas pemerintah melapor sesuai dengan kriteria EITI dan *template* laporan yang telah disepakati.
- Peraturan yang relevan yang diperkenalkan/diubah yang mengharuskan perusahaan dan entitas pemerintah melapor sesuai dengan kriteria EITI dan *template* laporan yang telah disepakati.
- Kesepakatan yang telah dinegosiasikan (seperti Nota Kesepahaman dan surat pernyataan mengenai klausul kerahasiaan dalam perjanjian bagi hasil) dengan semua perusahaan untuk memastikan laporan sesuai dengan kriteria EITI dan *template* yang telah disepakati.

- Apabila perusahaan tidak berpartisipasi, pemerintah akan mengambil langkah umum yang sudah diketahui (oleh pemangku kepentingan lain) untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini melapor sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati (dengan pemangku kepentingan).

Persyaratan 12

Untuk menilai apakah persyaratan ini dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan data yang dikumpulkan oleh perusahaan sudah diaudit sesuai dengan standar internasional.

Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan angka yang akan dikumpulkan diaudit berdasarkan standar internasional.
- Pemerintah mengubah standar audit yang sudah ada menjadi standar internasional dan mewajibkan perusahaan menggunakan standar ini.
- Pemerintah menyetujui MoU dengan semua perusahaan, dimana perusahaan akan memastikan angka-angka yang dilaporkan telah diaudit sesuai dengan standar internasional.
- Perusahaan secara sukarela berkomitmen untuk melaporkan angka-angka yang sudah diaudit dengan standar internasional.
- Apabila perusahaan tidak melaporkan angka-angka yang diaudit dengan standar internasional, pemerintah menyetujui rencana untuk mencapai standar internasional dengan perusahaan (termasuk BUMN) dalam tenggat waktu yang ditetapkan.
- Apabila angka yang dilaporkan untuk rekonsiliasi tidak diaudit sesuai standar, kelompok *multi-stakeholder* harus puas dengan solusi yang diambil untuk mengatasi hal ini.

Persyaratan 13

Untuk menilai apakah persyaratan ini dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah diaudit menurut standar internasional. Hal ini termasuk bukti sebagai berikut:

- Pemerintah mengeluarkan aturan yang mengharuskan angka-angka yang dilaporkan agar diaudit sesuai standar internasional.
- Pemerintah mengubah standar audit yang berlaku menjadi standar internasional dan memastikan kepatuhan terhadap standar ini.
- Apabila angka yang dilaporkan pada saat rekonsiliasi tidak diaudit sesuai standar, kelompok *multi-stakeholder* harus puas dengan solusi yang diambil untuk mengatasi hal ini.

Persyaratan 16

Untuk menilai apakah persyaratan ini dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa kelompok *multi-stakeholder* setuju bahwa organisasi yang dikontrak untuk melakukan rekonsiliasi angka yang didapat dari perusahaan dan pemerintah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Hal ini mencakup:

- Persetujuan atau pengesahan laporan oleh kelompok *multi-stakeholder*.
- Bukti lain, termasuk notulen rapat kelompok *multi-stakeholder* dan komentar dari pemangku kepentingan lainnya, yang menunjukkan bahwa kelompok *multi-stakeholder* merasa puas karena organisasi yang ditunjuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan.

Persyaratan 17

Validator diwajibkan untuk mendokumentasikan setiap rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang dibuat oleh rekonsiliator, serta untuk menilai kemajuan pemerintah dan MSG dalam menanggapi rekomendasi tersebut.

Persyaratan 18

Untuk menilai apakah persyaratan ini dipenuhi, validator harus mencantumkan bukti bahwa pemerintah telah memastikan laporan EITI tersedia untuk publik dengan cara-cara yang konsisten dengan Kriteria EITI. Hal ini mencakup bukti sebagai berikut:

- Membuat salinan kertas dari laporan EITI yang disebarluaskan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, perusahaan, media, dan lainnya.
- Membuat laporan EITI yang dapat diakses melalui internet dan memberitahukan lokasi situsnya kepada pemangku kepentingan.
- Memastikan bahwa laporan EITI cukup komprehensif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan laporan EITI dan laporan validasi periode sebelumnya.
- Memastikan bahwa laporan EITI mudah dipahami, termasuk dengan memastikan laporan tersebut ditulis dalam gaya bahasa yang jelas dan bahasa yang sesuai.
- Memastikan bahwa setiap acara – baik yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat sipil atau perusahaan – dilakukan untuk menyebarkan kesadaran mengenai laporan EITI.

Untuk mencapai status Patuh EITI, pemerintah dan MSG harus memastikan bahwa laporan EITI dan temuan yang terdapat didalamnya berkontribusi pada debat publik. Kepatuhan terhadap persyaratan ini bisa ditunjukkan melalui beberapa cara, antara lain:

- Memberikan penjelasan untuk para pejabat pemerintah dan anggota parlemen;
- Memberikan penjelasan ditingkat komunitas lokal;

- Melibatkan wartawan dan akademisi;
- Melakukan komunikasi dan sosialisasi lainnya untuk menjelaskan temuan kepada pemangku kepentingan yang tertarik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penerapan.

Persyaratan 19

Validator tidak diwajibkan untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi atau tidak. Validator harus memberikan penilaian tertulis dalam Laporan Validasi EITI berdasarkan Formulir penilaian mandiri (lihat lampiran 4), dimana masing-masing perusahaan harus mengisi formulir tersebut. Apabila perusahaan tidak mengisi formulir, validator harus mencatat hal ini dalam Laporan Validasi akhir. Selain menggunakan formulir ini untuk merangkum kinerja perusahaan dalam laporan EITI, formulir ini juga harus tersedia untuk umum dan tabel yang berisi tanggapan dari perusahaan harus dimasukkan kedalam laporan EITI.

Persyaratan 20

Validator tidak diwajibkan untuk menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi atau tidak. Validator harus memeriksa bukti bahwa mekanisme pengkajian telah dilakukan dan memberikan komentar mengenai hal ini dalam Laporan Validasi. Sesuai dengan Persyaratan 17, validator harus mencatat semua rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang diusulkan oleh rekonsiliator dan menilai perkembangan pemerintah dan MSG dalam menanggapi rekomendasi tersebut.

Persyaratan 21

Validator hanya diwajibkan menilai apakah persyaratan ini telah dipenuhi atau tidak apabila negara yang sedang divalidasi telah mendapatkan status patuh. Validator harus mendokumentasikan diskusi MSG serta pandangan pemangku kepentingan terkait Persyaratan 21(d).

6. Laporan dan Jadwal

Laporan Validasi harus mencakup:

- Laporan penjelasan singkat mengenai perkembangan rencana kerja EITI;
- Laporan penjelasan singkat mengenai perkembangan terhadap persyaratan EITI;
- Sebuah tabel yang merangkum kepatuhan atas Persyaratan EITI;
- Laporan penjelasan mengenai penerapan EITI oleh perusahaan;
- Laporan penjelasan singkat mengenai dampak EITI berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan di EITI;
- Laporan penjelasan singkat mengenai keberlangsungan proses EITI berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan;
- Susunan Formulir Perusahaan; dan
- Penilaian secara menyeluruh terhadap penerapan EITI: apakah negara yang menjadi kandidat sudah memenuhi persyaratan, atau tidak menunjukkan perkembangan sama sekali?

Laporan Validasi juga harus menunjukkan pelajaran yang telah dipetik, serta perhatian yang diungkapkan oleh masyarakat, dan rekomendasi penerapan EITI di masa yang akan datang. Validator juga sebaiknya memberikan komentar untuk memperjelas dan memperkuat Aturan dan prosedur Validasi dalam EITI.

Dewan EITI – melalui Komite Validasi – akan mengkaji ulang draft Laporan Validasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut bisa dipahami dan cukup untuk menjadi landasan untuk membangun kepatuhan negara sesuai dengan Persyaratan EITI.

Komentar Komite Validasi pada draft laporan Validasi harus disampaikan dalam versi akhir laporan.

Versi akhir Laporan Validasi harus disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder* dan pemerintah. Dewan EITI akan mengkaji ulang laporan akhir dan memutuskan status negara sesuai dengan Catatan Kebijakan EITI #3. Laporan Validasi akhir harus dipublikasikan dan disebarluaskan, salah satunya dengan menulis laporan dalam bahasa resmi setempat.

Apabila ada yang tidak menyetujui hasil Validasi, maka hal ini harus diselesaikan oleh validator, dan Dewan EITI hanya akan terlibat dalam kasus perselisihan serius.

Jadwal untuk menyelesaikan tugas ini ditetapkan pada tabel dibawah ini. Diharapkan agar Ketua Tim Validasi dan spesialis teknis lainnya menjalankan investigasi dan mewawancarai pemangku kepentingan di <tempat> di <tanggal>. Draft *deliverables* yang ditetapkan diatas diharapkan selesai pada <tanggal>. Ketua Tim diharapkan bertemu dengan Komite EITI pada <tanggal> untuk menerima masukan mengenai draft *deliverables*. *Deliverables* akhir harus dikumpulkan pada <tanggal>, dengan memberikan salinan kepada Sekretariat Internasional EITI. Sambil menunggu kajian dari Dewan EITI, tambahan dan modifikasi Laporan Validasi dapat dilakukan selama <tanggal>.

Permohonan proposal	<tanggal>
Tenggat waktu pengumpulan proposal oleh validator	<tanggal>
Pemberian kontrak	<tanggal>
Penandatanganan kontrak	<tanggal>
Periode awal	<tanggal>
Kunjungan lapangan	<tanggal>
Pengumpulan draft laporan	<tanggal>
Masukan terhadap draft dari MSG	<tanggal>
Masukan terhadap draft dari Komite Validasi	<tanggal>
Pengumpulan laporan akhir	<tanggal>

7. Data, Layanan Lokal, Personel dan Fasilitas yang diberikan oleh Klien

[Bagian ini harus dilengkapi oleh negara yang menerapkan EITI – 1) Mencakup rincian dokumen dan informasi lain yang akan disediakan untuk validator (misalnya, notulen rapat kelompok multi-stakeholder, laporan EITI, siaran pers, presentasi dan materi komunikasi lainnya). 2) Menyediakan rincian mengenai sambutan dari validator selama berkunjung ke negara yang menerapkan EITI.]

8. Peran Sekretariat Internasional EITI

Sekretariat Internasional EITI, sebagai perwakilan dewan, akan mengawasi proses Validasi. Validator diharapkan untuk terus berhubungan dengan Sekretariat Internasional EITI selama validasi berlangsung. Ketika dibutuhkan, Sekretariat akan memberikan nasehat dan pelatihan mengenai penerapan metodologi Validasi. Validator diwajibkan untuk melaporkan segala kesulitan atau penyimpangan yang ditemukan selama proses Validasi kepada Sekretariat Internasional EITI.

9. Konflik Kepentingan

Untuk memastikan kualitas dan independensi selama validasi, validator diharapkan untuk memberikan notifikasi kepada klien dan Sekretariat Internasional EITI apabila terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, serta memberikan rekomendasi bagaimana konflik tersebut bisa dihindari.

10. Jadwal pembayaran

Jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

<x%> setelah Klien mendapatkan salinan kontrak yang ditandatangani oleh Konsultan;

<x%> setelah Klien mendapatkan draft laporan, yang bisa diterima oleh Klien;

<x%> setelah Klien mendapatkan laporan akhir, yang bisa diterima oleh Klien.

Lampiran 1 – Anggota kelompok *Multi-stakeholder*

a. Anggota Kelompok *multi-stakeholder* saat ini

Nama	Organisasi	Telepon	Email	Keanggotaan Sejak <tanggal>

b. Anggota kelompok *multi-stakeholder* sebelumnya

Nama	Organisasi	Telepon	Email	Keanggotaan	
				Dari	Sampai

Lampiran 2 – Daftar perusahaan aktif dalam industri ekstraktif

[Bagian ini harus dilengkapi oleh negara yang menerapkan EITI – menyediakan daftar perusahaan yang beroperasi di industri ekstraktif yang termasuk dalam EITI. Masukkan rincian kontak apabila tersedia].

Nama	Kontak	Telepon	Email

Lampiran 3 – Rencana kerja EITI

[Bagian ini harus dilengkapi oleh negara yang menerapkan EITI – versi terbaru rencana kerja EITI harus dimasukkan sebagai lampiran].

5 Catatan Kebijakan EITI

Kebijakan dan metodologi EITI berlandaskan pada Prinsip dan Kriteria EITI dan dijelaskan lebih rinci dalam Buku Sumber dan Panduan Validasi EITI (lihat bagian 3). Dewan EITI juga telah mengeluarkan beberapa klarifikasi dan panduan bagi negara yang menerapkan EITI. Panduan ini diterbitkan sebagai Catatan Kebijakan EITI.

Catatan Kebijakan #1

Klarifikasi mengenai Indikator Validasi 4

Catatan Kebijakan #2

Panduan untuk Negara yang Menerapkan EITI dalam Pengadaan Validator EITI

Catatan Kebijakan #3

Tenggat Waktu Validasi

Catatan Kebijakan #4

Pembiayaan Validasi

Catatan Kebijakan #5

Pemberhentian Sementara dan Pencabutan EITI sebagai Negara yang Menerapkan EITI

Catatan Kebijakan #6

Partisipasi Masyarakat Sipil

Pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan dan metodologi EITI dapat dikirimkan kepada Sekretariat Internasional EITI, yang akan merujuk pertanyaan kepada Dewan EITI untuk mengambil keputusan apabila diperlukan.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #1

KLARIFIKASI TENTANG INDIKATOR VALIDASI 4

Disetujui oleh Dewan EITI pada 22 Februari 2008

Dicabut oleh Dewan EITI pada 16 Februari 2011

Catatan Kebijakan EITI #1 memberikan klarifikasi mengenai indikator Validasi 4 yang berkaitan dengan persetujuan pemangku kepentingan terhadap rencana kerja EITI. Dewan telah mengganti indikator Validasi dengan persyaratan (lihat bab 3), dan kebutuhan konsultasi pemangku kepentingan selama pengembangan rencana kerja disampaikan dalam Persyaratan 5. Teks asli yang disertakan dibawah ini hanya sebagai referensi.

Pembukaan

Indikator Validasi 4 menyatakan:

“Memiliki Rencana Kerja Negara beserta anggarannya yang diterbitkan dan disebarluaskan, terdiri dari target yang ditetapkan, jadwal pelaksanaan dan penilaian atas kendala kapasitas (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil).”

Meskipun indikator ini tidak membuat acuan spesifik mengenai ‘persetujuan dengan pemangku kepentingan utama EITI’, Alat Penilaian Indikator (IAT) untuk Indikator Validasi 4 menyatakan: ‘Kriteria EITI keenam mengharuskan rencana kerja yang dibuat disetujui oleh pemangku kepentingan utama dan tersedia untuk publik.’ Selain itu, laporan dari EITI International Advisory Group tahun 2006 juga menyebutkan bahwa:

“Negara Kandidat merupakan mereka yang telah mendaftar untuk menerapkan EITI, memenuhi empat indikator dalam tahap pendaftaran dan telah memberikan bukti dokumen kepada Dewan EITI dan Sekretariat Internasional EITI. Indikator tersebut menanyakan apakah pemerintah telah :

- membuat Rencana Kerja Negara yang disetujui oleh pemangku kepentingan.”

Alat Penilaian Indikator (IAT) juga menyatakan bahwa ‘validator harus melihat bukti yang menyatakan bahwa rencana kerja telah disetujui oleh pemangku kepentingan utama’.

Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini sesuai dengan Indikator Validasi 4, Dewan EITI harus yakin bahwa rencana kerja telah dibahas dan disetujui oleh pemangku kepentingan. Persetujuan ini bisa ditunjukkan dalam berbagai cara, misalnya, dalam bentuk notulen rapat dan/atau pernyataan dukungan dari pemangku kepentingan utama yang dipublikasikan dan dikaji kebenarannya.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #2

PANDUAN UNTUK NEGARA YANG MENERAPKAN EITI DALAM PENGADAAN VALIDATOR EITI

Disetujui oleh Dewan EITI pada tanggal 22 Februari 2008

Edisi revisi disetujui oleh Dewan EITI pada tanggal 16 Februari 2011

Kata Pengantar

Dewan EITI mengeluarkan panduan berikut untuk negara yang menerapkan EITI dalam proses pemilihan validator EITI. Panduan ini telah dikembangkan untuk memperkuat kualitas, konsistensi dan kesinambungan proses validasi. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat keterlibatan negara dalam proses Validasi, dan memastikan bahwa Dewan EITI, dengan dukungan dari Sekretariat Internasional EITI menjaga mandatnya sebagai kustodian dari Prinsip-Prinsip, Kriteria dan metode Validasi EITI. Prosedur ini akan terus diperbaharui karena banyak hal yang bisa dipelajari selama putaran pertama Validasi negara.

Latar Belakang

Validasi merupakan fitur penting dari proses EITI. Validasi mempunyai dua fungsi utama. Pertama, mempromosikan dialog dan pembelajaran ditingkat negara. Validasi diharapkan dapat memberikan penilaian yang berimbang kepada pemangku kepentingan mengenai apakah penerapan EITI di suatu negara konsisten dengan Persyaratan EITI. Kedua, validasi melindungi nama EITI dengan mengarahkan semua negara yang menerapkan EITI kepada standar global yang sama. Pada tahun 2006, International Advisory Group (IAG) merekomendasikan bahwa:

“Validasi akan dilakukan oleh validator yang ditunjuk oleh kelompok *multi-stakeholder* di negara yang sedang divalidasi, yang dipilih dari daftar organisasi atau individu yang sudah disetujui sebelumnya oleh Sekretariat Internasional EITI dan Dewan EITI. Biaya validasi akan dibayar oleh negara yang divalidasi.”⁵

Catatan Kebijakan ini memberikan panduan rinci bagi negara yang menerapkan EITI dalam proses pengadaan dan penentuan validator EITI. Nota ini menetapkan langkah-langkah utama dalam proses penentuan serta peran dan tanggung jawab negara yang menerapkan EITI, validator, Dewan EITI dan Sekretariat Internasional EITI.

Ikhtisar Langkah-Langkah Utama

Negara yang menerapkan EITI akan melakukan kontrak validator melalui proses pengadaan yang diawasi oleh kelompok *multi-stakeholder* dan Sekretariat Internasional EITI sebagai perwakilan dari Dewan EITI. Bagian berikut memberikan panduan tambahan.

⁵ http://www.eiti.org/files/document/eiti_iag_report_english.pdf Page 6

1. **Inisiasi proses Validasi.** Panduan Validasi EITI menyatakan bahwa “langkah pertama adalah penentuan validator oleh kelompok *multi-stakeholder*”. Kelompok *multi-stakeholder* harus secara resmi menyetujui keputusan untuk memulai proses Validasi. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk subkomite yang mengawasi proses pemilihan dan penentuan validator.
2. **Memberitahukan Sekretariat Internasional EITI mengenai inisiasi proses Validasi.** Negara yang menerapkan EITI yang akan memulai proses validasi harus melapor secara tertulis terlebih dahulu kepada Sekretariat Internasional EITI melalui perwakilan pelaksana EITI yang telah ditunjuk. Surat ini harus memuat:
 - a) Indikasi jadwal untuk penyelesaian proses Validasi
 - b) Prosedur yang diusulkan untuk pengadaan dan kontrak validator yang sudah disetujui, termasuk:
 - i. lembaga utama dan orang yang dapat dihubungi selama proses pengadaan;
 - ii. prosedur pengadaan yang diusulkan termasuk kriteria seleksi yang diusulkan dan pembobotan untuk menilai proposal;
 - iii. otoritas yang akan terlibat dalam kontrak yang diusulkan, yang akan mewakili negara yang menerapkan EITI di dalam kontrak; dan
 - iv. peran dari kelompok *multi-stakeholder* dalam proses pengadaan.
 - c) Pengaturan pembiayaan untuk proses Validasi.
 - d) Permintaan bantuan teknis kepada Sekretariat Internasional EITI.

Sekretariat Internasional EITI akan memberitahukan apabila telah menerima surat ini dan memberi tanggapan dalam sepuluh (10) hari kerja, dengan menyoroti masalah yang berkaitan dengan proses yang diusulkan. Sekretariat Internasional EITI juga akan menanggapi permohonan untuk bantuan teknis dan memberikan panduan dan *template* yang tersedia. Sekretariat Internasional EITI akan menyediakan lembaga utama dan kontak untuk pengadaan dengan daftar terbaru validator terakreditasi.

3. **Negara yang menerapkan EITI membuat Kerangka Acuan (TOR).** Kerangka Acuan (TOR) untuk proses validasi dikembangkan oleh negara yang menerapkan EITI dan disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder*. Sekretariat Internasional EITI akan menyediakan contoh TOR, yang mengacu pada praktek internasional. Metodologi dan alat indikator penilaian, seperti ditetapkan dalam panduan Validasi, harus ditaati. Namun, negara yang menerapkan EITI bisa menyesuaikan TOR dengan variasi lokal. Variasi dalam contoh TOR akan dinilai oleh Sekretariat Internasional EITI (lihat bagian 5). Pemangku kepentingan yang memiliki kekhawatiran dan pertanyaan mengenai Kerangka Acuan bisa menghubungi Sekretariat Internasional EITI, yang akan merujuk pertanyaan kepada Dewan EITI, seperti yang dijanjikan (lihat bagian 6).

Merupakan kepentingan semua pihak bahwa Kerangka Acuan harus memberikan gambaran yang jelas dan tidak ambigu mengenai cakupan Validasi EITI yang berlaku di suatu negara. Hal ini mencakup latar belakang informasi mengenai partisipasi negara dalam EITI (termasuk proses inisiasi dan langkah-langkah

utama), rincian lembaga, perusahaan dan pemangku kepentingan yang berpartisipasi, dan komentar tentang peristiwa terkini serta perkembangan yang relevan dengan proses Validasi. TOR juga harus memasukkan rencana kerja EITI dalam bentuk lampiran dan informasi terbaru mengenai status pelaporan, paparan dan audit perusahaan.

Kerangka Acuan harus secara jelas menentukan batas waktu proses Validasi, *deliverables* serta proses pengkajian dan masukan untuk draft Laporan Validasi. TOR harus memberi kuasa kepada validator untuk mendokumentasikan pembelajaran yang didapat, beberapa perhatian yang disampaikan serta rekomendasi untuk penerapan EITI di masa yang akan datang.

4. **Pengadaan dan Kontrak Validator oleh negara yang menerapkan EITI.** Negara yang menerapkan EITI harus melakukan pengadaan validator EITI yang diambil dari daftar organisasi dan individu yang terakreditasi dan telah disetujui sebelumnya oleh Dewan EITI melalui Sekretariat Internasional. Setelah proses tender internasional yang kompetitif, termasuk melalui Jurnal Resmi Uni Eropa (OJEU) dan UK Department for International Development (DFID), mewakili Sekretariat Internasional EITI, serta dipimpin oleh sebuah komite yang terdiri dari Dewan EITI (Komite Validasi⁶), tujuh perusahaan dan kemitraan telah diakreditasi untuk melakukan validasi. Atas kebijakan Dewan EITI, melalui Sekretariat Internasional EITI, daftar validator bisa ditambah dan dimodifikasi, sesuai dengan permintaan untuk layanan validasi.

Negara yang menerapkan EITI akan memilih metode yang paling sesuai untuk pengadaan dan kontrak validator yang terakreditasi. Sekretariat Internasional EITI merekomendasikan proses tender yang kompetitif dan terbuka bagi semua validator yang terakreditasi. Praktek terbaik menurut standar internasional mencakup berbagai prosedur, antara lain seleksi berbasis kualitas dan biaya (QCBS), seleksi berbasis kualitas (QBS), seleksi berbasis anggaran tetap (FBS), seleksi berbasis biaya rendah (LCS), seleksi berbasis kualifikasi Konsultan (CQS) dan penunjukan langsung (SSS).

Independensi validator merupakan hal yang sangat penting, sehingga proses pengadaan harus mencakup ketentuan yang tepat untuk mengatasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Proses pengadaan (termasuk kriteria seleksi dan pembobotan penilaian proposal yang diajukan) harus disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder*. Salah satu pilihan adalah dengan membentuk subkomite dari kelompok *multi-stakeholder* untuk mengawasi proses pengadaan.

⁶ Terdiri dari: Karina Litvack (F&C), Graham Baxter (BP – digantikan oleh Mike Wilkinson, Shell); Gavin Hayman (Global Witness), John Strongman (WB – digantikan oleh Anwar Ravat, WB); Fidele Ntissi (Government of Gabon).

Kontrak untuk proses Validasi akan terjadi antara negara yang menerapkan EITI (lembaga pemerintah, atau kelompok *multi-stakeholder*) dan salah satu dari validator yang disetujui.

- 5. Jaminan Kualitas oleh Dewan EITI.** Dewan EITI, melalui Sekretariat Internasional EITI, harus meninjau proses pengadaan, Kerangka Acuan validator dan kontrak sebelum inisiasi penugasan Validasi. Dalam melakukan peninjauan, Dewan EITI akan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) kualitas dan transparansi selama proses pengadaan;
- b) keterlibatan kelompok *multi-stakeholder*;
- c) penanganan konflik kepentingan;
- d) Kerangka Acuan yang sejalan dengan tujuan Validasi dan metodologi yang ditetapkan dalam panduan Validasi;
- e) koherensi proposal teknis dan keuangan dari validator;
- f) ketentuan kontrak antara negara yang menerapkan EITI dan validator.

Pemangku kepentingan yang mempunyai keluhan dengan pengadaan validator, Kerangka Acuan atau kontrak, bisa menghubungi Sekretariat Internasional EITI, yang akan merujuk keluhan tersebut kepada Dewan EITI seperti yang dijanjikan. Apabila Dewan, melalui Sekretariat Internasional EITI, memiliki kekhawatiran mengenai proses pengadaan atau kontrak validator, hal ini akan dikomunikasikan secara tertulis termasuk merekomendasikan tindakan perbaikan dan modifikasi. Setelah masalah ini ditangani, Sekretariat Internasional EITI akan mengeluarkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan atas validasi. Salinan dari kontrak yang sudah ditandatangani harus diteruskan ke Sekretariat Internasional EITI.

- 6. Pengawasan EITI dalam Proses Validasi.** Sekretariat Internasional EITI, sebagai perwakilan dari Dewan EITI, akan mengawasi jalannya proses Validasi. Dengan panduan Validasi, Sekretariat Internasional akan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan validator yang terakreditasi. MoU akan memperjelas tanggung jawab dan kewajiban validator kepada Dewan EITI dan Sekretariat Internasional. Hal ini mencakup pedoman seperti:

- a) memastikan komunikasi yang kuat dan efisien dalam pertukaran informasi antara Sekretariat Internasional EITI dengan validator selama proses Validasi;
- b) melaporkan semua kesulitan dan penyimpangan yang terjadi selama proses Validasi;
- c) membuat mekanisme penyelesaian sengketa.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #3

KEPUTUSAN DEWAN EITI DALAM MENENTUKAN STATUS NEGARA YANG MENERAPKAN EITI

Disetujui oleh Dewan EITI pada tanggal 27 Mei 2008

Edisi revisi disetujui oleh Dewan EITI pada tanggal 16 Februari 2011

Pembukaan

Dewan EITI menetapkan tenggat waktu untuk laporan, Validasi dan kepatuhan bagi semua negara yang menerapkan EITI. Catatan Kebijakan ini menetapkan peraturan yang berkaitan dengan tenggat waktu tersebut. Untuk keputusan yang berkaitan dengan penerapan aturan ini, Dewan menempatkan prioritas terhadap kebutuhan akan perlakuan yang setara antar negara dan kebutuhan untuk melindungi integritas nama EITI.

Tenggat Waktu bagi Negara Kandidat

Negara Kandidat diharuskan untuk menerbitkan laporan EITI mereka yang pertama dalam jangka waktu satu tahun dan enam bulan setelah menjadi Kandidat dan mengumpulkan laporan Validasi akhir (yang disetujui oleh MSG) kepada Dewan dalam waktu dua tahun dan enam bulan setelah menjadi Kandidat. Apabila negara tersebut gagal memenuhi tenggat waktu, maka akan dihapus dari daftar.

Negara bisa mengajukan perpanjangan waktu apabila tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan diatas. Permohonan ini harus dibuat sebelum tenggat waktu berakhir dan disetujui oleh MSG. Dewan hanya akan menyetujui perpanjangan apabila MSG bisa menunjukkan bahwa negara tersebut telah mengalami kemajuan dalam memenuhi tenggat waktu dan meminta perpanjangan karena keadaan tertentu. Keadaan ini harus dijelaskan dalam permohonan.

Apabila diberikan perpanjangan, dalam kasus apapun, negara boleh tetap menjadi Kandidat selama tidak lebih dari 3 tahun dan 6 bulan sejak negara tersebut diakui sebagai Kandidat oleh Dewan (ini merupakan “periode pencalonan maksimal”). Jangka waktu dari semua perpanjangan yang diberikan akan diperhitungkan dalam periode pencalonan maksimal. Negara Calon yang tidak bisa mencapai status patuh dalam periode pencalonan maksimal akan dihapus dari daftar. Waktu yang dibutuhkan Dewan untuk mengkaji laporan Validasi akhir tidak dihitung sebagai bagian dari periode maksimal pencalonan. Tidak ada perpanjangan yang akan diberikan untuk meningkatkan periode maksimal pencalonan.

Menentukan status negara yang menerapkan EITI setelah Validasi

Ketika Validasi memverifikasi bahwa negara Kandidat telah memenuhi semua persyaratan, Dewan akan menetapkan negara tersebut sebagai negara patuh EITI.

Negara ini diharuskan untuk melakukan Validasi setiap lima tahun. Pemangku kepentingan bisa mengusulkan Validasi baru lebih awal apabila mereka menganggap proses tersebut perlu ditinjau kembali. Permintaan ini bisa dimediasi (apabila diperlukan) melalui perwakilan konstituen perwakilan pemangku kepentingan di Dewan. Dewan akan mengkaji situasinya dan mengeluarkan kebijakan, apakah mengharuskan negara patuh EITI untuk melakukan Validasi baru lebih awal dengan menempatkan prioritas pada kebutuhan untuk menjaga integritas EITI. Apabila suatu negara sudah menjadi negara patuh EITI, namun timbul kekhawatiran apakah penerapan EITI jauh dibawah standar, maka Dewan berhak untuk meminta negara menjalankan Validasi baru agar negara tersebut tidak dihapus dari daftar EITI.

Sesuai dengan Persyaratan 21, negara patuh EITI juga diharuskan untuk menerbitkan laporan publik setiap tahun yang memberi rincian mengenai kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan EITI dan perkembangan dalam menerapkan rekomendasi dari validator. Laporan tahunan harus disetujui oleh kelompok *multi-stakeholder* dan harus menjabarkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperkuat penerapan EITI, termasuk tindakan yang diambil untuk merinci dan memperluas cakupan pelaporan EITI. Apabila negara patuh EITI gagal untuk memenuhi persyaratan ini, Dewan bisa meminta Validasi baru.

Apabila negara Kandidat telah mengumpulkan Laporan Validasi akhir dalam waktu 2,5 tahun, tetapi Validasi menunjukkan bahwa tidak ada perkembangan berarti untuk mencapai status Patuh EITI, dan hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan itikad baik untuk menerapkan EITI sesuai dengan Prinsip dan Kriteria EITI, maka Dewan akan menghapus negara tersebut dari daftar negara Kandidat.

Untuk melihat “perkembangan yang berarti” Dewan akan mempertimbangkan:

1. Proses EITI – terutama fungsi kelompok *multi-stakeholder* serta komitmen yang jelas dan kuat dari pemerintah;
2. Status pelaporan EITI. Dewan akan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam memenuhi persyaratan untuk pelaporan rutin dan tepat waktu sesuai dengan Persyaratan 5(e).

Prosedur berikut ini berlaku apabila negara Kandidat menyampaikan Laporan Validasi akhir dalam waktu 2.5 tahun yang tidak menunjukkan bukti kepatuhan terhadap EITI tetapi menunjukkan kepada Dewan EITI bahwa telah terjadi kemajuan yang berarti sesuai dengan standar yang ditetapkan diatas. Dewan akan menetapkan tindakan perbaikan yang harus diselesaikan oleh negara agar bisa mencapai tingkat patuh yang dilihat dari temuan pada Validasi. Dewan akan mengizinkan negara tersebut mempertahankan status Kandidat selama periode yang setara dengan periode pencalonan maksimal, dikurangi waktu yang telah dihabiskan sebagai Kandidat. MSG harus setuju dan mempublikasikan rencana kerja dengan

mencantumkan jadwal untuk pelaksanaan tindakan perbaikan, termasuk Validasi kedua yang harus dilaksanakan setelah tindakan perbaikan selesai dilakukan. Laporan Validasi akhir (disetujui MSG) dari Validasi kedua harus disampaikan kepada Dewan sebelum periode maksimal pencalonan berakhir. Jika Validasi kedua memverifikasi bahwa negara Kandidat telah memenuhi semua persyaratan, Dewan akan menetapkan negara tersebut sebagai negara patuh EITI. Akan tetapi, apabila negara gagal dalam menyampaikan Validasi kedua dalam tenggat waktu yang ditentukan, negara tersebut akan dihapuskan dari daftar.

MSG bisa meminta penangguhan terhadap persyaratan untuk menjalankan Validasi kedua apabila tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kepatuhan tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secepatnya. Jika Dewan menganggap bahwa Validasi kedua tidak diperlukan untuk menentukan apakah negara telah mencapai tingkat patuh, maka Dewan akan menangguhkan persyaratan untuk Validasi kedua dan meminta Sekretariat Internasional EITI untuk menyiapkan penilaian bagi Dewan. Permohonan penangguhan harus disampaikan sebelum periode maksimal pencalonan suatu negara berakhir dan negara harus siap untuk melakukan Validasi jika permohonan penangguhan ditolak. Dewan tidak akan memberikan penangguhan kecuali mereka yakin bahwa penilaian dari Sekretariat Internasional EITI dilakukan dengan cepat dan obyektif.

Formatted: Indonesian

Proses Banding

Negara yang menerapkan EITI – melalui kelompok *multi-stakeholder* – bisa mengeluarkan petisi setiap saat kepada Dewan EITI untuk mengkaji keputusan Dewan mengenai penunjukan negara sebagai Kandidat atau negara patuh EITI. Dewan akan mempertimbangkan petisi ini dengan mengacu kepada fakta-fakta kasus, kebutuhan untuk menjaga integritas EITI dan prinsip perlakuan yang sama antar negara. Keputusan Dewan bersifat final.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #4

VALIDASI KEUANGAN

Disetujui pada pertemuan Dewan EITI yang keenam di Athena, tanggal 29-30 Oktober 2008

Panduan untuk Validasi Keuangan

Laporan dari International Advisory Group (IAG) menyetujui bahwa Konferensi Internasional EITI di Oslo pada tanggal 26 Oktober menetapkan prinsip bahwa “biaya Validasi akan dibayar oleh negara yang divalidasi” (Laporan IAG hal. 6). Prinsip ini ditegaskan kembali oleh Dewan EITI pada pertemuan kedua di Berlin pada April 2007.

Dewan EITI kembali menegaskan pentingnya prinsip ini ditaati. Kemampuan negara yang menerapkan EITI untuk mempertahankan status patuh EITI merupakan faktor penting dalam keberhasilan EITI. Yang juga sangat penting adalah sifat dasar kelompok *multi-stakeholder* ditegaskan sesuai dengan bagaimana pendanaan dilakukan.

Pada saat yang sama, Dewan EITI akan menemukan situasi dimana pemerintah merasa terdorong untuk mencari pendanaan dari luar. Dewan EITI mendesak siapapun yang mempertimbangkan untuk memberi dukungan finansial agar memperhatikan hal berikut:

- Kepemilikan nasional dalam penerapan EITI tidak boleh dirusak sama sekali:
 - Dewan bisa, misalnya, tidak mempertimbangkan keadaan apapun yang memungkinkan dapat menerima kontrak dengan validator untuk dilakukan oleh siapapun selain pemerintah (atau Sekretariat EITI Nasional).
 - Penyandang dana potensial untuk Validasi harus mencari dan mendokumentasikan jaminan kepemilikan pemerintah. Kepemilikan ini bisa saja, misalnya, ditunjukkan melalui komitmen pemerintah untuk membantu mendanai sebagian besar Validasi.
- Prinsip dan Kriteria EITI tidak boleh dirusak:
 - Penyandang dana potensial untuk Validasi harus mencari dan mendokumentasikan konfirmasi dari kelompok *multi-stakeholder* EITI bahwa mereka mendukung penuh rencana perjanjian antara pemerintah dan calon penyandang dana.
- Sekretariat Internasional EITI harus diajak berkonsultasi dalam setiap pengaturan dukungan keuangan yang diajukan untuk Validasi.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #5

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR NEGARA YANG MENERAPKAN EITI

Awalnya disetujui oleh Dewan EITI pada 17 Desember 2009

Versi revisi disetujui oleh Dewan EITI pada 16 Februari 2011

Pengantar

Catatan kebijakan ini menetapkan prosedur tentang bagaimana dewan EITI, dalam menggunakan mandat yang diberikan oleh Anggaran Dasar Asosiasi EITI,⁷ penyelesaian berupa penghentian sementara atau penghapusan suatu negara dari daftar negara yang menerapkan EITI. Negara yang menerapkan EITI telah menyetujui untuk mematuhi Prinsip dan Kriteria EITI. Jika secara jelas terlihat bahwa Prinsip dan Kriteria EITI tidak merupakan aspek signifikan yang dijadikan pedoman dan dijunjung tinggi oleh negara yang menerapkan EITI, maka Dewan EITI dapat melakukan penghentian sementara atau menghapus status negara itu. Dewan EITI juga dapat menghentikan secara sementara dan menghapus status negara-negara yang tidak dapat mempublikasikan Laporan EITI secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan Persyaratan 5(e).

suspension

Status penghentian terhadap negara yang menerapkan EITI hanya bersifat sementara. Dewan EITI harus mengatur batas waktu bagi negara yang menerapkan EITI untuk mengatasi pelanggaran terhadap Prinsip dan Kriteria EITI. Jika Dewan EITI puas, langkah koreksi harus diambil pada periode tersebut, dan status penghentian akan dicabut. Jika masalah tersebut tidak dapat terpecahkan sesuai keinginan Dewan EITI dalam batas waktu yang sudah ditentukan, negara tersebut akan dihapus dari EITI.

Latar belakang

Asosiasi EITI didirikan untuk menjadikan Prinsip dan Kriteria EITI⁸ diterima sebagai standar secara internasional untuk transparansi di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Dewan EITI memiliki mandat untuk mempertimbangkan isu umum dan spesifik yang mempengaruhi Asosiasi EITI (Anggaran Dasar Asosiasi, Pasal 13(1)(i)), termasuk menciptakan prosedur terkait dengan proses Validasi EITI, seperti keluhan, penyelesaian perselisihan, dan pertanyaan dari Negara yang dihapus (Anggaran Dasar – Pasal 13(1)(ix)).

Prinsip EITI “menegaskan bahwa manajemen kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan warga negara adalah domain negara-negara berdaulat yang dilaksanakan untuk kepentingan perkembangan negaranya” (Prinsip 2). Prinsip EITI juga menyatakan bahwa “semua pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang

⁷ Negara yang menerapkan EITI adalah "negara yang telah diklasifikasikan oleh Dewan EITI baik sebagai negara Kandidat atau Patuh" (Pasal 5 (2) (i) dari Anggaran Dasar)

⁸ Lihat halaman 9 dan 10 dari Peraturan EITI, termasuk Panduan Validasi

penting dan relevan dalam membuat – termasuk pemerintah dan institusinya, perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi keuangan, investor, dan NGO”. Kriteria 5 EITI mensyaratkan bahwa “Masyarakat sipil aktif berperan serta sebagai partisipan dalam desain, pengawasan, dan evaluasi proses ini dan berkontribusi menuju debat publik”. Kriteria EITI dan Prinsip EITI juga merupakan tolok ukur penting untuk negara yang menerapkan EITI dalam hubungannya dengan isu penghentian sementara dan penghapusan dari daftar.

Penghentian sementara dan penghapusan dari daftar negara yang menerapkan EITI

Sebagai kustodian Prinsip dan Kriteria EITI, Dewan menempatkan prioritas terhadap kebutuhan akan perlakuan yang setara antar negara dan kebutuhan untuk melindungi integritas nama EITI.

Jika Dewan EITI merasa bahwa kepatuhan pada Kriteria EITI telah dikompromikan, maka Sekretariat Internasional EITI akan ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi tersebut dan mengirimkan laporan pada Dewan EITI.

Jika terbukti jelas bahwa Prinsip dan Kriteria EITI bukan aspek signifikan yang dijadikan pedoman oleh negara menerapkan EITI, Dewan EITI dapat menghentikan sementara atau menghapus status negara tersebut.

Dewan EITI juga dapat menghentikan sementara dan menghapus status negara-negara yang tidak dapat mempublikasikan Laporan EITI secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan Persyaratan 5(e).

Penghentian Sementara

Penghentian negara yang menerapkan EITI adalah mekanisme sementara. Dewan EITI akan menetapkan batasan waktu bagi negara yang menerapkan EITI untuk menyelesaikan pelanggaran atas Prinsip dan Kriteria EITI. Jika Dewan EITI puas dengan tindakan korektif yang harus dilakukan pada periode tersebut, maka penghentian akan dicabut.

Negara yang dikenakan penghentian sementara akan disebut “Negara Kandidat (diberhentikan sementara)” atau “Negara Patuh (diberhentikan sementara)” selama masa penghentian, dengan status tersebut yang dapat dilihat jelas pada Website EITI dan di tempat lainnya.

Jika Dewan EITI melihat permasalahan ini tidak diselesaikan pada batas waktu yang ditentukan, maka negara itu akan dihapus dari daftar, yaitu kehilangan status sebagai negara yang menerapkan EITI.

Penghentian sementara tidak mengubah laporan atau batas akhir validasi, kecuali Dewan EITI menyetujui penambahan waktu. Dewan tidak akan menyetujui dimulainya Validasi selama periode penghentian. Pada semua langkah dalam proses,

Dewan EITI akan memastikan keinginan dan keputusannya dikomunikasikan jelas dengan negara yang menerapkan EITI.

Penghentian sementara sukarela

Negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau konflik luar biasa dapat mengajukan penghentian sukarela sampai dengan satu tahun. Pemerintah harus mengajukannya ke Sekretariat Internasional EITI, yang kemudian akan memasukkan aplikasi kepada Dewan EITI untuk diambil keputusan. Aplikasi pemerintah harus memperhatikan pandangan dari Kelompok *Multi-stakeholder* (MSG) EITI. Negara yang dikenakan penghentian sementara akan disebut “Negara Kandidat (diberhentikan sementara)” atau “Negara Patuh (diberhentikan sementara)” selama masa penghentian, dengan status diberhentikan sementara tersebut yang dapat dilihat jelas pada Website EITI dan di tempat lainnya.

Pemerintah dapat mengajukan pencabutan penghentian kapan saja. Pengajuan tersebut harus mendokumentasikan langkah-langkah yang disetujui oleh pemangku kepentingan untuk memulai ulang penerapan dan proses validasi EITI, serta langkah kerja untuk mencapai kepatuhan. Pemerintah harus mengajukan aplikasi untuk mencabut penghentian sukarela pada Sekretariat Internasional EITI. Sekretariat akan mengirimkan aplikasi kepada Dewan EITI untuk pengambilan keputusan. Dewan EITI akan mempertimbangkan penetapan batas waktu laporan dan batas waktu validasi yang tepat. Dewan tidak akan memberikan persetujuan untuk dimulainya validasi selama periode penghentian.

Jika penghentian dikenakan lebih dari satu tahun, Dewan EITI akan mempertimbangkan apakah negara tersebut akan dihapus dari daftar.

Penghapusan dari daftar

Jika negara yang menerapkan EITI dikenakan penghentian sukarela atau penghentian sementara, dan Dewan EITI tidak melihat permasalahan tersebut dapat diselesaikan, yang merupakan syarat agar penghentian tersebut dicabut, maka negara tersebut akan dihapus dari daftar, yaitu kehilangan status sebagai negara yang menerapkan EITI. Penghapusan juga dapat terjadi jika negara yang menerapkan tidak memenuhi persyaratan validasi yang ditetapkan pada Catatan Kebijakan #3, atau persyaratan pelaporan seperti yang ditetapkan pada Persyaratan 5(e).

Negara yang dihapus dari daftar dapat mengajukan kembali pendaftaran sebagai Negara Kandidat EITI kapan saja. Dewan EITI akan melaksanakan prosedur yang telah disepakati dalam melakukan penilaian atas aplikasi yang diajukan Kandidat. Dewan juga akan menilai pengalaman sebelumnya dalam penerapan EITI, termasuk hambatan sebelumnya dalam melaksanakan penerapan yang efektif serta langkah perbaikan yang telah dilaksanakan.

Keluhan dan banding

Negara yang menerapkan EITI dapat mengajukan keberatan dalam bentuk petisi pada Dewan EITI atas keputusan terkait penghentian sementara atau penghapusan dari daftar. Dewan EITI akan mempertimbangkan petisi semacam itu dengan pertimbangan fakta dari kasus tersebut, pentingnya menjaga integritas nama EITI dan prinsip perlakuan yang konsisten antar negara.

Negara yang berkeberatan dapat, sebelum periode pemberitahuan di bawah Pasal 8 dari Anggaran Dasar, mengajukan banding terhadap keputusan yang dibuat Dewan EITI sesuai dengan paragraf pertama pada Rapat Anggota biasa berikutnya.

CATATAN KEBIJAKAN EITI #6

PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL

Disetujui oleh Dewan EITI pada 16 February 2011

Catatan kebijakan ini mengandung rekomendasi tentang keterlibatan masyarakat sipil pada EITI, mengambil pelajaran dari penerapan di tingkat nasional. Negara yang menerapkan EITI dan yang mendaftar EITI telah berkomitmen untuk memegang teguh Persyaratan EITI, termasuk dengan memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Untuk itu, Dewan EITI melihat dalam perannya untuk memastikan persyaratan berkaitan dengan partisipasi masyarakat sipil dipenuhi.

Prinsip EITI 2 menegaskan bahwa “manajemen kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan warga negara berada dalam wewenang pemerintah berdaulat yang dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan negaranya”.

Prinsip EITI 12 menekankan bahwa “Seluruh pemangku kepentingan memiliki kontribusi penting dan relevan dalam meningkatkan standar dan Prinsip EITI”

Kriteria EITI 5 mensyaratkan bahwa “Masyarakat sipil terlibat aktif sebagai partisipan pada desain, pengawasan, dan evaluasi proses ini dan berkontribusi pada debat publik”.

Persyaratan 6 memerintahkan pemerintah “...memastikan bahwa masyarakat sipil terlibat dalam proses ini secara penuh, independen, aktif dan efektif.”

Peran Masyarakat Sipil

Prinsip dan Kriteria ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat sipil yang bebas, penuh, independen, aktif dan efektif (yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat sipil). Organisasi masyarakat sipil adalah pemain penting dalam debat publik tentang EITI dan isu yang berkaitan dengan transparansi. Upaya ini penting dan melengkapi upaya lain yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya. Walaupun beberapa negara mungkin menerapkan EITI dengan keterlibatan masyarakat sipil yang terbatas, pertimbangan yang memadai harus diberikan mengingat fakta bahwa keterlibatan masyarakat sipil sangat kritis dalam semua tingkatan proses EITI.

Dalam suatu negara yang menerapkan EITI, pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk melaksanakan proses EITI melalui kelompok *multi-stakeholder*. Kelompok *multi-stakeholder* mencerminkan struktur Dewan Internasional EITI, yaitu semua pemangku kepentingan yang relevan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana EITI harus dikelola.

Pelajaran yang Dipetik

EITI telah mendapati banyak hambatan dan batasan yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat sipil dalam EITI, termasuk tindakan yang membatasi debat publik tentang transparansi pendapatan dan bagaimana pendapatan dari sumber daya digunakan.

Dewan telah mencari cara mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyiapkan berbagai respon, termasuk mendirikan Komite Respon Cepat untuk menangani kasus ancaman atau kekerasan terhadap perwakilan masyarakat sipil.

Sebagai tambahan, Dewan juga mendirikan Kelompok Kerja untuk Partisipasi Masyarakat Sipil untuk memberikan arahan tambahan tentang keterlibatan masyarakat sipil dalam EITI.

Di beberapa kasus, pemerintah berargumen bahwa pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil tidak berhubungan dengan keterlibatannya dalam EITI. Inilah yang telah disebutkan sebagai “dilema hubungan”, yang berarti akan sulit untuk mendefinisikan sejauh mana dan batasan tindakan tertentu oleh pemangku kepentingan yang berkaitan langsung pada dan telah mencederai penerapan EITI. Namun, seperti yang telah dituliskan, ruang untuk keterlibatan masyarakat sipil, adalah resep penting agar proses EITI dapat bekerja.

Permasalahan fundamental yang diperoleh sampai saat ini termasuk hal berikut:⁹

- Kekerasan dan intimidasi terhadap perwakilan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam penerapan EITI.
- Penolakan izin bepergian yang diajukan masyarakat sipil untuk menghadiri rapat terkait.
- Hambatan Undang-undang, administratif, prosedural dan hambatan lain terkait registrasi dan operasional masyarakat sipil independen.
- Pembatasan terhadap kebebasan untuk memilih perwakilan masyarakat sipil
- Penyertaan diantara perwakilan “masyarakat sipil” dengan anggota parlemen dari partai berkuasa atau partai politik lain yang ikut dalam pemerintah, melanggar prinsip dasar yang tertera pada Persyaratan 6.
- Keterbatasan kapasitas dan sumber daya

Sejauh ini, Dewan EITI sering menghadapi isu berkaitan partisipasi perwakilan masyarakat sipil negara yang menerapkan EITI tanpa bermaksud menghakimi setiap kasus secara detail. Tetapi, Dewan EITI, melalui, Komite Respon Cepat telah secara umum mengambil pendekatan berikut:

- Menekankan ulang pentingnya kepatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan Peraturan EITI; dan
- menegaskan bahwa Prinsip, Kriteria, dan Peraturan ini mungkin belum ditaati.

⁹ Daftar kasus-kasus individu yang telah ditangani oleh Dewan EITI tersedia dalam Makalah Sekretariat berjudul 'Ulasan Hambatan dan Kendala terhadap Partisipasi Masyarakat Sipil'.

Tindakan spesifik Dewan EITI bervariasi dari diplomasi secara personal dan publik hingga kunjungan negara dan rekomendasi untuk penghentian sukarela dari EITI, dengan pertimbangan fakta bahwa tanggung jawab penerapan EITI selalu berada pada pemerintah negara, dengan kolaborasi dengan kelompok *multi-stakeholder*. Tindakan Dewan EITI secara umum memperkuat penerapan EITI dan harus dianggap sebagai pelengkap dari upaya pemangku kepentingan EITI lainnya.

Memperkuat partisipasi masyarakat sipil

Sebagai kustodian atas Prinsip dan Kriteria EITI, Dewan EITI menempatkan pentingnya memastikan organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam desain, pengawasan, dan evaluasi EITI, bersama pemangku kepentingan penting lainnya.

Komitmen pemerintah bekerjasama dengan masyarakat sipil

Kriteria EITI mensyaratkan pemerintah negara berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam penerapan EITI. Negara harus mengatasi hambatan pada tingkat awal keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penerapan. Secara khusus, mereka harus memastikan bahwa kondisi telah memadai bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil.

Isu yang dipermasalahkan bisa termasuk hukum ataupun peraturan yang menghambat kemampuan masyarakat sipil untuk bebas dan aktif berpartisipasi dalam penerapan EITI, dan apakah perwakilan masyarakat sipil yang terlibat secara substansial dalam proses EITI menerima hak-hak fundamental yang dikenal secara internasional yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Keterlibatan kelompok *multi-stakeholder* nasional

Pemangku kepentingan masyarakat sipil telah melaporkan kesulitan pada beberapa proses dalam negeri dalam menentukan bagaimana perwakilan kelompok masyarakat sipil terwakili. Mengizinkan masyarakat sipil untuk menunjuk sendiri perwakilannya pada kelompok *multi-stakeholder*, dan memastikan bahwa mereka independen secara operasional dan dalam hal kebijakan, dari pemerintah, perusahaan, dan parlemen, adalah penting untuk menjamin kepentingan pemangku kepentingan masyarakat sipil dihargai.

Mengatasi masalah kapasitas

Pengembangan kapasitas untuk masyarakat sipil mungkin saja diperlukan untuk memastikan peran aktif mereka dalam penerapan EITI. Perhatian yang cukup harus diberikan untuk memitigasi dampak dari kendala teknis dan finansial dalam partisipasi masyarakat sipil yang memadai, termasuk dengan memfasilitasi akses mereka terhadap pelatihan dan sumberdaya terhadap masalah yang relevan dengan partisipasi dalam EITI.

Keamanan perwakilan masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI

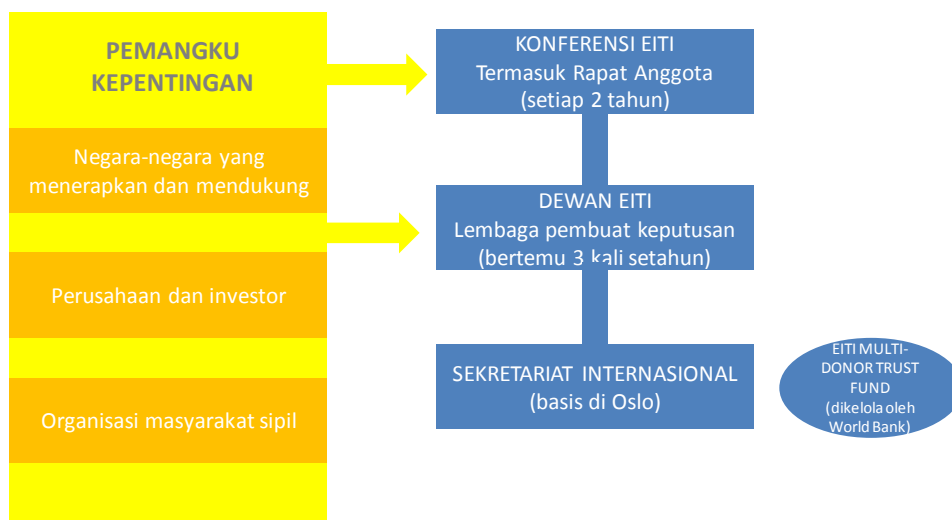
Sementara tuduhan atau laporan potensi ataupun kekerasan nyata yang dialami perwakilan masyarakat sipil di negara yang menerapkan EITI penting untuk diutamakan penyelesaiannya oleh kelompok *multi-stakeholder* nasional, Dewan EITI dapat diminta untuk menginvestigasi kasus tertentu dan menyelesaikan penyelewengan Kriteria dan Prinsip EITI secara tepat.

6 TATA KELOLA, MANAJEMEN, DAN ADMINISTRASI EITI

EITI telah berevolusi dari sebuah ide menjadi inisiatif dengan peraturan dan prosedur detail. Tata kelola EITI sendiri telah juga telah berkembang: menindaklanjuti laporan Grup Penasehat Internasional pada Konferensi Dunia di Oslo 2006, Dewan Internasional EITI dan Sekretariat Internasional EITI didirikan. Sejak 2006, Dewan Internasional EITI telah menyempurnakan lebih lanjut strukturnya dan mengajukan struktur Asosiasi EITI saat ini sebagai organisasi non-profit di bawah undang-undang Norwegia, diubah untuk mengikuti negara-negara anggota dan pendukung. Sebagai hasilnya, sebuah Asosiasi EITI baru dan telah diperluas siap untuk ditetapkan pada Konferensi DOHA pada Februari 2009.

Tatanan baru tersebut memungkinkan EITI terus mengadakan konferensi dunia setiap dua tahun, mengumpulkan bersama semua pemangku kepentingan. Bersamaan konferensi ini, Rapat Anggota yang lebih kecil dengan tiga grup konstituen – negara-negara (yang menerapkan dan pendukung), perusahaan (termasuk investor institusional), dan organisasi masyarakat sipil – akan diadakan, dengan semua grup secara terwakili secara adil. Tugas utama Rapat Anggota adalah menentukan Dewan Internasional EITI untuk dua tahun berikutnya. Pada masa antar konferensi, Dewan Internasional EITI akan tetap mengawasi Inisiatif. Dewan memiliki 20 anggota, dengan konstituen berbeda yang berhak untuk terwakili. Ketuanya, saat ini Peter Eigen, harus independen. Semua negara yang menerapkan EITI dan negara pendukung berhak menjadi anggota Asosiasi EITI. Adalah hak konstituen terkait untuk membuat kesepakatan diantara mereka mengenai keanggotaan mereka dalam Asosiasi dan siapa yang akan mereka nominasikan untuk duduk di Dewan.

Sekretariat Internasional EITI akan terus beroperasi sebagai organisasi non-profit di bawah undang-undang Norwegia, saat ini sebagai bagian Asosiasi baru.



6.1 ANGGARAN DASAR DIPUTUSKAN 16 FEBRUARY 2009¹⁰

Anggaran Dasar Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI)

Pasal 1	Nama
Pasal 2	Latar belakang dan tujuan
Pasal 3	Badan Hukum, Pembatasan Tanggung Jawab
Pasal 4	Organisasi
Pasal 5	Keanggotan dan Konstituen
Pasal 6	Biaya Pendaftaran
Pasal 7	Konferensi EITI
Pasal 8	Rapat Anggota EITI
Pasal 9	Fungsi Rapat Anggota EITI
Pasal 10	Dewan EITI
Pasal 11	Pengamat EITI
Pasal 12	Ketua EITI
Pasal 13	Fungsi Dewan EITI
Pasal 14	Komite Dewan EITI
Pasal 15	Operasional dan Cara Kerja Dewan EITI
Pasal 16	Sekretariat EITI
Pasal 17	Kepala Sekretariat EITI
Pasal 18	Pendanaan
Pasal 19	Akun, Manajemen Dana dan Pembayaran EITI
Pasal 20	Amandemen
Pasal 21	Tinjauan
Pasal 22	Pembatalan dan Pembubaran
Pasal 23	Awal Masa Berlaku
Lampiran A	Prinsip EITI
Lampiran B	Kriteria EITI
Lampiran C	Panduan Validasi EITI
Lampiran D	Nota Kesepahaman (MOU) dengan Bank Dunia tentang Dana Perwalian Multi-Donor EITI
Lampiran E	Penggunaan logo EITI
Lampiran F	Draft Pedoman Konstituen EITI, Sekretariat Internasional EITI, 20 January 2009

¹⁰ Pasal 5 (6), 8 (9) dan 15 (3) diubah oleh Rapat Anggota EITI pada tanggal 1 Maret 2011.

PASAL 1 NAMA

- 1) Nama asosiasi adalah “Asosiasi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif” (selanjutnya disebut sebagai “Asosiasi EITI”)

PASAL 2 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

- 1) Asosiasi EITI adalah insiatif multi-stakeholder internasional dengan partisipasi dari perwakilan pemerintah dan agennya; perusahaan minyak, gas, dan pertambangan; perusahaan manajemen aset dan dana pensiun (selanjutnya disebut “investor institusional”) dan kelompok masyarakat sipil lokal dan organisasi non-pemerintah internasional
- 2) Tujuan Asosiasi EITI adalah membuat Prinsip EITI (Lampiran A) dan Kriteria EITI (Lampiran B) sebagai standar yang diterima secara internasional untuk transparansi di sektor minyak, gas, dan pertambangan, melihat bahwa penguatan transparansi pendapatan sumber daya alam dapat mengurangi korupsi, dan pendapatan dari industri ekstraktif dapat mengubah ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar kehidupan dari seluruh populasi di negara kaya sumber daya.

PASAL 3 BADAN HUKUM, PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Asosiasi EITI adalah asosiasi non-profit diorganisir di bawah hukum Norwegia (“forening”).
- 2) Anggota Asosiasi EITI tidak akan bertanggung jawab secara individual maupun kolektif terhadap utang, liabilitas, ataupun kewajiban Asosiasi EITI

PASAL 4 ORGANISASI

- 1) Badan kelembagaan permanen Asosiasi EITI adalah:
 - i. Rapat Anggota EITI, yang diadakan terkait dengan Konferensi EITI;
 - ii. Dewan EITI yang dipimpin oleh Ketua EITI;
 - iii. Sekretariat EITI yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- 2) Dewan EITI dapat membuat komite-komite sesuai dengan Pasal 14.

PASAL 5 KEANGGOTAAN DAN KONSTITUEN

- 1) Anggota Asosiasi EITI adalah perwakilan personal dari negara, perusahaan, organisasi ataupun entitas legal yang ditunjuk oleh sebuah Konstituen sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 (2) dan (3).
- 2) Anggota-anggota tersebut diorganisir dalam 3 Konstituen yaitu:
 - i. Konstituen Negara-negara, yang berisikan:
 - a) Negara-negara yang menerapkan EITI yang telah diklasifikasi oleh Dewan EITI sebagai Negara Kandidat atau Negara Patuh; dan
 - b) Negara-negara Pendukung, yang berarti negara ataupun kesatuan negara-negara, yang mendukung tujuan Asosiasi EITI.

- ii. Konstituen Perusahaan-perusahaan, yang berisikan:
 - a) Perusahaan dalam sektor ekstraktif yang berkomitmen untuk mendukung tujuan Asosiasi EITI dan asosiasi-asosiasi yang mewakili perusahaan-perusahaan tersebut; dan
 - b) Investor Institusional yang telah berkomitmen untuk mendukung tujuan Asosiasi EITI.
 - iii. Konstituen Organisasi Masyarakat Sipil, yang berisikan organisasi non-pemerintah, jaringan aksi global ataupun koalisi yang mendukung tujuan Asosiasi EITI.
- 3) Setiap Konstituen memutuskan aturan yang mengatur pengangkatan Anggota Asosiasi EITI. Keanggotaan harus terbatas pada hal berikut:
- i. Dari Konstituen Negara, maksimal satu perwakilan untuk tiap Negara yang menerapkan EITI dan tiap Negara Pendukung (atau serikatnya);
 - ii. Dari Konstituen Perusahaan, maksimal satu perwakilan untuk tiap perusahaan, dan asosiasi yang mewakilinya, dan maksimal lima perwakilan dari Investor Institusional;
 - iii. Dari Konstituen Organisasi Masyarakat Sipil, maksimal satu perwakilan tiap Organisasi Masyarakat Sipil.
- 4) Konstituen dapat kapan saja mengganti Anggota yang ditunjuknya. Konstituen harus memberitahu Sekretariat EITI tentang Anggotanya setiap saat.
- 5) Dewan EITI dapat mengakhiri Keanggotaan Anggota Asosiasi EITI jika:
- i. Anggota, atau negara, atau entitas lain yang diwakili oleh Anggota, tidak mematuhi Anggaran Dasar; atau
 - ii. Anggota, atau negara, atau entitas lain yang diwakili oleh Anggota, telah melakukan hal yang dianggap melanggar hukum atau bertolak belakang dengan Prinsip EITI.
- 6) Resolusi Dewan EITI sesuai dengan Pasal 5 (5) dapat diajukan banding oleh setiap Anggota pada Rapat Anggota untuk keputusan akhir.

PASAL 6 BIAYA PENDAFTARAN

- 1) Tidak ada biaya pendaftaran untuk Anggota.

PASAL 7 KONFERENSI EITI

- 1) Konferensi EITI harus dilakukan setiap dua tahun dalam rangka menyediakan forum untuk pemangku kepentingan EITI, yang memiliki kepentingan dalam Asosiasi EITI, untuk memajukan tujuan Asosiasi EITI dan untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam hal kebijakan dan strategi Asosiasi EITI. Ketua EITI akan bertindak sebagai Ketua dalam Konferensi. Konferensi EITI bukan merupakan badan pengurus dalam Asosiasi EITI
- 2) Anggota EITI, Dewan EITI, dan Sekretariat EITI berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Konferensi EITI. Pemangku kepentingan EITI lainnya juga harus

Formatted: Indonesian

diundang sepanjang hal tersebut praktis untuk dapat dilakukan sesuai dengan keputusan Dewan EITI.

- 3) Konferensi EITI akan diumumkan oleh Dewan EITI pada situs EITI dan dengan pemberitahuan tertulis pada Anggota dan Konstituen sekurang-kurangnya empat minggu sebelumnya. Pemberitahuan tertulis mencakup agenda Konferensi EITI.
- 4) Konferensi EITI akan:
 - i. Menyediakan platform penting dan nyata untuk perdebatan, pembelaan, pengumpulan dana berkelanjutan, dan memasukkan pemangku kepentingan EITI baru;
 - ii. Mengkaji perkembangan berdasarkan aktivitas laporan selama periode dua tahun berjalan;
 - iii. Memberikan saran kepada Dewan EITI terkait aktivitas Asosiasi EITI dalam dua tahun berikutnya;
 - iv. Memobilisasi dan mempertahankan koordinasi tingkat tinggi, komitmen politik dan momentum untuk mencapai tujuan Asosiasi EITI; dan
 - v. Menyediakan saluran komunikasi informal untuk pemangku kepentingan EITI yang tidak terwakili secara formal dimanapun pada struktur pengurus Asosiasi EITI.
- 5) Pandangan terhadap isu yang ditetapkan pada Pasal 7 (4) di atas dapat dinyatakan dalam Pernyataan Hasil yang tidak mengikat yang harus disetujui bersama oleh Konferensi EITI dan dikomunikasikan pada Rapat Anggota EITI dan Dewan EITI. Konferensi EITI akan membuat segala upaya untuk mengambil keputusan secara konsensus. Dengan pertimbangan dari pandangan tiap pemangku kepentingan EITI, Ketua EITI dapat memutuskan bahwa pengambilan keputusan melalui voting dibutuhkan. Setiap pemangku kepentingan EITI, kecuali Anggota EITI dalam kapasitas ini dan Sekretariat, memiliki satu suara. Keputusan Konferensi EITI diambil mengikuti suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara.

PASAL 8 RAPAT ANGGOTA EITI

- 1) Badan pengurus dari Asosiasi EITI adalah Rapat Anggota EITI.
- 2) Rapat Anggota EITI berisikan Anggota Asosiasi EITI.
- 3) Rapat Anggota EITI biasa diadakan setiap dua tahun dan terkait dengan Konferensi EITI. Rapat Anggota EITI biasa akan diumumkan oleh Dewan EITI kepada Anggota dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya empat minggu sebelumnya.
- 4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diumumkan oleh Dewan EITI dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tiga minggu sebelumnya. Dewan EITI harus memastikan Rapat Anggota Luar Biasa akan diadakan dalam empat minggu setelah menerima permintaan Ketua EITI untuk mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- 5) Anggota yang ingin ikut serta dalam Rapat Anggota EITI, harus memberitahu Sekretariat EITI pada tanggal yang tertera di pengumuman. Seorang Anggota bisa diwakili oleh wali dengan surat kuasa tertulis. Wali tersebut dapat memiliki hak atas voting dengan instruksi spesifik. Wali yang ditetapkan harus diterima Sekretariat EITI pada tanggal yang tertera di pengumuman.

- 6) Ketua EITI akan bertindak sebagai kepala Rapat Anggota EITI.
- 7) Kuorum Rapat Anggota adalah minimal setengah dari jumlah Anggota dan sekurang-kurangnya harus termasuk sepertiga Anggota dari tiap Konstituen.
- 8) Rapat Anggota harus membuat segala upaya untuk membuat keputusan dengan konsensus. Jika voting dibutuhkan, keputusan yang diambil oleh suara mayoritas harus memenuhi kualifikasi dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari total suara masuk dan harus termasuk dukungan sekurang-kurangnya sepertiga suara masuk dari tiap Anggota perwakilan tiap Konstituen. Jumlah total suara Anggota tiap Konstituen harus setara dan ditentukan sebagai berikut:
 - i. Anggota-anggota Konstituen Negara harus memiliki masing-masing satu suara; dan
 - ii. Suara untuk Anggota-anggota Konstituen Perusahaan dan Konstituen Organisasi Masyarakat Sipil harus ditentukan dengan cara membagi jumlah total suara Negara dengan masing-masing jumlah Anggota Konstituen Perusahaan dan Masyarakat Sipil.
 - iii. Ketua EITI harus mengumumkan jumlah suara untuk masing-masing Anggota dari Konstituen berbeda sebelum voting.

PASAL 9 FUNGSI RAPAT ANGGOTA EITI

- 1) Rapat Anggota EITI akan:
 - i. Menyetujui laporan aktivitas, akun dan rencana aktifitas Dewan EITI;
 - ii. Memilih Anggota, dan Cadangan tiap Anggota dari Dewan EITI, dengan nominasi dari Konstituen;
 - iii. Memilih Ketua EITI, berdasarkan proposal Dewan EITI; dan
 - iv. Mempertimbangkan setiap permasalahan yang berkaitan dengan permintaan dari Anggota. Permintaan seperti itu harus dikirimkan secara tertulis pada Ketua EITI pada waktunya agar permasalahan tersebut dapat diikuti dalam agenda Rapat Anggota EITI yang tertera dalam pengumuman.

PASAL 10 DEWAN EITI

- 1) Badan eksekutif Asosiasi EITI adalah Dewan EITI, dipilih oleh Rapat Anggota EITI dan bekerja dibawah pengarahannya Rapat Anggota EITI.
- 2) Untuk mencerminkan sifat multi-stakeholder dalam Asosiasi EITI, Dewan EITI akan terdiri dari 20 Anggota Dewan EITI ("Anggota Dewan") dan akan terdiri dari:
 - i. Seorang Ketua;
 - ii. 8 Anggota Dewan yang menjadi Anggota Asosiasi EITI dari Konstituesi Negara, dengan maksimum 3 Anggota Dewan harus mewakili Negara Pendukung dan sisanya harus mewakili Negara yang menerapkan EITI. Jika memungkinkan, Negara yang menerapkan EITI harus diwakili oleh setidaknya 3 Negara Patuh.
 - iii. 6 Anggota Dewan yang menjadi Anggota Asosiasi EITI dari Konstituen Perusahaan, dengan maksimum 1 harus mewakili Investor Institusional.
 - iv. 5 Anggota Dewan yang menjadi Anggota Asosiasi EITI dari Konstituen Organisasi Masyarakat Sipil.

Formatted: Indonesian

- 3) Seluruh Anggota Dewan berhenti dengan keputusan dari Rapat Anggota EITI biasa yang diadakan setelah pencalonannya, tetapi dibolehkan untuk pencalonan ulang pada Rapat Anggota EITI.
- 4) Pada kasus kekosongan dalam Dewan EITI antara dua Rapat Anggota, kekosongan ini akan diisi dengan Anggota Dewan Pengganti dari Konstituen Anggota Dewan yang tidak lagi bertugas. Jika tidak ada Pengganti, Konstituen yang relevan dapat mencalonkan Anggota Dewan baru dan Pengganti untuk dipilih oleh Dewan.
- 5) Konstituen dapat mencalonkan, dan Rapat Anggota EITI dapat memilih, satu Anggota Dewan Pengganti (seorang “Pengganti”) untuk tiap Anggota Dewan dari yang dicalonkan oleh Konstituen. Pengganti dapat mewakili Anggota Dewan. Jika tidak ada Pengganti, Konstituen yang relevan dapat mencalonkan Anggota Dewan baru dan Pengganti.
- 6) Jika Anggota Dewan absen dari Rapat Dewan, maka Anggota Dewan Pengganti dapat menghadiri, berpartisipasi dalam diskusi, melakukan voting, dan umumnya melakukan semua fungsi Anggota Dewan dalam Rapat Anggota
- 7) Asosiasi EITI harus memperoleh jaminan liabilitas untuk Anggota Dewan. Dengan syarat dan kondisi harus disetujui oleh Dewan EITI.

PASAL 11 PENGAMAT EITI

- 1) Perwakilan dari organisasi internasional relevan seperti Bank Dunia, IMF, dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya, harus diundang oleh Dewan EITI untuk menghadiri Rapat Dewan EITI dan Rapat Anggota sebagai pengamat, jika hal ini bisa diakomodir secara praktis. Mereka tidak memiliki hak suara, tapi dapat diundang untuk mengutarakan pandangannya terhadap masalah spesifik. Dewan EITI dapat memutuskan hal-hal tertentu yang harus didiskusikan tanpa kehadiran pengamat.

Formatted: Indonesian

PASAL 12 KETUA EITI

- 1) Ketua EITI dipilih pada Rapat Anggota EITI biasa. Dewan EITI akan, sebelum tiap Rapat Anggota EITI, merekomendasi kandidat Ketua EITI untuk periode dua tahun setelah Rapat Anggota tersebut. Masa jabatan Ketua EITI dapat diperpanjang satu kali.
- 2) Ketua EITI akan:
 - i. Bertindak sebagai Kepala pada Rapat Anggota EITI;
 - ii. Bertindak sebagai Kepala pada Rapat Dewan EITI;
 - iii. Mempresentasikan laporan Dewan EITI pada Konferensi EITI dan Rapat Anggota EITI;
 - iv. Mewakili Dewan EITI dalam hal bersifat eksternal;
 - v. Menindaklanjuti bersama dengan Sekretariat EITI terkait dengan penerapan keputusan dari Dewan EITI; dan
 - vi. Mencari cara untuk mengembangkan hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan EITI.
- 3) Jika Ketua EITI tidak dapat memimpin sebuah Rapat Dewan, Anggota Dewan yang hadir dapat menunjuk Anggota Dewan lain memimpin Rapat tersebut.

PASAL 13 FUNGSI DEWAN EITI

- 1) Dewan EITI adalah badan eksekutif dari Asosiasi EITI dan akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik Asosiasi EITI. Dewan EITI akan melaksanakan kekuasaan eksekutif Asosiasi EITI dibawah keputusan Rapat Anggota Dewan, termasuk fungsi penting berikut ini:
 - i. Mempertimbangkan isu kebijakan umum dan spesifik yang mempengaruhi Asosiasi EITI;
 - ii. Menyetujui rencana kerja dan anggaran Asosiasi EITI;
 - iii. Menyetujui penyelenggaraan Konferensi EITI dan Rapat Anggota EITI;
 - iv. Mempresentasikan (melalui Ketua EITI) laporan aktivitas dan rencana aktivitas pada Konferensi EITI dan memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota EITI yang sama;
 - v. Mempresentasikan (melalui Ketua EITI) akun tahunan dan laporan audit untuk periode akuntansi sejak Rapat Anggota EITI biasa terakhir;
 - vi. Berhubungan dengan Kepala Sekretariat;
 - vii. Mengawasi dan mengarahkan (melalui Ketua EITI) pekerjaan Sekretariat EITI;
 - viii. Memastikan sifat dasar multi-stakeholder dari Asosiasi EITI dijaga dan secara penuh dicerminkan pada setiap level Asosiasi EITI termasuk dalam Komite-komitennya;
 - ix. Menetapkan prosedur berkaitan dengan proses validasi, termasuk keluhan, penyelesaian perselisihan, pertanyaan mengenai penghapusan negara, dan prosedur banding;
 - x. Mengadopsi prosedur dan peraturan yang lebih detail untuk manajemen dan operasional Asosiasi EITI termasuk isi dari rencana kerja negara dan rencana kerja perusahaan, proses validasi, manajemen dana, pembayaran proyek, barang, dan jasa, audit dan laporan dan persetujuan proyek; dan
 - xi. Merekomendasi kandidat untuk Ketua EITI sebelum setiap Rapat Anggota EITI biasa.

PASAL 14 KOMITE-KOMITE DEWAN EITI

- 1) Dewan EITI dapat menciptakan komite-komite untuk menindaklanjuti isu spesifik. Tiap komite harus termasuk dua atau lebih Anggota Dewan atau Penggantinya, dan komposisinya, sejauh memungkinkan, mencerminkan sifat multi-stakeholder dalam Asosiasi EITI. Masa kerja tiap komite beroperasi harus dicatat dalam Catatan Notulensi.

PASAL 15 PELAKSANAAN DAN CATATAN DEWAN EITI

- 1) Dewan EITI harus bertemu sekurang-kurangnya dua kali setahun. Jika keadaan membutuhkan, Rapat Dewan EITI dapat dilaksanakan secara simultan melalui konferensi telepon. Sekurang-kurangnya satu Rapat Dewan Anggota yang dihadiri pihak terkait dilakukan pertahun.
- 2) Sebuah Rapat Dewan harus diselenggarakan dengan pemberitahuan tertulis dari Ketua EITI sekurang-kurang 14 hari sebelumnya. Setiap pemberitahuan yang

lebih singkat waktunya, membutuhkan persetujuan tertulis dari semua Anggota Dewan.

- 3) Anggota Dewan harus membuat segala upaya untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dengan mempertimbangkan pandangan Anggota Dewan, Ketua EITI dapat memutuskan bahwa voting diperlukan. Setiap Anggota Dewan EITI memiliki satu suara. Voting dapat dilakukan melalui wali dengan surat kuasa tertulis.
- 4) Keputusan tidak dapat dibuat oleh Rapat Dewan kecuali kuorum dapat tercapai pada saat keputusan dibuat. Sekurang-kurangnya dua pertiga Anggota Dewan, dengan sekurang-kurangnya dua Anggota Dewan dari Konstituen Negara (satu Negara yang menerapkan EITI dan Negara Pendukung), satu Anggota Dewan dari Konstituen Organisasi Masyarakat Sipil, dan satu Anggota Dewan dari Perusahaan, adalah yang disebut kuorum.
- 5) Jika dibutuhkan voting, keputusan dibuat oleh mayoritas yang memiliki kualifikasi dan 13 suara memilih menyetujui keputusan tersebut, dan harus menyertakan dukungan sekurang-kurangnya sepertiga dari suara Anggota Dewan dari masing-masing Konstituen.
- 6) Anggota Dewan sebaiknya tidak memberikan suara pada suatu hal ataupun perjanjian dimana ia memiliki keterkaitan kepentingan secara langsung, atau jika ada situasi khusus yang menyebabkan keyakinan akan obyektivitasnya diragukan. Seorang Anggota Dewan harus mengumumkan keterkaitan kepentingan semacam itu secara tertulis pada Dewan EITI segera setelah dia menyadarinya. Seorang Anggota Dewan tidak akan dihitung dalam kehadiran kuorum dalam setiap keputusan yang dibuat tentang masalah dimana Anggota Dewan tersebut tidak memiliki hak suara.
- 7) Dewan EITI dapat menetapkan prosedur berkaitan dengan proses pembuatan keputusan di luar Rapat Dewan.
- 8) Asosiasi EITI dapat berkomitmen secara eksternal dengan persetujuan bersama seluruh Anggota Dewan. Dewan EITI dapat memilih dua atau beberapa Anggota Dewan untuk memiliki hak persetujuan, dimana dua di antaranya dapat membuat persetujuan bersama.

PASAL 16 SEKRETARIAT EITI

- 1) Sekretariat EITI ("Sekretariat") akan terdiri dari Kepala dan staf lainnya yang dibutuhkan. Anggota Sekretariat akan dikontrak secara langsung atau diperbantukan oleh Anggota EITI.
- 2) Sekretariat akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan harian Asosiasi EITI dibawah arahan Dewan EITI melalui Ketuanya.
- 3) Sekretariat harus menyimpan Daftar Anggota yang diperbarui setiap waktu.
- 4) Sekretariat harus menyimpan catatan dari Anggaran Dasar dan segala amandemen yang dilakukan.
- 5) Sekretariat harus mencatat Risalah dari semua Rapat Dewan EITI, Rapat Anggota, dan rapat-rapat Konferensi EITI dalam Buku Risalah Rapat. Seluruh Risalah harus dipublikasikan dalam situs EITI. Risalah semacam itu harus mencatat nama peserta yang hadir, keputusan yang dibuat dalam rapat, dan jika memungkinkan, alasan atas keputusan tersebut.

PASAL 17 KEPALA SEKRETARIAT EITI

- 1) Sekretariat akan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat purna-waktu yang akan mengatur secara harian jalannya Asosiasi EITI, termasuk pemilihan staf yang diperlukan, mengawasi perkembangan Asosiasi EITI dan menyediakan dukungan pada Dewan EITI. Kepala Sekretariat harus memberi laporan kepada Dewan EITI melalui Ketua EITI dan bertanggung jawab atas aktivitas Sekretariat.
- 2) Kepala Sekretariat, dan orang yang ditunjuknya dari Sekretariat, akan bertindak sebagai Sekretaris bagi seluruh Rapat Dewan EITI, Rapat Anggota EITI, dan Konferensi EITI.

Formatted: Indonesian

PASAL 18 PENDANAAN

- 1) Asosiasi EITI adalah asosiasi non-profit. Dananya terdiri dari kontribusi sukarela dari Anggota EITI dan hibah dari donor bilateral dan multilateral, institusi keuangan internasional dan agensi lainnya, entitas dan organisasi.
- 2) Asosiasi EITI dapat juga beroperasi melalui berbagai macam kontribusi.

PASAL 19 AKUN, MANAJEMEN DANA, DAN PEMBAYARAN EITI

- 1) Asosiasi EITI memegang akun bank terpisah atas nama sendiri, "Akun Manajemen Internasional EITI". Dewan EITI dapat memilih dua atau beberapa Anggota Dewan untuk memiliki hak tanda tangan, dimana dua di antaranya dapat menandatangani bersama. Akun Manajemen Internasional EITI dapat digunakan untuk setiap aktivitas yang berada dalam tujuan Asosiasi EITI dan rencana kerja yang disetujui Dewan EITI. Dana dapat digunakan untuk biaya administrasi dan pengelolaan, aktivitas negara-spesifik, dan aktivitas multi-negara.
- 2) Dewan EITI akan menunjuk seorang auditor independen eksternal untuk mengaudit secara tahunan Akun Manajemen Internasional EITI dan mempresentasikan laporan audit tertulis pada Dewan EITI. Dewan EITI akan mengembangkan laporan dan penyusunan auditing berkaitan dengan Akun Manajemen Internasional EITI yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan dan prosedur tambahan Asosiasi EITI.

PASAL 20 AMANDEMEN

- 1) Anggaran Dasar Asosiasi ini dapat diamandemen oleh Rapat Anggota EITI yang diselenggarakan dan dilakukan sesuai dengan Pasal 8 dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga Anggota hadir. Sebuah proposal amandemen harus dikomunikasikan secara tertulis kepada seluruh Anggota EITI empat minggu sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut.

PASAL 21 ULASAN

- 1) Tinjauan atas susunan pengelolaan Asosiasi EITI harus dilakukan oleh Dewan EITI dalam waktu dua tahun dari pendirian Asosiasi.

PASAL 22 PEMBATALAN DAN PEMBUBARAN

- 1) Tiap Anggota dapat membatalkan keanggotaannya dari Asosiasi EITI kapan saja. Pembatalan tersebut akan berlaku efektif pada saat penerimaan pemberitahuan tertulis oleh Kepala Sekretariat.
- 2) Asosiasi EITI dapat dibubarkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Pasal 8. Sebuah proposal untuk pembubaran harus dikomunikasikan secara tertulis kepada seluruh Anggota EITI empat minggu sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut.
- 3) Pada kejadian pembubaran, seluruh aset Asosiasi EITI akan diaplikasikan dengan tujuan serupa dengan yang dimiliki oleh Asosiasi EITI dan ditentukan oleh Dewan EITI dibawah persetujuan Rapat Anggota EITI.

PASAL 23 AWAL MASA BERLAKU

- 1) Anggaran Dasar ini berlaku semenjak pendirian Asosiasi EITI.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A Prinsip EITI

Seperti yang tercantum pada bagian ke-1.

LAMPIRAN B Kriteria EITI

Seperti yang tercantum pada bagian ke-2.

LAMPIRAN C Panduan Validasi EITI

Seperti yang tercantum pada bagian ke-3.

LAMPIRAN D Nota Kesepahaman dengan Multi-Donor Trust Fund

Dapat dilihat di: <http://eiti.org/files/EITI-MDTF-MOU.pdf>

LAMPIRAN E Penggunaan Logo EITI

Lihat di bawah.

LAMPIRAN F Draft EITI tentang Petunjuk Konstituen, EITI Sekretariat Internasional, 20 Januari 2009

Lihat selanjutnya di bawah ini.

LAMPIRAN E

PENGUNAAN LOGO EITI

Nama dan logo EITI adalah milik dari dewan EITI, rekanan dan jaringan lokal diperbolehkan untuk menggunakannya untuk mempromosikan inisiatif ini. Penggunaan logo EITI dapat membantu program EITI nasional, karena mudah diidentifikasi lewat gerakan EITI internasional. EITI memiliki standar internasional, kepemimpinan yang independen, dan proses validasi untuk mengawasi penerapan di negara-negara yang terlibat dalam inisiatif ini, menggunakan logo EITI dapat membangun hubungan antara program-program EITI nasional dan internasional yang dapat menguntungkan bagi negara yang menerapkan penerapan EITI. Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan logo EITI dapat dilihat di: <http://www.eiti.org/about/logopolicy>

Logo EITI



LAMPIRAN F

DRAFT ARAHAN KONSTITUEN EITI, SEKRETARIAT EITI INTERNASIONAL, 20 JANUARI 2009

Latar belakang

Laporan dari Kelompok Penasehat Internasional (International Advisory Group), yang diputuskan oleh Konferensi Oslo pada bulan Oktober 200 yang menyetujui pembentukan dewan yang terdiri atas 20 orang yang akan menjabat sampai konferensi EITI berikutnya. Dewan tersebut terdiri dari:

- * Ketua
- * Lima perwakilan dari negara-negara yang menerapkan EITI
- * Perwakilan dari negara donor
- * Perwakilan dari LSM
- * Perusahaan
- * Investor

Siapa saja selain Ketua diperbolehkan untuk memiliki pengganti.

Telah disetujui bagi setiap konstituen untuk menentukan bagaimana mereka memberikan persetujuan terhadap nominasi.

Proposal untuk penggabungan hukum atas Dewan dan Sekretariat EITI akan dipertimbangkan dalam Rapat Anggota EITI di Doha pada Februari 2009.

Proposal secara ekstensif didasarkan dari laporan Kelompok Penasehat Internasional (International Advisory Group). Disarankan bahwa pemangku kepentingan terwakili dalam cara yang sama seperti yang terjadi saat ini.

Berdasarkan laporan IAG 'Setiap konstituen harus menyetujui proses keterwakilan mereka di dalam Dewan yang diusulkan. Hal ini memerlukan pertimbangan lebih dulu dari setiap konstituen mengenai bagaimana mereka menerjemahkan syarat (i) terpilih menjadi perwakilan; (ii) terlibat dalam proses seleksi.

Panduan

Mengenali pentingnya prinsip bahwa beranekaragamnya konstituen EITI tetap memberikan mereka hak untuk menentukan proses internal mereka sendiri, dokumen ini memberikan beberapa pedoman dari kerja internal dari proses konstituen.

Konstituen didefinisikan di dalam Anggaran Dasar Asosiasi EITI, yang mana menentukan ukuran dari keanggotaan konstituen di dalam asosiasi dan jumlah kursi yang ada di Dewan EITI. (Inspirasi dan bahasa yang ada di pedoman ini banyak diambil dari pedoman proses konstituen dari Global Fund untuk Memerangi AIDS, TBC dan Malaria).

Beberapa dari konstituen EITI, termasuk konstituen dari perusahaan, terbagi secara tidak formal. Saat ini, contohnya: perusahaan tambang dapat mengatur dirinya sendiri secara independen dibanding perusahaan migas. Prinsip-prinsip berikut harus diterapkan pada proses yang diterapkan oleh subset berikut:

- * Proses dari tiap konstituen pengikut yang berbeda harus terbuka dan transparan.

* Informasi mengenai proses harus tersedia pada website EITI, termasuk orang yang dapat dihubungi jika ada pemangku kepentingan yang ingin terlibat.

* Proses harus fleksibel dan terbuka bagi para anggota baru. Konstituen harus mengingat kebutuhan untuk menyeimbangkan, kebutuhan untuk keberlanjutan dibanding kebutuhan untuk membarui dan memperluas kepemilikan di EITI.

* Mengenali pentingnya peranan dewan untuk EITI, negara-negara, dan organisasi yang didorong untuk menjadi wakil pada tingkat senior.

Konstituen dihibau untuk mengingat pentingnya bahwa Asosiasi dan Dewan EITI merupakan perwakilan dari semua pemangku kepentingan EITI. Misalnya, diharapkan negara-negara yang berasal dari wilayah yang berbeda, juga perusahaan dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki hubungan kuat ke wilayah yang berbeda, dapat terwakili. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan bahwa lembaga internasional seperti Dewan EITI dapat seimbang secara gender, kelompok konstituen didorong untuk menyakinkan bahwa kedua gender sudah cukup terwakili.

Secara khusus, bagi kelompok konstituen yang beraneka ragam:

Negara-negara

Asosiasi Anggota EITI

Seluruh negara yang menerapkan dan mendukung EITI berhak menjadi anggota Asosiasi EITI.

Dewan EITI

- Negara-negara yang menerapkan EITI: anggota dewan EITI dapat dipilih dari pemerintah negara-negara yang 'mendemonstrasikan penerapan EITI', seperti mengundang perwakilan dari negara-negara yang telah menghasilkan sedikitnya satu laporan EITI dalam 12 bulan terakhir (uraian ini diambil dari pertemuan IAG yang ke-5). Sejauh mungkin, perwakilan dapat mencerminkan baik penyebaran secara geografis maupun sektoral. Perlu dipertimbangkan sistem sub-konstituen untuk meyakinkan seluruh pandangan negara yang menerapkan EITI terwakili.
- Negara pendukung: anggota dewan harus dipilih dari pemerintahan negara-negara yang memberikan dukungan keuangan, politik, atau teknis bagi penerapan EITI. Negara-negara pendukung harus mempertimbangkan sebuah pendekatan sub-konstituen yang akan melibatkan negara-negara pendukung lain ketika mereka bergabung ke dalam EITI. Diharapkan pada dua tahun mendatang, beberapa negara berkembang dapat bergabung ke dalam kelompok ini.

Organisasi Masyarakat Sipil

Asosiasi Anggota EITI

Seluruh Organisasi Masyarakat sipil berhak menjadi anggota perhimpunan

Dewan EITI

Anggota dewan dipilih dari orang-orang yang secara aktif mendukung pelaksanaan EITI – baik di tingkat internasional maupun lokal.

The Publish What You Pay Coalition telah menyelenggarakan konsultasi dengan para anggota mengenai bagaimana mengelola proses seleksi konstituen. Bagi perwakilan dari masyarakat sipil yang berminat untuk mewakili asosiasi atau dewan EITI silakan menghubungi The Publish What You Pay Coalition.

Perusahaan

Asosiasi Anggota EITI

Semua negara mendukung EITI dan lima investor diperbolehkan menjadi anggota Asosiasi.

Dewan EITI

Ada empat kategori besar dari perusahaan-perusahaan yang dapat mewakili konstituen perusahaan EITI, yakni: perusahaan migas, perusahaan tambang, perusahaan milik negara dan investor institusional.

Pada tahun 2008, ExxonMobil dan Shell mewakili perusahaan migas di jajaran dewan, sementara Chevron dan Total duduk sebagai pengganti. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan minyak internasional lainnya untuk memberikan persetujuan atas representasi dan penunjukan jajaran dewan yang berikutnya

AngloAmerican dan The International Council on Mining and Metals mewakili perusahaan pertambangan pada tahun 2008, dengan perusahaan tambang dengan Areva sebagai pengganti. Perusahaan-perusahaan tersebut dan ICMM didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan tambang lainnya untuk memberikan persetujuan pada representasi di Asosiasi dan penunjukan jajaran dewan yang berikutnya.

PEMEX telah merepresentasikan perusahaan milik negara, dengan Petrobras sebagai pengganti. Perusahaan ini didorong untuk bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk memberikan persetujuan pada representasi di Asosiasi dan penunjukan jajaran dewan yang berikutnya

F&C Asset Management mewakili investor institusi di jajaran dewan pada tahun 2008, dengan Standard Life sebagai pengganti. Para investor tersebut didorong untuk bekerja sama dengan investor lainnya untuk memberikan persetujuan pada representasi di Asosiasi dan penunjukan jajaran dewan yang berikutnya.

Sekretariat bertugas untuk memfasilitasi semua proses nominasi

Keluhan

Jika seorang pemangku kepentingan mengajukan keberatan mengenai proses-proses yang diikuti konstituen untuk menyetujui representasi di Asosiasi atau Dewan EITI, keluhan tersebut harus pertama kali disampaikan kepada anggota konstituen. Jika tidak menemukan kata sepakat, harus dibuat laporan tertulis kepada Sekretariat Internasional EITI. Dalam jangka waktu tiga minggu sejak laporan diterima, sekretariat akan menyelidiki keberatan tersebut dan membuat laporan terhadap temuan kepada dewan EITI.

PUBLIKASI

Buku Peraturan EITI

Termasuk panduan validasi. Penerbitan ini juga berisi persyaratan EITI dalam proses penerapannya, yang mana meliputi Prinsip EITI, Kriteria, Persyaratan, Panduan Validasi, dan catatan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretariat EITI, serta penyampaian keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan EITI

Pedoman Bisnis EITI

Bagaimana perusahaan dapat mendukung penerapan EITI

www.eiti.org/document/businessguide

Bicara Keterbukaan

Sebuah pedoman untuk mengkomunikasikan EITI

www.eiti.org/document/communicationsguide

Pedoman EITI bagi oembuat undang-undang

Bagaimana mendukung dan memperkuat sumber daya keterbukaan

www.eiti.org/document/mpguide

Buku Sumber EITI

Sebuah pedoman untuk memberikan asistensi bagi negara-negara penerap EITI

www.eiti.org/document/sourcebook

Memacu penerapan EITI di Sektor Pertambangan

Sebuah laporan dari konsultan dengan para pemangku kepentingan

www.eiti.org/document/mining

Menerapkan EITI

Menerapkan pendidikan dini dari lapangan (oleh Bank Dunia)

www.eiti.org/document/implementingtheeiti

Pengeboran

Sebuah panduan bagi masyarakat sipil untuk EITI (oleh RWI)

www.eiti.org/document/drillingdown

Laporan Perkembangan EITI 2009-2011

Penerbitan ini memuat garis besar kemajuan yang dihasilkan dari penerapan EITI berikut EITI Global Conference di Doha pada Februari 2009. Publikasi ini diluncurkan pada konferensi global EITI di Paris pada Maret 2011.

www.eiti.org/document/progressreport

Lembar fakta adalah dokumen singkat yang menjelaskan elemen-elemen dari kebijakan EITI:

Lembar fakta EITI : www.eiti.org/document/factsheet

Bagaimana menjadi negara kandidat EITI : www.eiti.org/document/how-become-candidate-country

Bagaimana mendukung EITI - Perusahaan ekstraktif :

www.eiti.org/document/supporting-extractive

Bagaimana mendukung EITI – Perusahaan non-ekstraktif :

www.eiti.org/document/supporting-non-extractive

Bagaimana mendukung negara-negara EITI: www.eiti.org/supporters/countries

Dukungan EITI : www.eiti.org/document/endorsements

Catatan Pertama Praktik yang benar: pelaporan EITI www.eiti.org/document/good-practice-eiti-reporting

Catatan Kedua Praktik yang benar: Komunikasi www.eiti.org/document/good-practice-eiti-communications

Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) adalah sebuah standar global dikembangkan yang mempromosikan transparansi pendapatan di tingkat lokal. Ini adalah koalisi pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, investor dan organisasi internasional. Melalui metodologi yang kuat namun fleksibel pembayaran perusahaan dan pendapatan pemerintah dari minyak, gas dan pertambangan dipublikasikan dan kesenjangan berkurang. Meskipun Dewan EITI dan Sekretariat internasional adalah kustodian dari proses EITI, penerapan berlangsung di tingkat negara, dalam proses yang menekankan partisipasi *multi-stakeholder*. www.eiti.org